



Jakarta
Public Policy
Center



SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

JL. ABDUL MUIS NO. 66, GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT



oooo

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

oooo

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2022**
Jl. Abdul Muis No.66, Gambir,
Kota Administrasi Jakarta Pusat

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,



Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat ALLAH SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023. Bersama-sama, kami ingin berbagi pencapaian, tantangan, dan komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja, sejalan dengan visi, misi, tujuan dan program yang telah diamanahkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Penilaian Kinerja dan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta merupakan salah satu lembaga sektor publik yang berdasarkan mandat Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja Perangkat Daerah, yang mengemban tugas untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi DKI Jakarta.

Sebagai bagian dari perjalanan kami, LKIP ini bukan hanya sekedar dokumen rutin, tetapi merupakan hasil dari dedikasi kami dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Dalam era dinamis ini, LKIP ini juga menjadi wujud dari upaya kami untuk menyajikan informasi dengan ringan namun substansial, sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan. Melalui laporan ini, kami tidak hanya menawarkan laporan kinerja, tetapi juga sebuah kisah perjalanan yang menceritakan perjuangan, prestasi, dan semangat inovasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Dengan semangat terbuka dan antusiasme, kami menerima pandangan dan masukan yang diberikan sebagai bahan berharga untuk kami meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Terima kasih atas perhatian dan dukungan Saudara, mari bersama-sama menciptakan masa depan yang lebih baik dan penuh prestasi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Jakarta, Januari 2024

Mochamad Miftahulloh Tamary
Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dari tandatangan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terpancar harapan akan pencapaian yang sesuai dengan target yang telah diperjanjikan dalam setiap Indikator Kinerja Utama (IKU). Meskipun dihadapkan pada tantangan yang berat, semangat dan dedikasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta menghasilkan capaian akuntabilitas kinerja yang membanggakan. Dalam setiap langkah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu melampaui batas-batas capaian yang telah direncanakan, membuktikan bahwa dengan kerja keras dan kolaborasi yang sinergis, setiap tantangan dapat diatasi, dan setiap impian dapat diwujudkan.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Pengembangan Kompetensi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan <i>Knowledge Management</i>	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Indeks	31	38	123% (Berdasarkan nilai yang diperoleh pada e-SAKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta)
2.	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	38,7	Data belum rilis	38,16 (Penilaian IP ASN Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BKN RI)
3.	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
4.	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak	Persen	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		Penyandang Disabilitas				
5.	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Persen	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
6.	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program					
			Kinerja 2022			Kinerja 2023		
			Target	Capaian Target	Tingkat Capaian	Target	Capaian Target	Tingkat Capaian
1.	Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	31	30,97	335,5	Melebihi Target	31	38	Melebihi Target
2.	Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas ASN	38,7	36	38,13	Melebihi Target	38,7	Data Belum Rilis (DBR)	

Selain dari hal tersebut diatas, masih terdapat keberagaman indikator yang diberikan kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta di tahun 2023 dalam bentuk Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sebanyak 6 (enam) indikator, Sasaran Khusus sebanyak 18 (delapan belas) indicator, Sasaran Operasional sebanyak 3 (tiga) indikator.

Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta di implementasikan dari Tujuan dan Sasaran BPSDM, yang didukung oleh fondasi kokoh Rencana Strategis Tahun 2023-2026, yang diperkuat oleh 2 (dua) Program Prioritas dan satu Program Penunjang, yang di uraikan dibawah ini:

No	Program Kepegawaian Daerah				
	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1.	17.660.314.630	13.413.245.541	75,95%	4.247.069.089	31,66

No	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
2.	40.623.302.320	36.348.935.244	89,48%	4.274.367.076	11,76

No	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
3.	64.973.174.135	62.066.326162	95,53%	2.906.847.973	4,68

Faktor keberhasilan dan penghambat menjadi pemandu yang mengatur arah perjalanan BPSDM Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2023 dalam meraih pencapaian dan menghadapi tantangan, faktor yang menjadi penentu keberhasilan antara lain: Komitmen yang kuat untuk mengintegrasikan berbagai indikator kinerja, termasuk dari Kegiatan Strategis Daerah, Sasaran Khusus, dan Sasaran Operasional. Dengan pemahaman yang mendalam serta dukungan kuat dari program-program prioritas yang telah dirumuskan. BPSDM Provinsi DKI Jakarta mampu mengalirkan energi positif ke setiap aspek pelaksanaan tugasnya. Ini tidak hanya memungkinkan pengukuran kinerja yang holistik, tetapi juga memberikan arah yang jelas dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Namun, di balik pencapaian tersebut, terdapat tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Salah satu penghambat yang muncul adalah kompleksitas dalam mengelola berbagai indikator kinerja yang tersebar dari berbagai sumber. Koordinasi yang efektif dan sinergi antar unit kerja menjadi kunci untuk memastikan bahwa semua aspek kinerja terintegrasi dengan baik dan tidak terjadi tumpang tindih. Selain itu, terdapat pula kendala terkait dengan terbatasnya sumber daya baik manusia maupun sarana dan prasarana serta teknologi yang menjadi hambatan dalam mengoptimalkan pencapaian kinerja. Dengan tantangan-tantangan ini, BPSDM dapat merancang strategi yang tepat untuk mengatasi setiap hambatan dan menjadikannya sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang lebih lanjut.

Untuk melakukan Rencana Aksi di Tahun 2024, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mempunyai 3 (tiga) indikator sebagai berikut:

- A. Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BPSDM, adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah:
 1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global;
 2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai.
- B. Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara, adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah: Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah;
- C. Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta, adapun Rencana Aksi yang akan dilakukan pada tahun 2024 adalah:
 1. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas;
 2. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I - PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan dan Manfaat	5
C. Kedudukan Perangkat Daerah	7
D. Tugas dan Fungsi	7
E. Struktur Organisasi	8
F. Aspek Strategis Organisasi	9
G. Sistematika Penulisan	10
BAB II - PERENCANAAN KINERJA	13
A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah	15
C. Tujuan dan Sasaran Pada RPJMD	16
BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA	34
A. Capaian Kinerja	34
B. Capaian Strategis Kinerja	37
1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan 2023	38
2. a. Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023	67
b. Capaian Sasaran dari KSD Tahun 2023	73
3. Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	94
4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	96
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Serta Alternatif Solusi	96
6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM) Dan (Anggaran)	99

7. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	99
8. Rencana Kedepan Guna Meningkatkan Capaian	100
C. Sumber Daya Manusia	106
D. Realisasi Anggaran	111
BAB IV - PENUTUP	123
A. Kesimpulan	123
B. Saran dan Rekomendasi	124
LAMPIRAN	126
A. Lampiran I : Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah	126
B. Lampiran II : Penghargaan Tingkat Nasional	134
C. Lampiran III : Inovasi	134
D. Lampiran IV : Dokumentasi Layanan BPSDM Provinsi DKI Jakarta	139

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	2
Tabel 2. Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta	15
Tabel 3. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023	17
Tabel 4. Anggaran Belanja Tahun 2023	32
Tabel 5. Pelatihan yang Dilakukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta	35
Tabel 6. Dimensi Nilai Profesionalitas ASN	43
Tabel 7. Penilaian Sistem Merit BPSDM Provinsi DKI Jakarta	44
Tabel 8. Rekap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	53
Tabel 9. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat	54
Tabel 10. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	58
Tabel 11. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	60
Tabel 12. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Bidang Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi	62
Tabel 13. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran UPT Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	64
Tabel 14. Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran UPT UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	65
Tabel 15. Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 – 2023	67
Tabel 16. Realisasi Anggaran APBD-P Tahun 2023	72
Tabel 17. TLHP APIP Selesai Ditindaklanjuti	73
Tabel 18. Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP.....	74
Tabel 19. Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	75
Tabel 20. Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah	76
Tabel 21. Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE	76
Tabel 22. Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja	78
Tabel 23. Pelaksanaan e-order	80
Tabel 24. Perhitungan IP ASN untuk Dimensi Kompetensi	85
Tabel 25. Dokumen Modul/Kurikulum Pelatihan Disabilitas Bagi ASN Provinsi DKI Jakarta	92

Tabel 26. Realisasi TL Arahan Gubernur	93
Tabel 27. Realisasi TL Aduan Masyarakat	94
Tabel 28. Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah	94
Tabel 29. Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya	95
Tabel 30. Laporan Tahunan KASN	96
Tabel 31. Rencana Aksi Tahun 2024	100
Tabel 32. Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan	107
Tabel 33. Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan	108
Tabel 34. Pegawai Berdasarkan Pendidikan	109
Tabel 35. Pegawai Berdasarkan Usia	110
Tabel 36. Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan	110
Tabel 37. Pegawai Berdasarkan Jebis Kelamin	111
Tabel 38. Realisasi Program Kepegawaian Daerah	111
Tabel 39. Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	112
Tabel 40. Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	112
Tabel 41. Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta	113

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Realisasi e-Order.....	80
Gambar 2.	Hasil Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik	81
Gambar 3.	Hasil Penilaian SAKIP	82
Gambar 4.	Hasil Penilaian Sistem Merit	83
Gambar 5.	Berita Acara Implementasi Manajemen Risiko	84
Gambar 6.	Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (dua puluh) Jam Pelajaran	86
Gambar 7.	Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah	87
Gambar 8.	Laporan Manajemen Pengetahuan	92

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.	Struktur Organisasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta	9
----------	--	---



BAB I PENDAHULUAN

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) bukan sekadar kewajiban rutin, tetapi adalah ekspresi nyata tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta. Sejalan dengan aturan main dari regulasi tingkat pusat hingga daerah, termasuk dalam lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kami tidak hanya mengejar pencapaian sasaran strategis, tetapi juga menampilkan transparansi dan akuntabilitas kinerja dengan gaya yang lebih informatif.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Publik, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan terbaru adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Aturan tersebut memberikan landasan bagi OPD untuk berinovasi dalam menggelar pertanggungjawaban. Kami tidak hanya menyusun LKIP sebagai rutinitas, tetapi sebagai laporan yang dapat memberikan informasi mengenai prestasi dan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam upaya mengejar standar good governance, Laporan Perjanjian Kinerja bukan hanya sebuah dokumen, melainkan sebuah karya nyata untuk perbaikan dan penyempurnaan dari tahun ke tahun. Setiap halaman menjadi lembaran cerita perjuangan OPD, yang diukir dengan transparansi yang tak mendalam serta akuntabilitas yang tajam.

Kami, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, melihat LKIP ini bukan hanya sebagai kewajiban, tetapi sebagai panggilan untuk menunjukkan keberanian dan dedikasi kami dalam mencapai tujuan strategis. Dalam memahami peran kami, kami tidak hanya mengikuti aturan, tetapi menciptakan standar baru dalam pertanggungjawaban yang dinamis dan bergaya. Mari bersama-sama menjelajahi cerita kesuksesan dan tantangan kami dalam mengukir prestasi di tengah dinamika pemerintahan yang terus berubah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Keberadaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), di Provinsi DKI Jakarta menjadi pilar utama dalam merespons kebutuhan pengembangan kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian/Lembaga/Daerah.

Seiring dengan perkembangan dinamis di berbagai sektor, kegiatan pengembangan kompetensi di tingkat OPD menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas dan kapabilitas ASN di khususnya di Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada umumnya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sebagai garda terdepan dalam pengembangan kompetensi, memainkan peran strategis dalam menyeleksi kegiatan pembelajaran dengan kebutuhan yang terus berkembang. Sebagai wahana inovasi, BPSDM berupaya secara terus-menerus menghadirkan program pengembangan yang responsif, mencakup tingkat lokal, nasional, dan bahkan internasional.

Kegiatan pengembangan kompetensi tidak lagi hanya sebagai rutinitas, tetapi menjadi sumber inspirasi dan pemacu perubahan. ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada umumnya diharapkan tidak hanya menjalankan tugasnya secara konvensional, melainkan juga terus meningkatkan kualitas diri melalui berbagai program yang disediakan oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Dalam hal kuantitas, upaya peningkatan kapasitas ASN diukur melalui partisipasi aktif dalam kegiatan pengembangan kompetensi. Semakin banyak ASN yang terlibat, semakin kuat fondasi keunggulan kompetitif di tingkat individu maupun organisasi.

Sementara itu, aspek kualitas menjadi fokus utama. BPSDM Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyediakan program pelatihan dan pengembangan yang tidak hanya relevan dengan tuntutan pekerjaan saat ini, tetapi juga antisipatif terhadap dinamika masa depan. Kemampuan baru, kepemimpinan yang efektif, dan adaptabilitas menjadi parameter kualitas yang diperlukan dari setiap ASN.

Dengan demikian, harapan terbesar adalah terwujudnya ASN di Provinsi DKI Jakarta dan di Kementerian/Lembaga/Daerah pada umumnya, yang tidak hanya unggul dalam kuantitas, tetapi juga mampu beradaptasi dan berkembang, siap menghadapi tantangan di level lokal, nasional, bahkan internasional. Keberhasilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam menjalankan perannya sebagai penopang pengembangan kompetensi menjadi kunci penting dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2023, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel. 1
Data ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

a. Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	PNS/CPNS	PPPK	JUMLAH	PERSEN
1	LAKI-LAKI	22.804	5.457	28.261	42,79
2	PEREMPUAN	27.607	10.174	37.781	57,21
TOTAL		50.411	15.631	66.042	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

b. Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	PNS/CPNS	PPPK	JUMLAH	PERSEN
1	ISLAM	45.098	14.220	59.318	89,82
2	PROTESTAN	4.039	1.112	5.151	7,80
3	KATOLIK	1.095	266	1.361	2,06
4	HINDU	112	19	131	0,20
5	BUDHA	67	12	79	0,12
6	KONGHUCU	-	1	1	0,00
7	LAINNYA	-	1	1	0,00
TOTAL		50.411	15.631	66.042	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

c. Berdasarkan Usia

NO	USIA	PNS/CPNS	PPPK	JUMLAH	PERSEN
1	Kurang dari <u>25</u>	125	10	135	0,20
2	25 s.d. 30	3.785	2.911	6.696	10,14
3	31 s.d. 36	5.615	3.474	9.089	13,76
4	37 s.d. 42	8.416	4.002	12.418	18,80
5	43 s.d. 48	8.233	2.940	11.173	16,92
6	49 s.d. 55	14.157	1.864	16.021	24,26
7	Lebih dari <u>55</u>	10.080	430	10.510	15,91
TOTAL		50.411	15.631	66.042	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

d. Berdasarkan Pendidikan

NO	PENDIDIKAN	PNS/CPNS	PPPK	JUMLAH	PERSEN
1	SD	111	-	111	0,17
2	SMP	305	2	307	0,46
3	SMA	10.893	34	10.927	16,55
4	D1	107	-	107	0,16
5	D2	636	1	637	0,96
6	D3	4.818	11	4.829	7,31
7	D4	228	15	243	0,37
8	S1	29.567	15.533	45.100	68,29
9	S2	3.674	2	3.676	5,57
10	S3	72	-	72	0,11
11	TIDAK DIKETAHUI	-	33	33	0,05
TOTAL		50.411	15.631	66.042	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

e. Berdasarkan Status Pegawai

NO	STATUS PEGAWAI	JUMLAH	PERSEN
1	PNS	50.409	100,00
2	CPNS	2	0,004
3	PPPK	-	0,00
TOTAL		50.411	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Berdasarkan Eselon

NO	ESELON	JUMLAH	PERSEN
1	I	2	0,05
2	II	80	1,95
3	III	861	20,96
4	IV	3.164	77,04
TOTAL		4.107	100

NO	ESELON	JUMLAH	PERSEN
1	I.b	2	0,05
2	II.a	38	0,93
3	II.b	42	1,02
4	III.a	580	14,12
5	III.b	281	6,84
6	IV.a	1.723	41,95
7	IV.b	1.441	35,09
TOTAL		4.107	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

g. Berdasarkan Golongan

NO	GOLONGAN	JUMLAH	PERSEN
1	I	200	0,40
2	II	7.312	14,50
3	III	33.772	66,99
4	IV	9.127	18,11
TOTAL		50.411	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

f. Berdasarkan Wilayah Kerja

NO	WILAYAH KERJA	JUMLAH	PERSEN
1	PROVINSI	8.365	16,59
2	JAKARTA PUSAT	5.925	11,75
3	JAKARTA UTARA	5.584	11,08
4	JAKARTA BARAT	7.426	14,73
5	JAKARTA SELATAN	9.855	19,55
6	JAKARTA TIMUR	12.423	24,64
7	PULAU SERIBU	833	1,65
TOTAL		50.411	100

Sumber: Pusdatin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta

B. Tujuan dan Manfaat

Maksud penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 ini bertujuan untuk melaksanakan amanat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, pada pasal 5 yang menyebutkan bahwa pelaporan kinerja merupakan bagian dari SAKIP.

Adapun tujuan penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menguraikan Target Kinerja yang Diperjanjikan

Dalam setiap baris laporan ini, kita akan menyusuri jejak target kinerja yang telah kami rancang dengan penuh perencanaan dan dedikasi. Dari penguasaan teknologi hingga peningkatan kapasitas ASN, setiap target adalah komitmen kami untuk menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan berkualitas. Melalui pengungkapan yang jelas, kami ingin membagikan tujuan dan sasaran kami tentang masa depan yang lebih baik untuk pelayanan publik.

2. Gambaran Keberhasilan/Kegagalan dalam Pencapaian Target

Laporan ini mengajak para stakeholders untuk menyelami realitas keberhasilan dan kegagalan yang dihadapi oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta selama tahun anggaran 2023. Dengan membuat informasi yang transparan, kami tidak hanya akan merayakan pencapaian gemilang, tetapi juga mengakui setiap rintangan yang mungkin dihadapi. Setiap data dan indikator dipaparkan dengan jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, memberikan gambaran lengkap tentang perjalanan organisasi.

3. Bahan Evaluasi untuk Perencanaan Program dan Kegiatan

Sebagai bahan evaluasi, laporan ini bukan hanya dokumen statis, melainkan katalisator perubahan. Semua pemangku kepentingan diharapkan dapat membaca setiap halaman sebagai inspirasi dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan di masa mendatang. Setiap catatan evaluasi menjadi titik awal untuk memetakan strategi yang lebih baik, merangkul pembelajaran sebagai pondasi utama pembangunan.

Adapun manfaat dari penyusunan LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 membawa sejumlah manfaat yang signifikan, mencakup berbagai aspek yang mendukung transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kinerja. Berikut adalah beberapa manfaatnya:

1. Transparansi dan Akuntabilitas:

LKIP menjadi alat utama untuk menunjukkan transparansi dalam penyelenggaraan tugas dan tanggung jawab BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dengan merinci pencapaian dan kinerja secara terperinci, laporan ini memungkinkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk melihat dengan jelas bagaimana anggaran dan sumber daya digunakan, serta sejauh mana target kinerja tercapai. Akuntabilitas menjadi lebih terjamin karena LKIP memberikan dasar yang kuat untuk pertanggungjawaban.

2. Evaluasi dan Perbaikan Kinerja:

Laporan Kinerja tidak hanya menjadi catatan sejarah, tetapi juga alat evaluasi yang efektif. Dengan mengevaluasi pencapaian terhadap target yang telah ditetapkan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kendala yang dihadapi. Hal ini membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan, memastikan bahwa setiap tahunnya menjadi tonggak lebih baik daripada sebelumnya.

3. Basis Informasi Strategis

LKIP menyediakan basis informasi yang strategis bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam merencanakan kegiatan dan program ke depan. Data dan evaluasi yang terkandung dalam laporan dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan baru, menyesuaikan strategi pengembangan, dan mengidentifikasi area fokus untuk peningkatan kinerja di masa depan.

4. Peningkatan Transparansi Publik:

Laporan Kinerja juga berperan dalam meningkatkan transparansi di mata masyarakat. Dengan memberikan informasi terperinci tentang capaian kinerja dan penggunaan anggaran, BPSDM Provinsi DKI Jakarta memberikan gambaran yang jelas kepada publik tentang kontribusi dan dampak positif yang dihasilkan oleh lembaga tersebut.

5. Penguatan Hubungan dengan Pemangku Kepentingan:

LKIP menjadi alat untuk membangun dan memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah pusat, pemangku kebijakan, dan masyarakat umum. Informasi yang jelas dan terukur yang disajikan dalam laporan dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat komunikasi antara BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan berbagai pihak yang terlibat.

C. Kedudukan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, di dalam Sistematisasi tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Bagan Struktur Organisasi BPSDM sebagai berikut:

1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
3. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berada di bawah koordinasi Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah;
4. Kepala Badan melaksanakan tugas memimpin, mengoordinasikan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan.

D. Tugas dan Fungsi

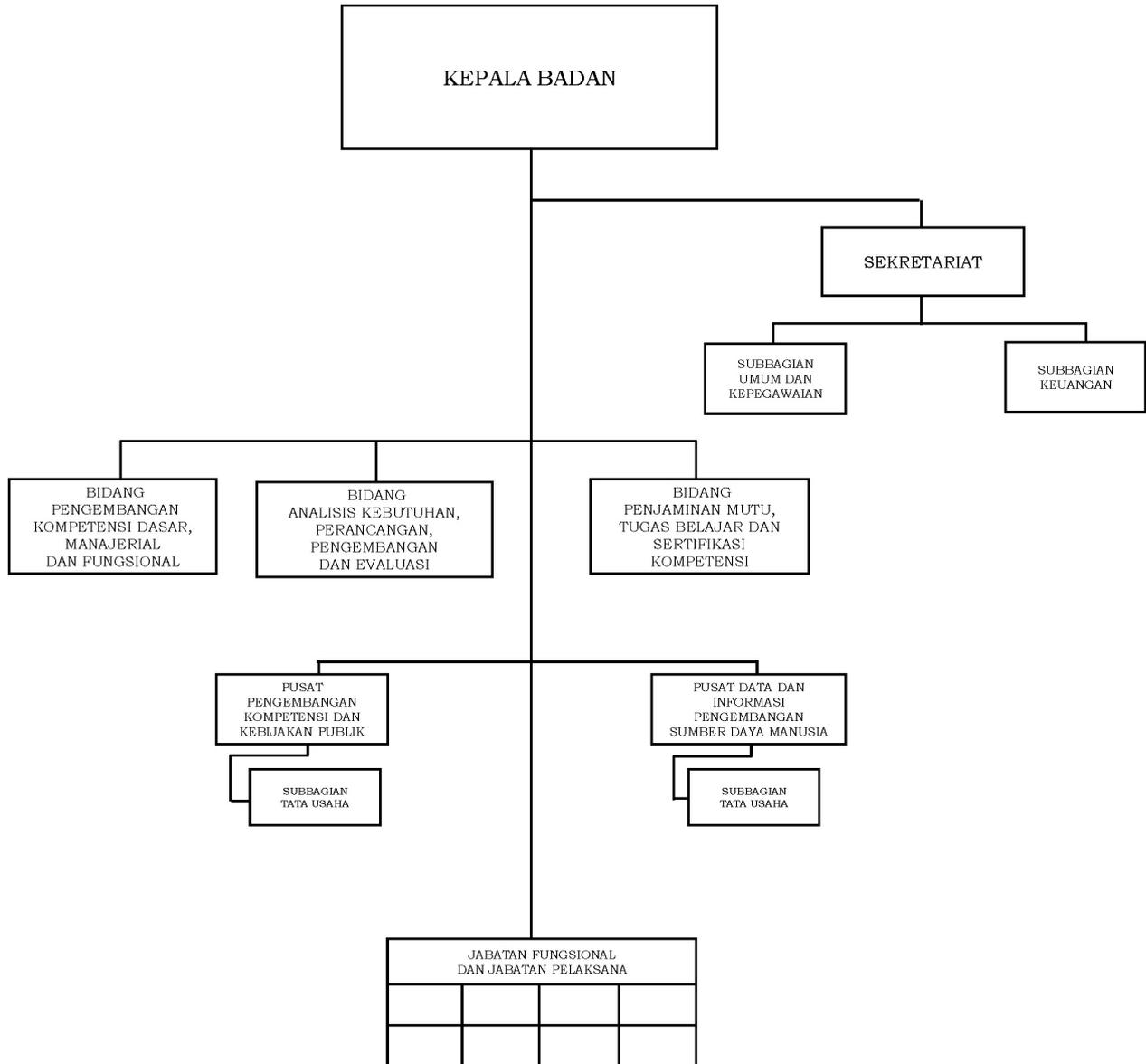
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja, dan rencana kerja dan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - c. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - d. pelaksanaan pengembangan kompetensi;
 - e. pengelolaan tugas belajar Pegawai Negeri Sipil;
 - f. pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
 - g. pengelolaan analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan dan evaluasi pengembangan kompetensi;
 - h. pengesahan Surat Tanda Tamat Pelatihan yang diselenggarakan Badan dan/atau PD;
 - i. pemberian sertifikat/Surat Tanda Tamat Pelatihan, piagam penghargaan bagi peringkat I, II dan III dalam rangka pengembangan kompetensi;
 - j. pengelolaan sertifikasi kompetensi;
 - k. pembinaan, pengendalian, pengoordinasian dan rekomendasi pelaksanaan pengembangan kompetensi pada PD;
 - l. pengelolaan penjaminan mutu sertifikasi kompetensi;
 - m. pelaksanaan knowledge management;
 - n. pengelolaan Jakarta Corporate University;
 - o. pengendalian analisis kesenjangan kompetensi fungsional;
 - p. pengelolaan sarana, prasarana dan teknologi pengembangan kompetensi;
 - q. pelaksanaan pemungutan, penatausahaan, penyeteroran, pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi pelayanan pengembangan kompetensi;
 - r. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;

- s. pengelolaan data dan informasi pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan pelatihan;
- t. pelaksanaan kesekretariatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- u. pelaksanaan pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

E. Struktur Organisasi

1. Struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - a. Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2) Subbagian Keuangan;
 - b. Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional;
 - c. Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi;
 - d. Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi;
 - e. Unit Pelaksana Teknis, terdiri atas:
 - 1) Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik, terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - f. Jabatan Fungsional; dan
 - g. Jabatan Pelaksana.
2. Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibentuk unit kerja nonstruktural yang menyelenggarakan tugas sesuai dengan pibidangnya, yang terdiri atas:
 - a. Subkelompok pada Sekretariat dan Bidang antara lain:
 - 1) Subkelompok Program dan Pelaporan;
 - 2) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Dasar dan Kader;
 - 3) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Manajerial;
 - 4) Subkelompok Pengembangan Kompetensi Fungsional;
 - 5) Subkelompok Analisis Kebutuhan;
 - 6) Subkelompok Perancangan dan Pengembangan;
 - 7) Subkelompok Evaluasi;
 - 8) Subkelompok Penjaminan Mutu;
 - 9) Subkelompok Tugas Belajar;
 - 10) Subkelompok Sertifikasi Kompetensi;
 - b. Satuan Pelaksana pada Unit Pelaksana Teknis.
 - 1) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pemerintahan dan Teknis;
 - 2) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Strategis;
 - 3) Satuan Pelaksana Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural;
 - 4) Satuan Pelaksana Hubungan Antarlembaga;
 - 5) Satuan Pelaksana Pengelolaan Data;
 - 6) Satuan Pelaksana Sistem Informasi;
 - 7) Satuan Pelaksana Teknologi Pembelajaran;

Bagan. 1
Struktur Organisasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta



Sumber:

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 17 Tahun 2023
tentang Perubahan Pergub 57 Tahun 2022 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

F. Aspek Strategis Organisasi

Dalam rangka menindaklanjuti sesuai dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023 - 2026, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dengan cermat merancang aspek strategis yang sejalan dengan tujuan pembangunan daerah. Berikut adalah naratif yang disesuaikan dengan konteks Rencana Pembangunan Daerah:

1. Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Sistem Informasi:

Sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengintegrasikan strategi penguatan infrastruktur teknologi dan sistem informasi untuk mendukung visi pemerintah daerah. Penerapan teknologi canggih di dalam program pelatihan dan manajemen data menjadi landasan untuk menciptakan lingkungan administrasi yang efisien dan terkini.

2. Pengembangan Program Pelatihan Berbasis Kebutuhan Pemda:
Dalam mendukung kebutuhan spesifik Pemerintah Daerah, BPSDM Jakarta menyesuaikan pengembangan program pelatihan untuk mencerminkan prioritas pembangunan daerah. Analisis mendalam tentang kompetensi yang diperlukan dalam merancang dan mengelola program pembangunan menjadi dasar untuk kurikulum pelatihan. BPSDM berperan aktif dalam menyediakan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
3. Penguatan Kemitraan Lokal dan Internasional:
BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadikan penguatan kemitraan sebagai strategi untuk mendukung Rencana Pembangunan Daerah. Kolaborasi erat dengan lembaga pendidikan lokal, sektor swasta, dan mitra internasional menjadi kunci untuk menghadirkan program pelatihan yang berdaya saing dan mengakomodasi dinamika pembangunan daerah.
4. Peningkatan Evaluasi dan Pengukuran Dampak Pembangunan:
BPSDM memposisikan diri sebagai elemen kritis dalam pemantauan dan evaluasi dampak pembangunan daerah. Sistem evaluasi yang diperkuat digunakan untuk mengukur keberhasilan program pelatihan dan kontribusi terhadap pencapaian target pembangunan. Hal ini membantu Pemerintah Daerah untuk memastikan bahwa sumber daya manusia yang dikembangkan memiliki dampak positif pada pelaksanaan rencana pembangunan.
5. Pengembangan Kepemimpinan dan Inovasi Organisasi untuk Pemda:
Dalam mendukung Rencana Pembangunan Daerah, BPSDM Jakarta fokus pada pengembangan kepemimpinan yang terkait dengan kebijakan dan proyek-proyek pembangunan daerah. Program pelatihan khusus diperkenalkan untuk memperkuat kemampuan kepemimpinan yang mendukung transformasi daerah. Selain itu, budaya inovasi organisasi diimplementasikan untuk memastikan adopsi ide-ide baru dalam rangka mendukung target pembangunan daerah.

Melalui strategi ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta berkomitmen untuk menyumbangkan sumber daya manusia yang berkualitas dan mendukung penuh Rencana Pembangunan Daerah, menciptakan sinergi yang kuat antara pengembangan kompetensi ASN dan agenda pembangunan yang berkelanjutan.

G. Sistematika Penulisan

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014, LKIP BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

B. Capaian Strategis Kinerja

Penjelasan detail terkait dengan capaian strategis kinerja dimasing-masing indikator kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
 5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya (SDM dan Anggaran);
 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
 8. Rencana Kedepan guna meningkatkan capaian.
- C. Sumber Daya Manusia BPSDM, menjelaskan tentang kondisi SDM di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.
- D. Realisasi Anggaran, pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV: PENUTUP

Pada bab ini diuraikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya serta saran dan rekomendasi dari Inspektorat untuk perbaikan kinerja untuk tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah;
2. Penghargaan dari tingkat Nasional / internasional;
3. Inovasi;
4. Lain-lain yang dianggap perlu.



Jakarta
Public Policy
Center



BAB II PERENCANAAN KINERJA

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Pada Rencana Pembangunan Daerah

Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi dimana pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan kompetensi SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah lainnya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat *well-informed* maka keunggulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar. Hal tersebut selaras dengan visi gubernur sebagaimana tercantum dalam Tujuan dan Sasaran RPD.

Untuk itulah, salah satu upaya terpenting dalam menyiapkan SDM aparatur yang tangguh, sebagaimana tercermin dalam **Pokok-Pokok Tujuan: “Meningkatkan Kapasitas dan Kualitas Pemerintah”**. Atas dasar tersebut dimaksud maka peran dan kedudukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam mendukung ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih maju dan unggul.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-masa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu **“Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh, maju dan modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”**

Oleh karena itu, dalam merumuskan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang dituangkan dalam dokumen Renstra, sudah selayaknya untuk selalu sejalan dengan visi dan misi pembangunan nasional dan Kementerian/Lembaga maupun instansi yang terkait dengan tugas dan fungsi BPSDM Provinsi DKI Jakarta agar pelaksanaannya selalu dalam arah dan koridor yang benar. Untuk itu sangatlah perlu memperhatikan Visi dan Misi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN dan RB), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serta Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI).

Visi pembangunan nasional adalah **“Berdaulat, Maju, Adil Dan Makmur”**. Misi yang diemban untuk memenuhi visi yang telah dirumuskan adalah: (1) mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan; (2) mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan negara hukum; (3) mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim; (4) mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera; (5) mewujudkan bangsa yang berdaya-saing; (6) mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional; dan, (7) mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Dari visi dan misi RPJMN dan setelah dipertajam dengan visi Kementerian PANRB: **“Mewujudkan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel dan Melayani. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi”**, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mengembangkan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan; (2) Membangun SDM Aparatur yang Kompeten dan Kompetitif;

Menciptakan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien; dan (4) Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Reformasi Birokrasi. Dengan demikian, BPSDM Provinsi DKI Jakarta juga harus mendukung gerakan reformasi birokrasi tersebut. Hal ini sudah ditunjukkan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BPSDM dalam melaksanakan pengembangan kompetensi sebagai upaya peningkatan kapasitas aparatur, dalam rangka mewujudkan birokrasi yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean government*) serta

mencapai kualitas pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran mengacu kepada salah satu misi Kementerian PANRB, yaitu: Mewujudkan Aparatur Sipil Negara yang Kompeten dan Kompetitif.

Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri yang menetapkan visi **“Mewujudkan Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang Kompeten dan Profesional”**, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Meningkatkan Standar Kompetensi Aparatur Pemerintahan dalam Negeri; (2) Menyelenggarakan Sertifikasi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri; dan (3) Mengembangkan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri. Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada ketiga misi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

Selaku lembaga penyelenggara pendidikan dan pelatihan, program-program BPSDM Provinsi DKI Jakarta selalu terkait dengan instansi pembina diklat, yaitu Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Hubungan yang cukup relevan bagi pembuatan Renstra ini juga mengacu pada Renstra Lembaga Administrasi Negara RI (LAN RI) yang menetapkan visi: **“Sebagai Institusi Pembelajar Berkelas Dunia yang Mampu menjadi Penggerak Utama dalam mewujudkan World Class Government Untuk Mendukung Visi Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”**, yang diwujudkan melalui pelaksanaan misi, yaitu: (1) Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional; (2) Mewujudkan Kebijakan Administrasi Negara yang berkualitas melalui kajian kebijakan berbasis evidence dan penyediaan analisis kebijakan yang kompeten; (3) Mewujudkan Inovasi Administrasi Negara yang berkualitas melalui pengembangan model inovasi serta penguatan kapasitas dan budaya inovasi; dan (4) Memujudkan organisasi pembelajar berkinerja tinggi melalui dukungan pelayanan yang berkualitas dan berbasis elektronik.

Guna lebih mengoperasionalkan Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta maka perumusan Tujuan dan Sasaran juga mengacu kepada misi pertama LAN RI, yaitu Mewujudkan SDM Aparatur unggul melalui kebijakan, pembinaan, dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi yang berstandar internasional.

Tujuan yang akan dicapai oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam rangka pencapaian Tujuan Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

a. Tujuan

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tujuan pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management.

b. Sasaran

Untuk memastikan pencapaian tujuan yang diharapkan, maka sasaran jangka menengah BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut: Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat.

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2
Tujuan dan Sasaran Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke -			
				2023	2024	2025	2026
1.	pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan <i>knowledge management</i>	Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat	Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	31	31	31	31
			Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas ASN	38,7	38,8	38,9	39

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026

Setiap sasaran memiliki indikator kinerja dan targetnya masing-masing. Penjabaran lengkap mengenai sasaran dan indikator kinerja akan tersaji pada Bab III Laporan ini.

B. Rencana Strategis

Sebagai Pemerintah Daerah yang berakhir periode perencanaan jangka menengah pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 yang juga merupakan tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 ini merupakan dokumen perencanaan jangka menengah transisi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dimana menjadi pedoman strategis bagi pembangunan selama jangka waktu 2023 sampai dengan 2026 sampai ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah oleh Gubernur dan Wakil Gubernur hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak pada tahun 2024.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023- 2026. Dokumen Renstra merupakan penjabaran dari rencana pencapaian tujuan dan sasaran RPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah pelaksana Pembangunan.

Pada periode pembangunan jangka menengah sebelumnya, perumusan tujuan dan sasaran mengacu langsung kepada visi dan misi Kepala Daerah terpilih, namun pada periode ini sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 menggunakan pendekatan yang berbeda karena tidak tersedianya visi dan misi Kepala Daerah. Dalam rangka menjaga keselarasan dengan dokumen perencanaan yang masih berlaku dan menjaga kesinambungan pembangunan antar periode, maka Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merumuskan sebuah konsep RPD 2023-2026 yang mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. 6 Misi RPJPD Provinsi DKI Jakarta 2005-2025;
2. 7 Agenda Pembangunan RPJMN 2020-2024;
3. 5 Misi RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2017-2022;
4. 6 Isu-isu strategis 2023-2026.

Dari hasil penyandingan muatan konsideran tersebut teridentifikasi empat dimensi yang menjadi kesamaan dan dapat dijadikan fokus dari perencanaan periode selanjutnya. Keempat dimensi tersebut

yaitu; dimensi lingkungan bangun (*built environment*), dimensi perekonomian (*economic*), dimensi manusia (*human*), dan dimensi pemerintahan (*governance*).

Sebagai perangkat daerah pada pemerintahan daerah yang berada di wilayah administrasi dimana pusat pemerintahan pusat berada maka dinamika dan kebutuhan atas pengembangan kompetensi SDM pemerintahannya sangat kompleks, di atas rata-rata pegawai pemerintahan daerah lainnya. Dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan kondisi warga yang sangat *well-informed* maka keunggulan layanan dan integritas birokrasi menjadi kata kunci yang tak dapat ditawar, hal tersebut selaras dengan Tujuan dan Sasaran RPD.

Sebagai kesinambungan dari berbagai upaya atau transformasi yang telah dilakukan di masa-masa lalu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus berkomitmen untuk membenahi dan meningkatkan kualitas berbagai jenis layanannya melalui Kebijakan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, yaitu “Meningkatkan pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta, dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kualitas pemerintahan, sehingga mewujudkan organisasi pemerintah yang kokoh, maju dan modern dalam melayani masyarakat dan mampu berdaya saing dengan kota besar dunia.”

Kebijakan tersebut akan diwujudkan melalui serangkaian Isu Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026, sebagai berikut:

1. Strategi pengembangan pembelajaran melalui *Jakarta Corporate University* (JakCorpu);
2. *Learning Management System* melalui *Mobile Learning*;
3. Kerjasama sektor publik dan *privat* dalam bentuk pengembangan kompetensi melalui *Jakarta Public Policy Center* (JPPC);
4. Pengembangan kompetensi SDM pendukung program prioritas Pejabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
5. Sertifikasi Pegawai dalam rangka mewujudkan pegawai yang memiliki integritas, kompetensi dan profesionalisme yang tinggi dalam memberikan pelayanan prima bagi Masyarakat;
6. Pelestarian asset berupa pengetahuan, ketrampilan, dan pengalaman operasional dan manajerial melalui pelaksanaan program manajemen pengetahuan (*knowledge management*).

Berpijak pada tujuan dan sasaran tersebut serta dilandasi nilai-nilai budaya kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yaitu: profesional, integritas, komitmen, inovatif, dan kerjasama, BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus bertransformasi untuk menjadi lembaga pengembangan kompetensi yang bertaraf internasional dengan terus melakukan reformasi di segala aspek layanan dan peningkatan kapasitas kelembagaan guna meningkatkan keunggulan kompetitifnya.

C. Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah

Pada tanggal 24 Mei 2023 telah dilakukan penandatanganan Perjanjian Kinerja antara Gubernur DKI Jakarta dengan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta, yang isinya antara lain:



Tabel 3.
Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023

Nama : Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP : 197812131997111001
Jabatan : Kepala Badan
Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
1	Pengembangan Kompetensi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan Knowledge Management	1	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	e-SAKIP	<p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none">Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN;Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah. <p>DEFINISI:</p> <p>Indeks sistem merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDM adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit Pemprov DKI Jakarta pada aspek Pengadaan (Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS) dan Aspek Pengembangan Karir (Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dan Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai).</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p> <p>(Metode Konsolidasi Lokasi) Penilaian mandiri sistem merit</p>	31	Indeks

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
2	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	1	Nilai Dimensi Pengan- gan Kompetensi pada Indeks Profesionalit as ASN	e-SAKIP	<p>terdapat 8 Aspek dengan total 37 Sub Aspek, BPSDM mengampu 2 Aspek dan didalamnya terdapat 4 Sub Aspek dengan pembobotan sebagai berikut:</p> <p>1. Pengadaan (Bobot 8), yang merupakan 1 Sub Aspek dari 5 sub aspek, yaitu Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;</p> <p>2. Pengembangan karir (Bobot 30), yang merupakan 3 Sub Aspek dari 10 Sub Aspek, yaitu: Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dan Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai. Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit: (1) Kategori IV, nilai 30.87 - 38, sebutan Sangat Baik (2) Kategori III, nilai 23.75 - 30.86, sebutan Baik (3) Kategori II, nilai 16.62 - 23.74, sebutan Kurang (4) Kategori I, nilai 9.5 - 16.61, sebutan Buruk</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Evaluasi Mandiri</p> <p>DASAR HUKUM: 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>DEFINISI: Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang</p>	38.7	Nilai

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN Dimensi kompetensi (40%). METODE PENGUKURAN: Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN) SUMBER DATA: SIMPEG dan SAPK	100	Persen
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanganan Kemiskinan	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
	Perlindungan Sosial		Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas				
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	100	Persen
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	1	Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keandalan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pengungkapan (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TMP=0(25%))	(3) WTP	Predkat
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	FORMULA PENGUKURAN: Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100	Persen
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat	e-Kinerja	a) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah. b) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. c) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam. d) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang. PENGHITUNGAN: a) Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	daerah pada saat krisis komunikasi program. Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	<p>b) Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam. </p> <p>d) Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	A (82)	Predikat
11	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	e-Kinerja	<p>DEFINISI: Terselesainya Pembuatan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK).</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengolahan Arsip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II. ➤ Realisasi Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon III/Setara. ➤ Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip di lingkungannya. ➤ Unit Pengolah: <u>Biro/Bagian/Bidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh UPT)</u> 	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
12	Terwujudnya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan	e-Kinerja	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan. ➤ Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut: Inspektur, Badan, Dinas, Satuan Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum <p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permenpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis <p>PENGUKURAN:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100% ➤ Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta. <p>DEFINISI: Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah disepakati dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data dikumpulkan oleh Produsen data kepada Walidata sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>DASAR HUKUM: Keputusan Gubernur Nomor 186 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p>	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
			Keputusan Gubernur		<p>FORMULA PENGUKURAN: [(Jumlah data terkumpul ke walidata) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut)] x 100%</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>SUMBER DATA: Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>		
13	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	e-Kinerja	<p>DEFINISI: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PD/UKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali. BMD yang selesai diinventarisasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>PENGHITUNGAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan 10% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun SK Tim /Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% <ol style="list-style-type: none"> Bobot 75%: PD/UKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% <ol style="list-style-type: none"> a. Bobot 5%: PD/UKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) 	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
14	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>b. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI)</p> <p>c. Bobot 5%: PD/UKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p> <p>DEFINISI:</p> <p>1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rancang bangun dan perakayaan yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan pernyataan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare)</p> <p>2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>FORMULA PENGUKURAN:</p> <p>Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah).</p> <p>SUMBER DATA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD <p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam 	80	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
15	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	1	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 203 Ayat (4) Pengembangan kompetensi bagi setiap PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun.</p> <p>DEFINISI: Tersebaiknya Penuhan pengembangan kompetensi 20 JP pertahun untuk seluruh PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Simdiklat BPSDM.Jakarta.go.id</p> <p>Realisasi Target berupa Laporan Daftar PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengikuti Pengembangan Kompetensi dari Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>FORMULA PENGUKURAN: [(Jumlah data yang terkumpul ke walidata Simdiklat) / (Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan Desember Triwulan 4)] x 100%</p> <p>SUMBER DATA: Simdiklat BPSDM</p>	100	Persen
16	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	1	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	e-Kinerja	<p>DASAR HUKUM: Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan</p> <p>DEFINISI: Tersebaiknya Penyelesaian Tahapan Manajemen Pengetahuan Untuk Seluruh SKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui https://km-bpsdm.jakarta.go.id</p> <p>METODE PENGUKURAN:</p>	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
17	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	<p>Realisasi target berupa 4 laporan baik berbentuk video maupun tulisan (wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Minggu pertama tanggal 5 Bulan September Triwulan 3 dan Minggu pertama tanggal 5 Bulan November Triwulan 4</p> <p>SUMBER DATA: https://km-bpsdcm.jakarta.go.id</p> <p>DASAR HUKUM:</p> <ol style="list-style-type: none"> Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta <p>DEFINISI OPERASIONAL: Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Kepatuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (Si-Perisai).</p> <ol style="list-style-type: none"> Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> Pemilik Risiko; Koordinator Risiko; dan Manajer Risiko. Unit Kepatuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan 	100	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
					<p>Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Komunikasi dan <u>konsultasi</u>; Penetapan <u>konteks</u>; Penilaian Risiko (Identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); Penanganan Risiko; dan Pemantauan. <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>FORMULA PENGUKURAN: [(Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektorat) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)] x 100%</p> <p>OUTPUT SASARAN:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen <u>Risiko</u>; Dokumen Formulir profil dan peta Risiko. Dokumen Formulir penanganan Risiko. <p>METODE PENGUKURAN: Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektorat: Triwulan II:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal 		

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
18	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	1	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	e-Kinerja	<p>Triwulan III:</p> <ol style="list-style-type: none"> Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; Dokumen Formulir profil dan peta Risiko <p>Triwulan IV: Dokumen Formulir penanganan Risiko</p> <p>SUMBER DATA: Hasil Verifikasi Inspektorat</p> <p>DASAR HUKUM: Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 195: "Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada masyarakat diantaranya digunakan untuk membantu Gubernur dalam melakukan evaluasi Kinerja Keuangan Daerah."</p> <p>DEFINISI OPERASIONAL: Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi.</p> <ol style="list-style-type: none"> Kinerja Anggaran adalah capaian Kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan/Subkegiatan dan pencapaian keluarannya yang diukur dalam 1 (satu) Tahun Anggaran. <p>Kinerja Anggaran yang dihitung atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pengukuran Capaian Keluaran kegiatan /subkegiatan: <ul style="list-style-type: none"> - diukur dengan membandingkan antara <u>realisasi</u> indikator Keluaran (Output) Kegiatan dengan target 	71	Persen

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
					<p>indikator Keluaran (Output) Kegiatan. Sumber Data: e- SAKIP</p> <p>2. Penyerapan Anggaran: - diukur dengan membandingkan antara realisasi anggaran dengan pagu anggaran. Sumber Data: Proyeksi APBD/proyeksiapbd.jakarta.go.id</p> <p>3. Efisiensi keluaran kegiatan/subkegiatan: - dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dengan pengeluaran sebenarnya. - Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan</p> <p>- Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian Keluaran (Output) Program atau capaian Keluaran (Output) Kegiatan.</p> <p>Sumber Data: a. data capaian Keluaran (<u>Output</u>) Kegiatan/Subkegiatan sumber data e-sakip; b. pagu anggaran data sumber data proyeksi APBD; dan c. realisasi anggaran sumber data proyeksi APBD.</p> <p>4. Konsistensi Penyerapan Anggaran terhadap Perencanaan: - dilakukan dengan memperhitungkan deviasi antara realisasi anggaran dengan rencana penarikan dana setiap bulan.</p> <p>SUMBER DATA: proyeksi APBD</p> <p>Bobot masing-masing variabel Aspek Implementasi sebagai berikut: Bp = 9,7%</p>		

No	Sasaran	No	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja	Tahunan	Ket
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	1	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	e-Kinerja	<p>BK = 18,2% Bckk = 43,5% BE = 28,6% Bp: Bobot penyerapan anggaran BK: Bobot konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan Bckk: Bobot capaian keluaran BE: Bobot efisiensi Pembobotan Nilai Kinerja atas Aspek Implementasi yang dihasilkan : ≤ 60 = Rendah</p> <p>Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%</p>	100	Persen
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	1	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100	Persen
21	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	1	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	(90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat)	100	Persen

D. Program dan Anggaran

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Pprovinsi DKI Jakarta dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian anggaran pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta, terdapat dibawah ini:

Tabel 4.
Anggaran Belanja Tahun 2023

No	Program	APBD	APBD Perubahan
1.	Program Kepegawaian Daerah	18.687.949.398	17.660.314.630
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	64.180.768.549	40.623.302.320
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	68.784.170.202	64.973.174.135
Jumlah		151.652.888.149	123.256.791.085

Sumber: Renstra BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023-2026



Jakarta
Public Policy
Center



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja bukan sekadar sebatas catatan, melainkan cerminan sejauh mana setiap langkah yang diambil oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah digariskan dalam perencanaan strategis. Pengukuran kinerja menjadi pilar utama dalam memetakan kesuksesan atau kegagalan setiap kegiatan, mengacu pada program dan kebijakan yang dirancang untuk meraih tujuan dan sasaran organisasi.

Bagi BPSDM Provinsi DKI Jakarta, pengukuran kinerja bukanlah sekadar rutinitas, melainkan suatu perjalanan sistematis dan berkesinambungan. Inilah panggung evaluasi yang membuka tirai atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sepanjang tahun 2023. Indikator kinerja bukan hanya sekadar angka, melainkan representasi konkret dari pencapaian secara menyeluruh oleh BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Pencapaian kinerja menjadi tolok ukur, sekaligus refleksi kontribusi dari setiap bagian BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Melalui langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan sepanjang tahun lalu, setiap jajaran BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah turut berperan aktif dalam membentuk keseimbangan kinerja yang menjadi sorotan.

Walau perjalanan tahun 2023 diwarnai oleh berbagai keberhasilan, kita tidak dapat menutup mata terhadap kenyataan bahwa beberapa target masih berada di luar jangkauan. Namun, di balik setiap kegagalan, terdapat semangat untuk lebih baik, untuk mengevaluasi dan memperbaiki langkah-langkah ke depannya.

Pada akhirnya, rincian tingkat capaian kinerja dari masing-masing indikator bukan hanya lembaran angka, melainkan cerita yang hidup. Cerita tentang perjuangan, keberhasilan, dan kesungguhan dari seluruh tim BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam merintis perjalanan yang tidak hanya mengukur kemajuan, tetapi juga memberi arah untuk masa depan yang lebih gemilang.

Tabel 5.
Pelatihan yang Dilakukan BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023

Rumpun Pelatihan	No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
Jabatan Fungsional	1	Diklat Fungsional Pengelola Arsip Dinamis	60
	2	Diklat Fasilitator Kearsipan	62
	3	Diklat Perencana	4
	4	Diklat Penilai Barang Milik Daerah (Appraisal) Dasar	46
	5	Diklat Penilai Barang Milik Daerah (Appraisal) Lanjutan	20
	6	Diklat Instruktur	15
	7	Diklat Fungsional Per UU	17
	8	Diklat Pengadaan Barang dan Jasa Tingkat Madya	1
	9	Bimtek Jafung Penata Ruang	26
	10	Diklat Adpenda	25
	11	Diklat Pemeriksa Pajak	25
	12	Diklat Penilai Masal	30
	13	Diklat Penjenjangan Pol PP	30
Teknis Fungsional	14	Diklat Dasar Pol PP bagi Staf	601
	15	Diklat Kepala Sekolah	606
	16	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	39
	17	Diklat Bendahara Pengeluaran	158
	18	Diklat Bendahara Penerimaan	92
	19	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa	323
	20	Diklat Pengelolaan Barang Daerah	153
Dasar dan Manajerial	21	Pengembangan Kompetensi Widyaiswara	42
	22	Pelatihan Dasar CPNS Golongan I, II dan III	423
	23	Pelatihan Dasar PPPK	9.549
	24	Diklat Kepemimpinan TK. II	-
	25	Diklat Kepemimpinan TK. III	94
Pemerintahan dan Teknis Umum	26	Diklat Kepemimpinan TK. IV	313
	27	Diklat OSS RBA Online Single Submission Risk Based Approach	157
	28	Diklat Manajemen BLUD Corpu BLUD Pendidikan	30
	29	Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana	123
	30	Diklat Komunikasi Publik	150
Pemerintahan dan dan	31	Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum Bagi Panitia Pengadaan Barang dan Jasa	31
	32	Manajemen Pengelolaan Gedung Rusun Corpu	121
	33	Diklat Teknis Pelayanan Terpadu Penyandang Disabilitas	130

Rumpun Pelatihan	No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
	34	Diklat Penyusunan Peraturan Gubernur	60
	35	Diklat Manajemen Kinerja	127
	36	Diklat Coaching & Mentoring	69
	37	Diklat Pengelolaan Gedung Pemerintah	86
	38	Diklat Manajemen BLUD Kesehatan	182
	39	Diklat Komputer	38
	40	Diklat Manajemen Reses	31
Sosial Kultural	41	Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrua	90
	42	Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan	34
	43	Diklat Pengendalian Sistem Intern Pemerintah (SPIP)	120
	44	Diklat Manajemen Perencanaan Pembangunan Daerah (MPPD)	126
	45	Diklat Manajemen Strategik	60
	46	Diklat Manajemen Proyek Corpu	30
	47	Bimtek Pengelolaan Aset	68
	49	Diklat Bahasa Inggris For Correspondence	30
	50	Diklat Bahasa Inggris For Tourism	30
	51	Diklat Bahasa Inggris For Legal Drafting	30
	52	Diklat Bahasa Jepang Dasar	30
	53	Diklat Bahasa Mandarin	73
	53	Diklat Bahasa Prancis Dasar	30
	54	Diklat Pembangunan Berkelanjutan	95
	55	Diklat Stress Management	167
	56	Kerjasama Internasional	32
	57	Diklat Bekerja Penuh Makna	186
Workshop & Public Training	58	Public Training	74
	59	Workshop Build Communication Skills For Professional Success	45
	60	Workshop Tata Laksana Stunting Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dki Jakarta	48
	61	Workshop Implementasi Budaya Kerja Asn Berakhlak	50
	62	Manajemen Terminal Penumpang	20
	63	Workshop Event Management	40
Workshop & Public	64	Pelatihan Hospitality And Customer Experience	40
	65	Pelatihan Penerapan Psikologi Perkembangan Anak Sekolah Dasar	45

Rumpun Pelatihan	No	Nama Pelatihan	Jumlah Peserta
	66	Diklat Penyusunan Standar Harga Satuan Dan Analisis Standar Belanja	13
	67	Pelatihan Teknis Kesamaptaan Bagi Alumni Pelatihandasar Cpns Ta 2022-2023	80
	68	Pelatihan Dan Sertifikasi Remote Pilot	11
	69	Pendidikan Dan Pelatihan Legal Opinion	4
	70	System Thinking And Decision Making	15
Sertifikasi Profesi	71	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	811
Non Diklat	72	Penyusunan Skema Dalam Rangka Sertifikasi	1
	73	Konsultasi pengembangan kompetensi	1
	74	Pengiriman Tugas Belajar	108
	75	Seleksi Pegawai Tugas Belajar	184
	76	Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan	10
	77	Akreditasi Kediklatan	1
	78	Sistem Manajemen Penjaminan Mutu	1
	79	Knowledge Management	1
	80	Pengelolaan Sistem Informasi	12
	81	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan LCM, AKK	2
	82	Penyusunan Kurikulum	12
	83	Penyusunan Modul	48
	84	Penyusunan Evaluasi Pasca Pelatihan	20
	85	Pendampingan Pembelajaran Berbasis Corpu	1

B. Capaian Strategis Kinerja

BPSDM Provinsi DKI Jakarta mewujudkan transparansi dan keandalan dalam mengevaluasi capaian kinerja dengan merangkul data dari beragam sumber yang dapat dipercaya. Setiap detail dianalisis dengan cermat, termasuk data dari Indeks Profesionalisme ASN yang dikumpulkan melalui instrumen yang telah melewati validasi yang dari Badan Kepegawaian Nasional.

Proses pengumpulan data bukanlah sekadar rutinitas, melainkan pencarian kebenaran yang memerlukan ketelitian dan validitas. Instrumen yang digunakan, termasuk menggunakan alat teknologi, tidak hanya menjadi alat pengukur kuantitatif, melainkan representasi kualitatif dari pandangan ASN. Ini adalah langkah nyata dalam menjalin hubungan yang kuat dan saling percaya antara BPSDM dan ASN.

Setiap hasil analisis capaian kinerja tidak hanya dipandang sebagai catatan, tetapi sebagai pandangan mendalam yang menyusup ke setiap kriteria penilaian. Proses ini memastikan bahwa setiap elemen penilaian bersinergi dan saling mendukung, menciptakan fondasi yang kokoh untuk evaluasi

menyeluruh. Kami tidak hanya menganalisis pencapaian kinerja, tetapi juga memahami akar masalah yang mungkin muncul pada setiap kriteria.

Dalam upaya memastikan konsistensi, hasil analisis tidak hanya diterima begitu saja. Kami melakukan pengecekan ulang terhadap setiap kriteria dan mengkrosceknya dengan hasil analisis keseluruhan. Keselarasan antara setiap kriteria penilaian dan hasil analisis menjadi kunci dalam memastikan integritas dan keandalan evaluasi capaian kinerja BPSDM.

Analisis capaian kinerja di BPSDM bukan hanya sekadar melihat permukaan, melainkan mengeksplorasi ke dalam setiap sudut dan celah untuk mengidentifikasi akar masalah. Ini adalah langkah kritis dalam merinci langkah-langkah perbaikan dan memastikan BPSDM terus berkembang sebagai lembaga yang responsif dan progresif.

Adapun hasil analisis capaian kinerja yang dilakukan sebagai berikut:

1. Capaian Target dan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis pada Perkin Tahun 2023 terdiri atas Indikator Tujuan dan Sasaran serta Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang telah disepakati oleh para Kepala Perangkat Daerah, berikut realisasi capaian Sasaran Strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, sebagaimana dijabarkan capaian realisasi kinerja sebagai berikut:

a. Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi (target 38,7 dan realisasinya belum dirilis oleh BKN untuk Tahun 2023)

Indikator ini merupakan tujuan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.

Indikator Indeks Profesionalitas diartikan sebagai suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN Dimensi kompetensi (40%).

Target, Pelaksana, Dan Prinsip Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Target Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN yaitu seluruh Pegawai ASN yang bekerja di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
- 2) Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan di seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan oleh unit kerja yang bertanggung jawab dalam pengelolaan Pegawai ASN pada masing-masing instansi;
- 3) Kebijakan umum dalam Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi, sedangkan tata cara dan pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN dilaksanakan oleh BKN.

Metode pengukuran menggunakan dengan cara jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (mempedomani Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN).

Standar Dan Dimensi Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN sebagai berikut:

a) Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui:

1) Dimensi Kualifikasi

- (1) Dimensi Kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah;
- (2) Dimensi Kualifikasi diperhitungkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari keseluruhan Pengukuran;

- (3) Indikator yang digunakan adalah jenjang pendidikan formal terakhir yang dicapai oleh PNS, meliputi:
- 1) Pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - 2) Pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - 3) Pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - 4) Pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - 5) Pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/ sederajat; dan
 - 6) Di bawah SLTA.
- (4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kualifikasi bobot penilaiannya sebagai berikut:
- a. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-3 (Strata Tiga);
 - b. Bobot nilai sebesar 20 (dua puluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-2 (Strata Dua);
 - c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan S-1 (Strata Satu)/D-IV (Diploma Empat);
 - d. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-III (Diploma Tiga);
 - e. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan D-II (Diploma Dua)/D-I (Diploma Satu)/ Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA)/sederajat; dan
 - f. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memperoleh/memiliki pendidikan di bawah SLTA.

2) Dimensi Kompetensi

- 1) Dimensi Kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan;
- 2) Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran;
- 3) Indikator yang digunakan yaitu riwayat pengembangan kompetensi yang terdiri atas:
 - a. Diklat Kepemimpinan;
 - b. Diklat Fungsional;
 - c. Diklat Teknis; dan
 - d. Seminar/Workshop/Magang/Kursus/sejenisnya.
- 4) Instrumen Pengukuran pada diklat kepemimpinan bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
 - b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, dan jabatan pengawas yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sesuai dengan jabatan www.peraturan.go.id 2019, No. 556 -9- yang diduduki.
- 5) Instrumen Pengukuran pada diklat fungsional bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki; dan
 - b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dan belum mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional sesuai dengan jabatan yang diduduki.
- 6) Instrumen Pengukuran pada diklat teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP dengan bobot penilaian sebagai berikut:

- a. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
 - b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas dan fungsi jabatannya;
 - c. Bobot nilai sebesar 22,5 (dua puluh dua koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis paling sedikit 20 (dua puluh) JP yang mendukung tugas jabatannya dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- 7) Instrumen Pengukuran pada seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. Bobot nilai sebesar 10 (sepuluh) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan fungsional yang telah mengikuti seminar/workshop/ kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan fungsional yang belum mengikuti seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - c. Bobot nilai sebesar 17,5 (tujuh belas koma lima) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang telah mengikuti seminar/workshop/kursus/magang/ sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
 - d. Bobot nilai sebesar 0 (nol) bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana yang belum mengikuti seminar/ workshop/kursus/magang/sejenisnya sesuai jabatannya dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- 8) Keikutsertaan dalam seminar/workshop/kursus/ magang/sejenisnya tersebut dibuktikan dengan sertifikat/surat tugas dan sejenisnya.

3) Dimensi Kinerja

- 1) Dimensi Kinerja digunakan untuk mengukur data/ informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
- 2) Dimensi Kinerja diperhitungkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- 3) Indikator yang digunakan adalah riwayat hasil penilaian kinerja yang mencakup sebagai berikut:
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku Kerja Pegawai (PKP).
- 4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 30 (tiga puluh) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) dengan kriteria sangat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - b. Bobot nilai sebesar 25 (dua puluh lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 76 (tu-

- juh puluh enam) sampai dengan 90 (sembilan puluh) dengan kriteria baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. Bobot nilai sebesar 15 (lima belas) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 61 (enam puluh satu) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) dengan kriteria cukup dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - d. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja antara 51 (lima puluh satu) sampai dengan 60 (enam puluh) dengan kriteria sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - e. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki nilai kinerja 50 (lima puluh) ke bawah dengan kriteria kurang dalam 1 (satu) tahun terakhir.

4) Dimensi Disiplin

- 1) Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS.
- 2) Dimensi Disiplin diperhitungkan sebesar 5% (lima persen) dari keseluruhan Pengukuran.
- 3) Indikator yang digunakan yaitu data/informasi mengenai hukuman disiplin yang pernah diterima yang mencakup:
 - a. Hukuman disiplin ringan;
 - b. Hukuman disiplin sedang; dan
 - c. Hukuman disiplin berat.
- 4) Instrumen Pengukuran pada dimensi kinerja bobot penilaiannya sebagai berikut:
 - a. Bobot nilai sebesar 5 (lima) bagi PNS yang memiliki riwayat tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin;
 - b. Bobot nilai sebesar 3 (tiga) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
 - c. Bobot nilai sebesar 2 (dua) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang; dan
 - d. Bobot nilai sebesar 1 (satu) bagi PNS yang memiliki riwayat dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat.
- 5) Hukuman disiplin yang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu yang telah mempunyai keputusan final dan dihitung dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir.

RUMUS PENGUKURAN INDEKS PROFESIONALITAS ASN

Rumus Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN merupakan jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator.

Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN menggunakan rumus sebagai berikut:

$$IP = \sum_{i=1}^4 IP_i$$

$$= IP_1 + IP_2 + IP_3 + IP_4$$

$$IP_1 = W_{1j} * R_{1j}$$

$$IP_1 = W_{2k} * R_{2k}$$

$$IP_1 = W_{3l} * R_{3l}$$

$$IP_1 = W_{4m} * R_{4m}$$

Keterangan:

IP = Indeks Profesionalisme

IP_i = Indeks Profesionalisme ke-i

IP₁ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi

IP₂ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi

IP₃ = Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja

IP₄ = Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin

W_{1j} * R_{1j} = Bobot Indikator Kualifikasi ke-j * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-j

W_{2k} * R_{2k} = Bobot indikator Kualifikasi ke-k * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-k

W_{3l} * R_{3l} = Bobot indikator Kualifikasi ke-l * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-l

W_{4m} * R_{4m} = Bobot indikator Kualifikasi ke-m * Rating Jawaban indikator Kualifikasi ke-m

Sumber: Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN

Kesimpulan Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023

1. Indeks Profesionalisme Dimensi Kualifikasi tergolong Sangat Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 91– 100;
2. Indeks Profesionalisme Dimensi Kompetensi tergolong Tinggi yang memiliki rentang nilai antara 81– 90;
3. Indeks Profesionalisme Dimensi Kinerja tergolong Sedang yang memiliki rentang nilai antara 71– 80;
4. Indeks Profesionalisme Dimensi Disiplin tergolong Rendah yang memiliki rentang nilai antara 61– 70;

Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud diatas (1) mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN. yang bersumber dari SIMPEG dan SAPK.

Target pada tahun 2022 tercapai sebesar 38,16 (Penilaian IP ASN Tahun 2022 sesuai dengan Surat Direktur Jabatan ASN BKN RI Nomor 221.D/BM.02/SD/C.II/2023 tertanggal 10 Oktober 2023 perihal hasil pengukuran IP ASN di wilayah kantor regional BKN). Dengan rincian hasil Nilai Profesionalitas ASN sebagai berikut:

Tabel 6.
Dimensi Nilai Profesionalitas ASN Tahun 2022

No	Dimensi	Bobot Nilai	Kategori
1.	Kualifikasi	21,38	Tinggi
2.	Kompetensi	38,16	
3.	Kinerja	23,87	
4.	Disiplin	4,99	
Rata-Rata Nilai		88,4	

BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengampu pada dimensi kompetensi dengan **target 36**, dan **realisasi capaian sebesar 38,16** atau sebesar **106%**, sebagaimana telah diuraikan pada point 2 di atas yaitu tentang Dimensi Kompetensi. Untuk perhitungan IP ASN Tahun 2023, berdasarkan Surat kepala BKD Provinsi DKI Jakarta Nomor: e-0078/RB.02.07 tertanggal 4 Januari 2024, tentang Laporan Perhitungan Capaian Indeks Profesionalitas ASN Tahun 2023, **masih menunggu jawaban** dari BKN Republik Indonesia.

2) Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM (target 31 dan realisasi 38,7);

Indikator ini merupakan tujuan yang kedua dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, yang mempunyai dasar hukum yaitu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN dan Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Definisi dari Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDM adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada aspek Pengadaan (Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan bobot 2) dan Aspek Pengembangan Karir (Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN dengan bobot 2,5 dan Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan dengan bobot 2,5 serta Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai dengan bobot 2,5).

Cara atau metode pengukuran menggunakan (Metode Konsolidasi Lokasi) Penilaian mandiri sistem merit terdapat 8 Aspek dengan total 37 Sub Aspek, BPSDM mengampu 2 Aspek dan didalamnya terdapat 4 Sub Aspek dengan pembobotan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan (Bobot 8), yang merupakan 1 Sub Aspek dari 5 sub aspek, yaitu Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS, dengan masing-masing mempunyai:
 - Kategori Skor 1 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar lebih dari setahun setelah pengangkatan CALON PNS;
 - Kategori Skor 2 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 6-12 bulan setelah pengangkatan CALON PNS;
 - Kategori Skor 3 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan 1-5 bulan setelah pengangkatan CALON PNS;
 - Kategori Skor 4 adalah Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/Pelatihan Dasar dilakukan langsung (paling lama 1 bulan) setelah pengangkatan CALON PNS.
- 2) Pengembangan karir (Bobot 30), yang merupakan 3 Sub Aspek dari 10 Sub Aspek, yaitu:
 - a. Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, dengan masing-masing mempunyai:
 - Kategori Skor 1 adalah belum menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan;

- Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran;
 - Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek (untuk tahun berjalan);
 - Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan namun belum terinci dalam kegiatan serta penganggaran untuk jangka pendek dan jangka menengah dan ditetapkan oleh PPK;
- b. Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dengan masing-masing mempunyai:
- Kategori Skor 1 adalah belum menyusun Program Diklat;
 - Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis Kebutuhan Diklat;
 - Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja, namun masih bersifat umum;
 - Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun Program Diklat berdasarkan Analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja, sesuai kebutuhan individu;
- c. Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai, dengan masing-masing mempunyai:
- Kategori Skor 1 adalah belum menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;
 - Kategori Skor 2 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai namun belum melaksanakannya;
 - Kategori Skor 3 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai namun belum dilaksanakan secara terjadwal;
 - Kategori Skor 4 adalah sudah menyusun program pengembangan karier melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai dan sudah melaksanakannya secara terjadwal;
- 3) Kategori Tingkat Penerapan Sistem Merit:
- (1) Kategori IV, nilai 30.87 - 38, sebutan Sangat Baik;
 - (2) Kategori III, nilai 23.75 - 30.86, sebutan Baik;
 - (3) Kategori II, nilai 16.62 - 23.74, sebutan Kurang;
 - (4) Kategori I, nilai 9.5 - 16.61, sebutan Buruk.

Berdasarkan rekomendasi Komisi ASN tentang penyelesaian tindaklanjut atas penilaian Sistem Merit BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel 7.
Penilaian Sistem Merit BPSDM Provinsi DKI Jakarta

No	Aspek Penilaian	Rekomendasi KASN	Kriteria Keberhasilan	Link Data Pendukung
1.a	Pengembangan Karir	Meningkatkan jumlah pegawai yang mengikuti program pengembangan kompetensi setiap tahunnya baik secara klasikal dan non klasikal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan program pengembangan kompetensi baik secara klasikal dan non klasikal yang sekurang-kurangnya memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> a. Perbandingan jumlah pegawai Pemprov. DKI Jakarta yang mengikuti program pengembangan kompetensi tahun <u>2022-2023</u>; b. Jenis/daftar program pengembangan kompetensi baik secara klasikal dan non klasikal yang dilakukan tahun 2023. 	https://bit.ly/Meningkatkanjumlahpegawaiyangmengikutiiprogrampengembangankompetensietiaptahunnyabaiksecaraklasikaldannonklasikal

No	Aspek Penilaian	Rekomendasi KASN	Kriteria Keberhasilan	Link Data Pendukung
			2. Tersedianya infografis pelaksanaan program pengembangan kompetensi baik secara klasikal dan non klasikal yang sekurang-kurangnya memuat informasi: <ol style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah pegawai Pemprov. DKI Jakarta yang mengikuti program pengembangan kompetensi tahun <u>2022-2023</u>; Jenis/daftar program pengembangan kompetensi baik secara klasikal dan non klasikal yang dilakukan tahun 2023. 	https://bit.ly/Tersedianyainfografispelaksanaanprogrampengembangankompetensibaiksecaraklasikaldannonklasikal
1.b		Meningkatkan konsistensi pengiriman pegawai untuk mengikuti diklat kepemimpinan	1. Tersedianya laporan hasil pelaksanaan diklat kepemimpinan yang sekurang-kurangnya memuat informasi terkait perbandingan jumlah pegawai Pemprov. DKI Jakarta yang mengikuti diklat kepemimpinan tahun 2022-2023;	https://bit.ly/Meningkatkanjumlahpegawaiyangmengikutiiprogrampengembangankompetensietiaptahunnyabaiksecaraklasikaldannonklasikal
			2. Tersedianya infografis pelaksanaan diklat kepemimpinan yang sekurang-kurangnya memuat informasi terkait perbandingan jumlah pegawai Pemprov. DKI Jakarta yang mengikuti diklat kepemimpinan tahun 2022-2023;	https://bit.ly/Tersedianyainfografispelaksanaanprogrampengembangankompetensibaiksecaraklasikaldannonklasikal
1.c		Melaksanakan program magang secara rutin dan melakukan evaluasi dampak pelaksanaan program magang terhadap pengembangan kompetensi pegawai	1. Tersusunnya laporan hasil pelaksanaan program magang yang sekurang-kurangnya memuat informasi terkait: <ol style="list-style-type: none"> jenis program magang yang dilaksanakan tahun <u>2023</u>; jumlah peserta/pegawai yang dikirim untuk mengikuti program <u>magang</u>; Dokumentasi pelaksanaan program magang. 	https://bit.ly/Tersusunnyalaporanhasilpelaksanaanprogrammagang
			2. Tersusunnya laporan evaluasi dampak pelaksanaan program magang terhadap pengembangan kompetensi pegawai.	https://bit.ly/Tersusunnyalaporanevaluasidampakpelaksanaanprogrammagangterhadappengembangankompetensipegawai

Berdasarkan penilaian mandiri terhadap Sistem Merit yang dilakukan oleh BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk Tahun 2023, sebagaimana daftar terlampir dibawah ini:

BERITA ACARA HASIL PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT TAHUN 2023

Instansi : Provinsi DKI Jakarta
 Tanggal Penilaian : 11 Desember 2023
 Daftar Tim Penilai

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	NO HANDPHONE 4	TANDA TANGAN 5
1	Maria Qibtya	Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	08121068795	
2	Mochamad Miftahulloh	Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi DKI Jakarta	08121131312	
3	M. Arif Amin	Sekretaris Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia Provinsi DKI Jakarta	08128133691	
4	Indra Saputra	Plt. Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	081289406086	
5	Mardi Dwi Lestari	Kepala Bidang Kinerja dan Penghargaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	081319487766	

NO 1	NAMA 2	JABATAN 3	NO HANDPHONE 4	TANDA TANGAN 5
6	Eti Cahyaningsih	Kepala Bidang Jabatan dan Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	08161484447	
7	Muhammad Arif Rachman	Kepala Bidang Pembinaan dan Disiplin Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	082113249337	
8	Dessy Fatmasari	Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	085219209999	
9	Susanti	Kepala Pusat Data dan Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	08128069719	
10	Setyowidi Purnamasari	Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Pegawai Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta	0817735421	

Dengan ini menyatakan bahwa telah melakukan penilaian terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen ASN di Provinsi DKI Jakarta dengan hasil sebagai berikut :

LAMPIRAN BERITA ACARA HASIL PENILAIAN MANDIRI SISTEM MERIT PEMPROV. DKI JAKARTA
TAHUN 2023

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total
1	Perencanaan Kebutuhan	1 Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	10	10		10
		2 Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	10	10		10
		3 Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	10	10		10
		4 Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	10	10		10
		Total Aspek Perencanaan Kebutuhan	40	40	0	40
2	Pengadaan	1 Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	8	8		8
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	8	8		8
		3 Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	8	8		8
		4 Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	8	8	8	8
		5 Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	8	8		8
		Total Aspek Pengadaan	40	32	8	40
3	Pengembangan Karir	1 Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	20	15		15
		2 Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	20	10		10

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total
		3 Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	20	10		10
		4 Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir instansi;	10	5		5
		5 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	10	5		5
		6 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	10	5		5
		7 Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	10		10	10
		8 Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	10		10	10
		9 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	10		10	10
		10 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	10	2.5		2.5
		Total Aspek Pengembangan Karir	130	52.5	30	82.5
4	Promosi dan Mutasi	1 Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/ Pergub/Perbup/ Perwali) tentang pola karir;	20	20		20
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	10	10		10
		3 Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	10	7.5		7.5
		Total Aspek Promosi dan Mutasi	40	37.5	0	37.5

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total
5	Manajemen Kinerja	1 Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	20	20		20
		2 Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	20	20		20
		3 Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	10	10		10
		4 Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	20	15		15
		5 Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karir;	10	10		10
Total Aspek Manajemen Kinerja			80	75	0	75
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1 Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	10	10		10
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	10	10		10
		3 Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	10	10		10
		4 Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	10	7.5		7.5
Total Aspek Penggajian, Penghargaan dan Disiplin			40	37.5	0	37.5
7	Perlindungan dan Pelayanan	1 Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	8	8		8
		2 Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	8	8		8
Total Aspek Perlindungan dan Pelayanan			16	16	0	16

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total			
8	Sistem Informasi	1	8	8		8			
		Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;							
		2					4	4	4
		Penerapan eperformance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;							
		3	4	4	4	4			
		Pembangunan eoffice yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;							
		4	8	6		6			
		Pembangunan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;							
Total Aspek Sistem Informasi			24	22	0	22			
Total Nilai			410	312.5	38	350.5			

Demikian Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dibuat sebagai bukti telah dilaksanakannya penilaian mandiri penerapan sistem merit di Provinsi DKI Jakarta.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
selaku

Ketua Tim Penilai Mandiri



Maria Qibya

NIP. 196507191985032002

3) Persentase Diklat yang dilaksanakan BPSDM sesuai dengan ketentuan

Berdasarkan definisi operasional yang terdapat dalam RPD Tahun 2023 – 2026 adalah hasil perhitungan terhadap diklat yang dilaksanakan oleh BPSDM dengan metode Pengukuran: (Jumlah Diklat Yang Dilaksanakan BPSDM dibagi Jumlah Kebutuhan Diklat x 100%), bahwa target di tahun 2023 sebesar 60%, dan capaian realisasi sebesar 74,58% (melebihi target), dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah Diklat sebanyak 132 Jenis Diklat

Jumlah Kebutuhan Diklat sebanyak 177 Jenis Diklat.

Persentase Target sebesar 60 % dengan Realisasi Capaian sebesar 74,58 % atau sebesar 124,29 %.

4) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (target APD-P dan realisasi APBD-P)

Merupakan indikator yang dihitung dari presentase serapan anggaran, presentase efisiensi, dan presentase output, diukur dari 3 (tiga) komponen berikut:

- 1) Penyerapan Anggaran. Komponen ini mengukur kesesuaian realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan di lingkungan Perangkat Daerah. Nilai penyerapan anggaran maksimal adalah 40%. Penyerapan anggaran bernilai 40% apabila serapan anggaran $\geq 80\%$. Apabila serapan anggaran di bawah $< 80\%$ maka perhitungan nilai penyerapan anggaran = (Persentase Serapan Anggaran x 40%). Anggaran yang diperhitungkan meliputi APBD dan BLU, dan tidak termasuk dana transfer dari pemerintah pusat;
- 2) Efisiensi adalah sisa dana yang diperoleh setelah pelaksanaan dari sub kegiatan yang target sarannya telah dicapai. Apabila pencapaian output tidak tercapai 100% maka unsur efisiensi tidak diukur. Sisa dana adalah selisih lebih pagu anggaran dengan realisasi anggaran dimana selisih lebih pagu dimaksud sudah tidak dialihkan kembali untuk subkegiatan/belanja lainnya;
- 3) Pencapaian output adalah persentase capaian indikator kinerja sub kegiatan (output). Realisasi pencapaian output dapat dilihat dalam aplikasi e-monev Anggaran hasil inputan PD/UKPD.

Formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

- Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%
Realisasi = (40%) + (% efisiensi X 10%) / 20% + (50%)
- Serapan Anggaran $< 80\%$ dan output $< 100\%$ (Realisasi=(Penyerapan Anggaran X40%)+(pencapaian output X50%))
- Serapan Anggaran $\geq 80\%$, namun output $< 100\%$
Realisasi = (40%) + (pencapaian output x 50%)

Anggaran pada akhir tahun 2023 sebesar Rp 123.256.791.085 dengan realisasi Anggaran sebesar 111.828.250.748 (90,73%), capaian ini didapatkan dari rata-rata persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada Bidang dan UPT di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Tabel 8.
Rekap Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023

No	Bidang/UPT	Kualitas Pelaksanaan Anggaran		
		Target	Realisasi	%
1.	Sekretariat	62.585.234.558	59.823.893.257	95,59%
2.	Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional	28.735.362.233	24.619.386.662	85,68%
3.	Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan dan Evaluasi	1,725,159,000	1.724.659.000	99,97%
4.	Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi	19,367,979,659	15.001.445.484	77,45%
5.	Kepala UPT Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia	1,017,772,685	992,393,829	97,51%
6.	Kepala UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik	9.825.282.950	9.666.472.516	98,38%
TOTAL		123.256.791.085	111.828.250.748	90,73%

Sumber: Sub Bagian Keuangan BPSDM

Rekapitulasi diatas didapatkan dari serapan anggaran masing-masing, output setiap sub kegiatan serta efisiensi anggaran pada tahun 2023, adapun rinciannya sebagai berikut:

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Pada BPSDm Provinsi DKI Jakarta

Tabel 9.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Tahun 2023

ANGGARAN:	Rp. 51.354.127.794
REALISASI:	Serapan Anggaran: Rp. 47.811.390.808 93,10%
	Efisiensi Rp. 3.542.736.986 7,41%
	Output 100%
	Realisasi = (40%) + ((% Efisiensi X 10%)/20%) + (50%)
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran \geq 80% dan output 100%)	93,10%

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja			
							Indikator	Target	Satuan	Capaian
1	Penyediaan Alat Tulis Kantor	200,328,516	200,195,226	99.93	133,290	0,07	4	Nilai	4	100
2	Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	784,751,319	777,882,840	99.12	6,868,479	0,88	4	Nilai	4	100
3	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	357,119,502	271,308,500	75.97	85,811,002	24,03	4	Nilai	4	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja			
							Indikator	Target	Satuan	Capaian
4	Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan	610,500,000	554,000,000	90.75	56.500.000	9,25	Nilai	4	4	100
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	127,531,940	106,701,300	83.67	20,830,640	16,63	Nilai	4	4	100
6	Penyediaan sewa mesin fotokopi	355,644,000	322,344,000	90.64	33,300,000	9,36	Nilai	4	4	100
7	Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kerja	161,866,328	86,238,120	53.28	75,628,208	46,72	Nilai	4	4	100
8	Petugas Keamanan (PJLP)	1,327,877,560	1,318,036,872	99.26	9,840,688	0,74	Lap	12	12	100
9	Seragam dan Perlengkapan PJLP	279,421,166	265,702,920	95.09	13,718246	4,91	Lap	12	12	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja			
							Indikator	Target	Satuan	Capaian
10	Petugas Kebersihan Dalam Gedung (PJLP)	1,792,634,706	1,783,342,864	99.48	9,291,842	0,16	4	Nilai	4	100
11	Petugas PJLP Keamanan	1.327.877.560	265,210,988	99.86	364,524	0,14	4	Nilai	4	100
12	Penyediaan jasa pemeliharaan KDO/KDO Khusus	182,381,295	158,424,808	86.86	23,956,487	13,14	4	Nilai	4	100
13	Penyediaan jasa perizinan KDO/KDO khusus	16,816,000	11,999,500	71.36	4,816,500	28,64	4	Nilai	4	100
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	120,089,680	113,839,158	94.80	6,250,522	5,20	4	Nilai	4	100
15	Penyediaan BBM KDO	260,931,030	260,931,030	100	0	0	4	Nilai	4	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja			
							Indikator	Target	Satuan	Capaian
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	5,023,561,168	4,901,019,240	97.56	122,541,928	2,44	4	Nilai	4	100
17	Pengembangan Kompetensi Widyaiswara	217,337,500	201,839,309	92.87	15,498,191	7,13	25	Orang	42	168
18	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50.026.250.234	47.811.390.808	95,57	2.214.859.426	4,63	100	Orang	107	107
19	Penyediaan Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI)	529,479,182	252,568,774	47.70	276,910,408	52,3	4	Nilai	4	100
20	Penyediaan makanan dan minuman	162,475,420	160,917,000	99.04	1,558,420	0,96	4	Nilai	4	100
TOTAL		51.354.127.794	47.811.390.808	93,10	3.542.736.986	7,41				



Tabel 10.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar, Manajerial dan Fungsional Tahun 2023

ANGGARAN:	Rp. 28.543.024.731
REALISASI:	Serapan Anggaran: Rp. 24.619.386.662
	Efisiensi Output Rp. 3.923.638.069
	100%
	Realisasi = $(40\% + ((\% \text{ Efisiensi} \times 10\%)/20\%)) + (50\%)$
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	100%
(Perhitungan Serapan Anggaran $\geq 80\%$ dan output 100%)	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja			
							Indikator	Target	Satuan	Capaian
1	Pengembangan Kompetensi Fungsional	4,396,845,123	4,241,050,123	96,46	155,795,000	3,54	400	Orang	413	103
2	Diklat Dasar Pol PP bagi Staf	3,208,429,820	2,922,849,820	91,10	285,580.000	8,9	600	Orang	601	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja				
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	%
3	Diklat Kepala Sekolah	3,288,933,213	3,235,308,833	98.37	53,624,380	1,63	Jumlah peserta Diklat Kepala Sekolah	600	Orang	606	101
4	Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil	1,145,876,605	1,013,821,607	88.48	132,054,998	11,52	Jumlah peserta Pengiriman Diklat PPNS	25	Orang	39	156
5	Bendahara Pengeluaran	-	-	-	-	-	Jumlah peserta Diklat Bendahara Pengeluaran	150	Orang	158	105
6	Diklat Bendahara Penerimaan	30,999,607	30,939,607	99.81	60,000	0,19	Jumlah peserta Diklat Bendahara Penerimaan	90	Orang	92	102
7	Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	197,581,620	197,487,820	99.95	93,800	0,05	Jumlah peserta Diklat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa dan Ujian Sertifikasi	300	Orang	323	108
8	Diklat Pengelolaan BMD	-	-	-	-	-	Jumlah peserta Diklat Pengelolaan BMD	150	Orang	153	102
9	Diklat Kepemimpinan Tingkat II	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Diklat Kepemimpinan Tingkat III (PKA)	3,345,913,910	2,236,932,848	66.86	1,108,981,062	33,14	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan TK. III	90	Orang	94	104

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja				
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	%
11	Diklat Kepemimpinan Tingkat IV (PKP)	9,194,138,050	7,040,291,404	76,57	2,153,846,646	23,43	Jumlah peserta Diklat Kepemimpinan TK. IV	300	Orang	313	104
12	Pelatihan Dasar	3,734,306,783	3,700,704,600	99,10	33,602,183	0,9	Jumlah peserta Pelatihan Dasar CPNS Golongan II dan III	400	Orang	423	106
TOTAL		28,543,024,731	24,619,386,662	86,25	3,923,638,069	15,94	Jumlah peserta Pelatihan Orientasi PPPK	9500	Orang	9,524	100

Tabel II.
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
Bidang Analisis Kebutuhan, Perancangan, Pengembangan, dan Evaluasi Tahun 2023

ANGGARAN:	Rp. 1,725,159,000	
REALISASI:	Serapan Anggaran: Rp. 1.724.659.000	99,97%
	Efisiensi Rp. 500.000	0,03%
	Output	100%
	Realisasi = (40%) + ((% Efisiensi X 10%)/20%) + (50%)	
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran		100%
(Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)		

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja				
							Indikator	Target	Satuan	Capaian	%
1	Penyusunan Evaluasi Pasca Pelatihan	245,600,000	245,600,000	100	-	-	Jumlah Dokumen Evaluasi Pasca Pelatihan	20	Dokumen	20	100
2	Pendampingan Pembelajaran Berbasis Corpu	40,725,000	40,725,000	100	-	-	Jumlah Laporan Pendampingan Pembelajaran Berbasis Corpu	1	Dokumen	1	100
3	Pengembangan Desain Pembelajaran Berbasis Corpu	768,257,000	767,857,000	99,95	400	0,05	Jumlah Kurikulum Pelatihan yang tersusun	12	Kurikulum	12	100
4	Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan LCM, AKK	670,577,000	670,477,000	99,99	100	0,01	Jumlah Modul Pelatihan yang tersusun	48	Modul	48	100
	TOTAL	1,725,159,000	1.724.659.000	99,97	500.000	0,03					

Tabel 12.
 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi Tahun 2023

ANGGARAN: Rp. 19,367,979,659 REALISASI: Serapan Anggaran: Rp. 15.001.445.484 Efisiensi Rp. 4.366.534.175 Output 100% Realisasi = (40%) + ((% Efisiensi X 10%)/20%) + (50%) Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)	77,45% 29,11% 100% 100%
--	---

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja				
							Target	Satuan	Capaian	%	
1	Akreditasi Kediklatan	38,339,820	37,522,820	97.87	817.000	2,18	Jumlah Akreditasi Kediklatan yang tersedia	1	Dokumen	1	100
2	Sistem Manajemen Penjaminan Mutu	196,613,213	193,513,213	98.42	3.100.000	1,60	Jumlah Sistem Penjaminan Mutu yang tersedia	1	Dokumen	1	100
3	Konsultasi pengembangan kompetensi	599,097,996	529,833,910	88.44	69.264.086	13,07	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Konsultasi	1	Dokumen	1	100

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Kinerja				
					Indikator	Target	Satuan	Capaian	%
					pengembangan kompetensi yang tersusun				
4	Pengiriman Pegawai Tugas Belajar	15,084,385,160	11,490,523,191	76.17	Jumlah Pegawai Tugas Belajar	95	Orang	108	104
5	Seleksi Pegawai Tugas Belajar	221,689,615	198,349,460	89.47	Jumlah Pegawai Peserta Seleksi Tugas Belajar	100	Orang	100	100
6	Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan ASN Provinsi DKI Jakarta	2,354,239,855	1,724,372,890	73.25	Jumlah Pegawai Peserta Pelatihan Luar Negeri dan Pemagangan	10	Orang	10	100
7	Penyusunan Skema Dalam Rangka Sertifikasi	100,600,000	71,020,000	70.60	Jumlah peserta Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi dengan baik	500	Orang	811	162
8	Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi	773,014,000	756,310,000	97.84	Jumlah Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Dalam Rangka Sertifikasi yang tersusun	1	Dokumen	1	100
TOTAL		19,367,979,659	15,001,445,484	77,45				4,366,534,175	29,11

Tabel 13.
 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 UPT Pusat Data dan Informasi Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2023

ANGGARAN:	Rp. 1,017,772,685
REALISASI:	Serapan Anggaran: Rp. 992,393,829 97.51%
	Efisiensi Rp. 25,378,856 2,56%
	Output 100%
	Realisasi = (40%) + ((% Efisiensi X 10%)/20%) + (50%)
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	97.51%
(Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Kinerja						
					Indikator	Target	Satuan	Capaian	%		
1	Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM	918,271,078	893,742,222	97.33	24,528,856	2,74	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Informasi BPSDM yang dikelola	1	Laporan	1	100
2	Knowledge Management	99,501,607	98,651,607	99.15	850,000	0,86	Jumlah Laporan pelaksanaan Knowledge Management	1	Laporan	1	100
TOTAL		1,017,772,685	992,393,829	97.51	25,378,856	2,56					

Tabel 14.
 Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran
 UPT Pusat Pengembangan Kompetensi dan Kebijakan Publik Tahun 2023

ANGGARAN:	Rp. 9.825.282.950
REALISASI:	Serapan Anggaran: Rp. 9.461.571.716 96,30%
	Efisiensi Rp. 363.711.234 3,84%
	Output 100%
	Realisasi = (40%) + ((% Efisiensi X 10%)/20%) + (50%)
Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	96,30%
(Perhitungan Serapan Anggaran ≥80% dan output 100%)	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Efisiensi	Kinerja				
					Indikator	Target	Satuan	Capaian	%
1	Penerimaan Tamu Konsultasi Studi Banding dan Kunjungan Kerja	199.940.000	199.940.000	100	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1	Laporan	1	100
2	Peningkatan Layanan Umum Daerah	1.269.728.499	1.145.432.993	90,21	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	Laporan	1	100
3	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.109.425.706	1.065.650.000	96,05	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Sosial Kultural	1.052	1.231	114%	

No	Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Efisiensi		Kinerja			
							Target	Satuan	Capaian	%
4	Pengembangan Kompetensi Teknis	727.402.763	597.997.500	82,21	129.405.263	21,64	1.230	1.399	117%	
5	Pengembangan Kompetensi Teknis	1.038.712.402	1.036.187.500	99,76	2.524.902	0,24	400	413	103	
6	Pengembangan dan Pengelolaan Kolaborasi Jakarta Public Policy Center	1.049.525.150	991.152.787	94,44	58.372.363	5,89	60	74	123	
7	Pengiriman Kediklatan	4.430.548.430	4.425.210.936	99,88	5.337.494	0,12	200	411	206	
TOTAL		9.825.282.950	9.461.571.716	96,30	363.711.234	3,84				

2. a. Capaian Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2022 - 2023

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 antara Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, ditetapkan 3 (tiga) jenis sasaran yaitu:

- Sasaran Strategis;
- Sasaran Khusus;
- Sasaran Operasional.

Tabel 15.
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 - 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Capaian Tahun 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
Sasaran Strategis								
1	Pengembangan Kompetensi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan <i>Knowledge Management</i>	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	Indeks	31	335,5	31	38	123% (Berdasarkan nilai yang diperoleh pada e-SAKIP Bappeda Provinsi DKI Jakarta)
2	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penggerak Partisipasi Masyarakat	Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	31,2	38,16	38,7	Data belum rilis	38,16 (Penilaian IP ASN Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh BKN RI)
3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Iklim Kerja Aparatur	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	Persen	100	100	100	100%	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
4	Berkurangnya Ketimpangan Serta Terjaminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Persen	100	100	100	100%	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Capaian Tahun 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	Persen	100	100	100	100%	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Persen	100	100	100	100%	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
Sasaran Khusus								
7	Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taktis dan adaptif	Opini laporan Keuangan	Anggaran	3	3	3	3	3 (Berdasarkan penilaian pimpinan)
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	Persentase Pemanfaatan E-Order	Persen	100	100	100	100%	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
9	Terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program unggulan atau program umum serta respon perangkat daerah pada saat krisis komunikasi program.	Persen	100	100	100	100%	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Capaian Tahun 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	Predikat A	Predikat AA 91	Predikat AA 96,66	82	88,45	88.45 (Berdasarkan surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta No.5029/PA.0 2.02 Tanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi Atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023)
11	Meningkatnya Pengelolaan Arsip pada Perangkat Daerah	Persentase Arsip Aktif dalam Daftar Arsip Aktif	Persen	-	-	100	100	100% (Berdasarkan hasil kalkulasi perhitungan tarikan data dari e-office yang telah divalidasi pimpinan)
12	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui pemenuhan daftar data daerah	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	Persen	100	100	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
13	Terkelolanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PD/UKPD	Persen	100	100	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Capaian Tahun 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
14	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	Persen	-	-	80	100	100% (Berdasarkan surat Plh. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta selaku Ketua Harian Tim P3DN Provinsi DKI Jakarta No. e-0010/Pl.03 Tanggal 4 Januari 2024 Perihal Penghitungan Capaian P3DN Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Biro Setda Tahun 2023)
		Jumlah ASN anggota Tim P3DN pada Perangkat Daerah dan Biro Sekretariat Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi terkait P3DN	Orang	-	-	102	114	114 Orang (Berdasarkan penilaian pimpinan)
15	Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persentase Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 20 Jam Pelajaran pertahun	Persen	-	-	100	100	100% (Data realisasi yang ditarik langsung dari Portal Informasi Kompetensi Aparatur (PIntAr) BPSDM Provinsi DKI Jakarta)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Capaian Tahun 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
16	Meningkatnya Manajemen Pengetahuan	Persentase penyelesaian tahapan manajemen pengetahuan	Persen	-	-	100	100	100% (Berdasarkan Nota Dinas Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0087/DL.01.00 Tanggal 15 Desember 2023 Perihal Laporan Capaian Target Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan Sasaran Meningkatkan Manajemen Pengetahuan)
17	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	Persen	-	-	100	100	100% (Berdasarkan Berita Acara Realisasi Sasaran Khusus Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023 yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta)

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2022		2023		Capaian Tahun 2023
				Target	Realisasi	Target	Realisasi	
18	Tercapainya Target Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi	Presentase Nilai Kinerja Anggaran atas aspek Implementasi	Persen	-	-	71	96,51	96,51% (Berdasarkan Surat Penyampaian Target Kinerja Anggaran Atas Aspek Implementasi dari Kepala BPKD Provinsi DKI Jakarta Nomor e-0894/UD.02 tanggal 19 Desember 2023)
Sasaran Operasional								
19	Terselesaikannya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persen	100	100	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
20	Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	Persen	100	100	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)
21	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	Persen	100	100	100	100	100% (Berdasarkan penilaian pimpinan)

Sumber: Olah Data

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan diatas, BPSDM Provinsi DKI Jakarta didukung dengan 2 (dua) Program Prioritas dan 1 (satu) Program penunjang sebagai berikut:

Tabel 16.
Realisasi Anggaran APBD-P Tahun 2023

No	Program	Anggaran APBD-P	Realisasi	Persentase
1.	Program Kepegawaian Daerah	17.660.314.630	13.413.245.541	75,95%
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.623.302.320	36.348.935.244	89,48%
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	64.973.174.135	62.066.326162	95,53%
Total Anggaran		123.256.791.085	111.828.506.947	90,73%

Sumber: Olah Data

b. Capaian Sasaran dari Kegiatan Strategis Daerah (KSD) Tahun 2023

1) Capaian Sasaran Strategis

Sasaran strategis dalam Perjanjian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta Tahun 2023, tidak hanya berasal dari nafas tujuan dan sasaran BPSDM semata, tetapi juga mendapatkan dorongan kuat dari denyut jantung Kegiatan Strategis Daerah (KSD). Dalam peran ganda yang diemban, BPSDM tidak hanya menjadi penanggung jawab utama beberapa KSD, melainkan juga terlibat secara integral dalam menentukan kesuksesan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya.

Ketika melibatkan diri dalam membentuk dan melaksanakan KSD, BPSDM mengukir jejaknya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pemerintah DKI Jakarta Tahun 2023 sd 2026. Setiap sasaran strategis yang ditetapkan tidak hanya mencerminkan ambisi internal BPSDM, tetapi juga dipengaruhi oleh harmonisasi dengan prioritas Kegiatan Strategis Daerah (KSD) yang berpengaruh pada perkembangan daerah antara lain:

- a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
 - Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta,
 - Output: Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023;
 - Kriteria keberhasilan yaitu Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023;
 - Ukuran Keberhasilan: TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%;

Tabel 17.
TLHP APIP Selesai Ditindaklanjuti

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	B06	TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%	100%	100%	Tersedianya Berita Acara Hasil Verifikasi Inspektorat. Catatan untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi hasil pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%. TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 90%. Catatan Verifikator: Target Tercapai.

- b. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional
 - Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta,
 - Output: Penyusunan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;
 - Kriteria keberhasilan yaitu Tersedianya Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;
 - Ukuran Keberhasilan: Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub Nomor 1195 Tahun 2022;

Tabel 18.
Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	B09	Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022	100%	100%	Tersusunnya Laporan Rencana Kebutuhan Jenis Pekerjaan, Jumlah, dan Satuan Harga PJLP sesuai Kepgub 1195 Tahun 2022. Catatan Verifikator: Target Tercapai.

c. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

- Program Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta,
- Output:
 - 1) Penyusunan Kajian Kelembagaan, Perencanaan dan Pemenuhan SDM serta Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Tahun 2023-2026);
 - 2) Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023.
- Kriteria keberhasilan yaitu
 - 1) Tersedianya Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
 - 2) Ditindaklanjutinya rekomendasi Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023.
- Ukuran Keberhasilan:
 - 1) Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4 tahun dan implementasi;
 - 2) TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95%

Tabel 19.
Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah
Provinsi DKI Jakarta

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	B12	Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4 tahun dan implementasi;	100	100	Tersusunnya Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4 tahun dan implementasi Catatan Verifikator: Target Tercapai.
2.	B12	Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP atas LHP yang terbit periode 2019 s.d. 2023	100	100	Tersedianya Berita Acara Hasil Verifikasi Inspektorat. Catatan untuk SKPD yang belum mempunyai temuan dan rekomendasi hasil pengawasan APIP, maka persentase capaian KSD dinilai 100%. TLHP APIP selesai ditindaklanjuti atas LHP yang terbit periode tahun 2019 s.d. 2023. Target capaian 95% Catatan Verifikator: Target telah tercapai.

d. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

- Program: Transformasi Digital
- Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE
- Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan Kompetensi SDM SPBE;
- Ukuran Keberhasilan: Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah.

Tabel 20.
Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	B06	Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah	100	100	Tersedianya Pemetaan Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM SPBE pada Perangkat Daerah Catatan Verifikator: Target Tercapai.

e. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

- Program: Transformasi Digital
- Output: Peningkatan Kompetensi SDM SPBE
- Kriteria keberhasilan: Terlaksananya Optimalisasi Tim Koordinasi SPBE melalui Peningkatan Kompetensi SDM SPBE.
- Ukuran Keberhasilan: Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE memuat: 1. Laporan Kegiatan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada tahun 2023 2. Hasil Reviu Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada Perangkat Daerah.

Tabel 21.
Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	B09	Laporan Pengembangan Kompetensi SDM SPBE memuat: 1. Laporan Kegiatan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan	100	100	Tersedianya 1. Laporan Kegiatan Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada tahun

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
		infrastruktur SPBE) pada tahun 2023; 2. Hasil Reviu Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada Perangkat Daerah.			2023 2. Hasil Reviu Pemenuhan Kompetensi Sumber Daya Manusia tentang SPBE (bidang proses bisnis pemerintahan, arsitektur SPBE, data dan informasi, keamanan SPBE, aplikasi SPBE, dan infrastruktur SPBE) pada Perangkat Daerah. Catatan Verifikator: Target Tercapai

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional

- Program: Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)
- Output:
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;
 - 2) Penyusunan Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) Penyusunan Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022.
- Kriteria keberhasilan:
 - 1) Tersusunnya Dokumen Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah (Eselon 2, 3, 4, Fungsional dan Pelaksana) Tahun 2023 dan 2024;
 - 2) Tersusunnya Dokumen Evaluasi Renja dan Kinerja Perangkat Daerah;
 - 3) Tersusunnya laporan kinerja Perangkat Daerah yang berkualitas dan tepat waktu.
- Ukuran Keberhasilan:
 - 1) Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis);
 - 2) Evaluas terdiri dari:
 - a. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022;
 - b. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022;
 - 3) LKIP:
 - a. Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id

Tabel 22.
Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	B03	Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis)	100	100	Tersedianya Dokumen Rancangan Final Perjanjian Kinerja (Eselon 2) (menunggu keputusan tentang tambahan sasaran khusus dan sasaran strategis) Catatan Verifikator: Target telah tercapai.
2.	B03	1. Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022; 2. Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022;	100	100	Tersedianya Dokumen hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah TW IV Tahun 2022 dan Dokumen evaluasi Kinerja Eselon 2, 3, 4 TW IV Tahun 2022. Catatan Verifikator: Target telah tercapai.
3.	B03	Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022; Screenshot LKIP telah terupload pada website esr.menpan.go.id	100	100	1. Tersusunnya Dokumen LKIP Perangkat Daerah Tahun 2022; 2. Tersedianya Screenshot LKIP yang telah terupload pada website esr.menpan.go.id Catatan Verifikator: Target telah tercapai.

2) Capaian Sasaran Khusus

- a. Opini laporan keuangan daerah (Target 3 Nilai (WTP), realisasi WTP) Berdasar UU No 15 Tahun 2004 terdapat 4 jenis Opini yang diberikan BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah yaitu :
 - 1) Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini.
 - 2) Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
 - 3) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar semua material, posisi keuangan, hasil usaha dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak yang berhubungan dengan yang dikecualikan.
 - 4) Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Pada Tahun 2023 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendapatkan penilaian WTP, yang merupakan penilaian paling baik dari jenis penilaian yang diberikan BPK.

b. Persentase Pemanfaatan E-Order

Sebagai indikator dari Sasaran Meningkatkan Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Pelaksanaan e-Order tidak hanya pada BPSDM, yang akan dikeluarkan laporan penggunaan e-Order setiap bulannya oleh Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta. Pelaksanaan e-Order harus dilaporkan setiap Triwulan nya kepada Asisten pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta Pelaksanaan e-Order pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta didasarkan pada Anggaran Belanja Makan Minum Rapat, Belanja Makan Minum Jamuan Tamu dan Belanja Makan Minum Aktivitas Lapangan, dimana terdapat pengecualian terhadap belanja Air Mineral Galon, Kopi, Teh dan Gula bisa tidak masuk ke dalam pengadaan menggunakan system e-Order tersebut. Berdasarkan riwayat transaksi pemesanan pada e-Order, BPSDM Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Triwulan IV Tahun 2023 telah melakukan (jumlah) transaksi melalui e-Order dengan Nilai Realisasi Belanja e-order sebagai berikut:

Tabel 23.
Pelaksanaan e-order

No	Kode Rekening	Belanja	Anggaran	Realisasi	%
1	5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.662.000	490.662.000	100
2	5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	621.995.000	621.995.000	100
3	5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.085.796.000	2.085.796.000	100
TOTAL			3.198.453.000	3.198.453.000	100

Seluruh Pelaksanaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat, Jamuan Tamu serta Aktivitas Lapangan telah dilakukan seluruhnya melalu e-order dan seluruh transaksi telah selesai dibayarkan oleh Bendahara, sehingga realisasi e-Order Tahun 2023 pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah mencapai 100%. Seluruh bukti capaian pelaksanaan e-Order diinput ke dalam system e-TPP Kepala BPSDM dan divalidasi oleh Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Dari : Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : e-0001/DL.01.02
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Realisasi e-Order Triwulan IV Tahun Anggaran 2023

Menindaklanjuti Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah pada Sasaran Khusus yaitu Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa dengan Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan E-Order, dengan ini saya sampaikan laporan realisasi e-Order triwulan IV Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

Berdasarkan data monitoring BPPBJ Provinsi DKI Jakarta bahwa realisasi e-order sebesar 100% sebagaimana tabel dibawah ini :

NO.	URAIAN	REALISASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI E-ORDER (Rp)	KET.
1	2	3	4	5
1	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.085.796.000	2.085.796.000	100%
2	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	621.995.000	621.995.000	100%
3	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	490.662.000	490.662.000	100%
JUMLAH		3.198.453.000	3.198.453.000	100%

Demikian saya sampaikan, mohon perkenan arahan Bapak lebih lanjut. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.

Jakarta, 2 Januari 2024
 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi DKI Jakarta,

 MOCHAMAD MF TAHULLOH T
 NIP. 197812131997111001

Tembusan :
 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
 2. Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta;

Gambar 1. Realisasi e-Order Tahun 2023

c. Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik program-program umum dan unggulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta: (target 100%, realisasi 100%). Merupakan pelaksanaan dari sasaran terimplementasinya rencana strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah, aspek-aspek yang menjadi perhatian dalam indikaotr ini antara lain:

- 1) Persentase tersusunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah;
- 2) Persentase tersusunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi. Dinas Kominfotik menyusun editorial plan lingkup Provinsi;
- 3) Persentase tersusunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 Jam;
- 4) Persentase terpublikasikannya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang.

Penghitungan:

- Bobot 20%: PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan (KSD) atau program umum per triwulan;
- Bobot 20%: PD menyusun materi editorial plansesuai strategi komunikasi per triwulan;
- Bobot 30%: PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press releasedan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam;
- Bobot 30%: PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.

Adapun Realisasi sampai dengan Tahun 2023 sebesar 100%

Cara pencapaian dalam indikator ini dengan melaporkan segala bentuk rencana kerja pelayanan yang telah dilaksanakan bagi ASN Provinsi DKI Jakarta dan melakukan Publikasi di dalam media sosial BPSDM Provinsi DKI Jakarta dan dilaporkan ke dalam website <https://komunikasi.jakarta.go.id>, berikut contoh yang dilaporkan dalam indikator ini sebagai berikut:



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 Dari : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : 02754/DL.01.02
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Realisasi Publikasi Materi Komunikasi Perkin Strategi Komunikasi Triwulan IV Tahun 2023

Dalam Rangka Realisasi Publikasi Materi Komunikasi Perkin Strategi Komunikasi Triwulan IV Tahun 2023, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

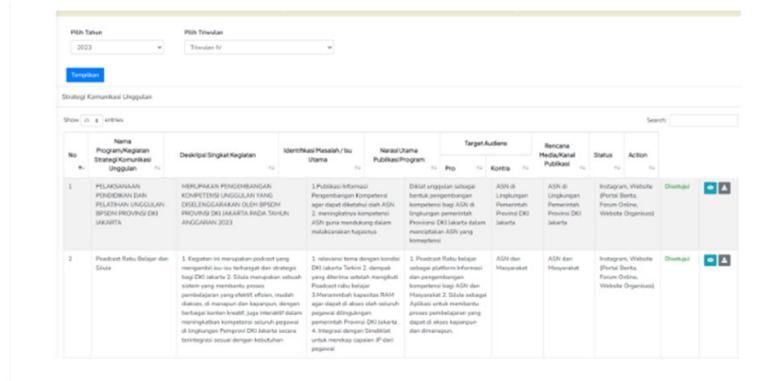
1. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi DKI Jakarta telah mempublikasikan Program atau Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Aparatur.
2. Terkait program dimaksud, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kampanye dan sosialisasi baik dalam bentuk pembuatan dan penyebarluasan webinar *series*, *podcast*, produksi dan penayangan materi infografis, produksi dan materi video grafis.
3. Pelaksanaan dan realisasi program dimaksud telah diinput pada <https://komunikasi.jakarta.go.id>.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian Bapak disampaikan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

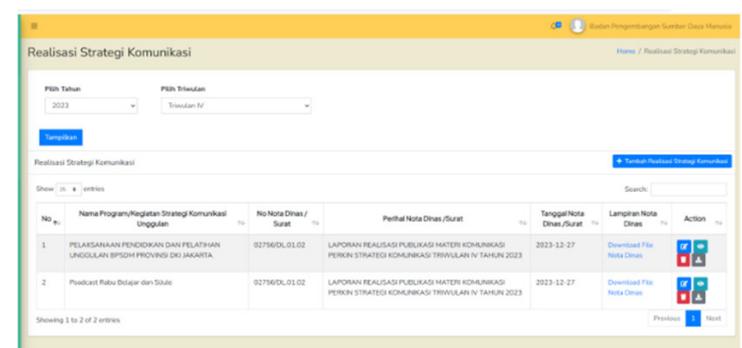
Jakarta, 27 Desember 2023
 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi DKI Jakarta,

MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
 NIP 197812131997111001

Tembusan :
 Plt. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta



No	Nama Program/Kegiatan Strategi Komunikasi Unggulan	Deskripsi Singkat Kegiatan	Identifikasi Masalah / isu Utama	Nominasi/Usaha Publikasi/Program	Target Audien	Rencana Media/Kanal Publikasi	Status	Action
1	PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNGGULAN BAGIAN PROVINSI DKI JAKARTA	MENYERIKAI PENGEMBANGAN KEMERTEKSIAN UNGGULAN YANG DIBERKAITKAN DENGAN BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA PADA TAHUN ANGGARAN 2023		1. Publikasi Informasi Pengembangan Kompetensi yang dapat diketahui oleh ASN 2. meningkatkan kompetensi ASN guna mendukung dalam melaksanakan tugasnya	ASN sebagai target audiens sebagai bentuk pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam meningkatkan ASN yang kompeten	ASN di Lingkungan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta	Instagram, Youtube, Portal Berita, Forum Online, Website Departemen	Diupload
2	Podcast Ribu Detik dan Sitala	1. Kegiatan ini merupakan podcast yang mengangkat isu-isu berbagai dari strategi bagi DKI Jakarta 2. Sitala merupakan sebuah sitala yang memiliki konsep pembahasan yang singkat, efisien, mudah diakses, di manapun dan kapanpun, dengan berbagai bentuk kreatif yang menarik dalam meningkatkan kompetensi seluruh pegawai di lingkungan Provinsi DKI Jakarta secara terintegrasi sesuai dengan kebutuhan.	1. selarasnya tema dengan bentuk (DL) Jakarta Tahun 2. Sitala yang akan lebih menghidupkan kesadaran bagi ASN dan Masyarakat 3. Sitala sebagai target audiens sebagai bentuk pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta 4. Kegiatan dengan Sitala yang menjadi capaian IP dari program	1. Podcast Ribu Detik sebagai platform informasi dan pengembangan kompetensi bagi ASN dan Masyarakat 2. Sitala sebagai target audiens sebagai bentuk pengembangan kompetensi bagi ASN di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta	ASN dan Masyarakat	ASN dan Masyarakat	Instagram, Youtube, Portal Berita, Forum Online, Website Departemen	Diupload



No	Nama Program/Kegiatan Strategi Komunikasi Unggulan	No Nota Dinas / Surat	Perihal Nota Dinas / Surat	Tanggal Nota Dinas / Surat	Lampiran Nota Dinas	Action
1	PELAKSANAAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN UNGGULAN BAGIAN PROVINSI DKI JAKARTA	02756/DL.01.02	LAPORAN REALISASI PUBLIKASI MATERI KOMUNIKASI PERKIN STRATEGI KOMUNIKASI TRIWULAN IV TAHUN 2023	2023-12-27	Download File Nota Dinas	Diupload
2	Podcast Ribu Detik dan Sitala	02756/DL.01.02	LAPORAN REALISASI PUBLIKASI MATERI KOMUNIKASI PERKIN STRATEGI KOMUNIKASI TRIWULAN IV TAHUN 2023	2023-12-27	Download File Nota Dinas	Diupload

Gambar 2.

Hasil Implementasi Rencana Strategi Komunikasi Publik Tahun 2023

d. Predikat SAKIP Perangkat Daerah tahun 2023, realisasi 85,42 (A)

Evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan penilaian atas fakta objektif pemerintah dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja. Evaluasi atas implementasi SAKIP terdiri dari evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi: perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, laporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Adapun komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja dengan bobot penilaian 30%, pengukuran kinerja 25%, pelaporan kinerja 15%, evaluasi 10%. Kemudian, kinerja diukur dari capaian kinerja dengan bobot 20%. Adapun SAKIP Tahun 2023 dirilis oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Inspektur Provinsi DKI Jakarta kepada Pj. Gubernur DKI Jakarta Nomor 5029/PA.02.02 tertanggal 27 Desember 2023 Perihal Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023, dilaporkan bahwa Hasil SAKIP Tahun 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta mencapai Nilai Realisasi 88,45 (A) dari target 82 (A) dan berada pada peringkat ke 14 dari 42 Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta. Dibawah ini Hasil SAKIP dari Inspektorat Provinsi DKI Jakarta:

No	Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Implementasi SAKIP	
		Tahun 2023	
		Nilai	Predikat
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta	88,65	A
14	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	88,45	A
15	Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta	88,30	A
16	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta	87,55	A
17	Kota Administrasi Jakarta Pusat	87,25	A
18	Kota Administrasi Jakarta Utara	87,25	A
19	Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta	87,05	A
20	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta	87,05	A
21	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Provinsi DKI Jakarta	86,55	A
22	Sekretariat Dewan	86,55	A
23	Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	86,35	A
24	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta	86,10	A
25	Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta	86,05	A
26	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta	85,65	A
27	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta	85,45	A
28	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta	85,05	A
29	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta	84,35	A
30	Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa Provinsi DKI Jakarta	84,05	A
31	Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	83,55	A
32	Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta	83,55	A
33	Kota Administrasi Jakarta Barat	83,45	A
34	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta	83,10	A
35	Kota Administrasi Jakarta Selatan	83,05	A
36	Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta	82,80	A
37	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi DKI Jakarta	81,05	A
38	Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta	80,95	A

Gambar 3.
Hasil Penilaian SAKIP

e. Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023

Penilaian Mandiri Sistem Merit di BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 menjadi cermin ketekunan dan dedikasi organisasi dalam mengukur kualitas dan kinerja internal. Pada tahap ini, lembaga mengadopsi pendekatan yang holistik untuk mengevaluasi implementasi sistem merit, mencakup aspek pengelolaan SDM, pelaksanaan program pelatihan, dan efektivitas kebijakan internal.

Dalam pengelolaan SDM, BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa rekrutmen, promosi, dan mutasi dilakukan sesuai dengan prinsip meritokrasi, di mana penilaian kinerja dan kompetensi menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan. Proses evaluasi ini tidak hanya menilai pencapaian individu, tetapi juga mengevaluasi efektivitas tim, mendorong kolaborasi dan saling dukung di seluruh organisasi.

Pada tingkat program pelatihan, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi pegawai. Evaluasi mencakup efektivitas desain program pelatihan, partisipasi aktif dari pegawai, dan dampak positif yang dihasilkan terhadap kinerja mereka.

Selain itu, dalam konteks kebijakan internal, penilaian mandiri sistem merit juga memerhatikan sejauh mana kebijakan yang telah diimplementasikan mendukung terciptanya lingkungan kerja yang adil, transparan, dan mendorong pertumbuhan profesional. Evaluasi ini mencakup keberlanjutan implementasi kebijakan dan upaya untuk terus meningkatkan sistem merit sebagai landasan utama manajemen SDM di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, Penilaian Mandiri Sistem Merit tahun 2023 di BKD dan BPSDM Provinsi DKI Jakarta mencerminkan semangat organisasi untuk memastikan bahwa prinsip meritokrasi terus ditegakkan, pegawai terus berkembang, dan kebijakan internal terus beradaptasi dengan dinamika kebutuhan. Penekanan pada evaluasi holistik ini memperkuat peran BPSDM Provinsi DKI Jakarta sebagai lembaga yang tidak hanya mengelola SDM dengan bijak tetapi juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pegawai yang terampil dan berkompeten.

Dibawah ini Hasil Penilaian Sistem Merit di Provinsi DKI Jakarta:

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total		
1	Perencanaan Kebutuhan	1. Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan jabatan untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan	10	10		10		
		2. Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi.	10	10		10		
		3. Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir.	10	10		10		
		4. Ketersediaan secara sistematis kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun).	10	10		10		
		Total Aspek Perencanaan Kebutuhan						40
		2	Pengadaan	1. Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan.	8	8		8
				2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pengal/Perwal/Perwali) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.	8	8		8
				3. Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif.	8	8		8
				4. Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latihan) bagi CPNS.	8	8		8
				5. Penerapan CPNS yang diangkat menjadi PNS dilaksanakan sesuai format jabatan dan unit kerja yang dituntut.	8	8		8
Total Aspek Pengadaan						40		
3	Pengembangan Karir	1. Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (SKAJ), buku dan atau kultur untuk setiap jabatan.	20	15		15		
		2. Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan penyesuaian talenta kompetensi.	20	10		10		

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total
5	Manajemen Kinerja	1. Ketersediaan kontrak kerja yang terukur dan diuraikan dari Rencana Strategis Organisasi.	20	20		20
		2. Program kerja pemenuhan kinerja yang obyektif.	20	20		20
		3. Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kerja.	10	10		10
		4. Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi.	20	10		10
		5. Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait penempatan dan pengembangan karir.	10	10		10
Total Aspek Manajemen Kinerja						70
6	Pengujian, Penghargaan dan Disiplin	1. Kebijakan internal mengenai tentang persyaratan tarung kerja berdasarkan hasil penilaian kinerja.	10	10		10
		2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Pengal/Perwal/Perwali) untuk pemberian penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi.	10	10		10
		3. Kebijakan internal mengenai tentang pengenaan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansi.	10	10		10
		4. Pengenaan disiplin terhadap pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai.	10	7.5		7.5
Total Aspek Pengujian, Penghargaan dan Disiplin						40
7	Perindungan dan Pelayanan	1. Ketersediaan perlindungan untuk pegawai dalam jaminan kesehatan, jaminan kecekaman kerja, program pensiun, yang dilaksanakan secara menyeluruh.	8	8		8
		2. Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi.	8	8		8
Total Aspek Perlindungan dan Pelayanan						16

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total		
3	Pengembangan Karir	3. Ketersediaan Target Prior yang disusun berdasarkan kondisi-kondisi manajemen dan hasil penilaian kinerja.	20	10		10		
		4. Ketersediaan rencana sukses yang lebih sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karir pegawai.	10	5		5		
		5. Ketersediaan informasi tentang kesegaran kualifikasi dan kompetensi pegawai.	10	5		5		
		6. Ketersediaan informasi tentang kesegaran kinerja.	10	5		5		
		7. Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesegaran kompetensi dan kinerja dalam rangka pengembangan jabatan ASN.	10	10		10		
		8. Pengembangan Diri untuk mengatasi kesegaran.	10	10		10		
		9. Pelaksanaan penilaian kompetensi melalui praktik kerja dan penuntaran pegawai.	10	10		10		
		10. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring.	10	2.5		2.5		
		Total Aspek Pengembangan Karir						100
		4	Promosi dan Mutasi	1. Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pengal/Perwal/Perwali) tentang pola karir.	20	20		20
2. Ketersediaan kebijakan internal (Permen/Perka Lembaga/Pengal/Perwal/Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada sistem pool dan rencana sukses.	10			10		10		
3. Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT Jabatan Administrasi (Adminstrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif.	10			7.5		7.5		
Total Aspek Promosi dan Mutasi						40		

No	Aspek Penilaian	Sub Aspek	Bobot Indikator	Indeks Sistem Merit Lingkup BKD	Indeks Sistem Merit Lingkup BPSDM	Total
8	Sistem Informasi	1. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, pengenaan disiplin dan pembinaan pegawai.	8	8		8
		2. Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online.	4	4		4
		3. Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian.	4	4		4
		4. Peningkatan dan penggunaan assessment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi.	8	8		8
		Total Aspek Sistem Informasi				
Total Nilai						400

Denkiran Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri dibuat sebagai bukti telah dilaksanakannya penilaian mandiri penempatan sistem merit di Provinsi DKI Jakarta.

Kecala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Kepala Tim Penilaian Mandiri


Gambar 4. Hasil Penilaian Sistem Merit

f. Implementasi Manajemen Risiko tahun 2023

Pada tahun 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta mengambil langkah proaktif dalam mengimplementasikan manajemen risiko sebagai elemen kritis dalam operasionalnya. Dalam upaya menghadapi dinamika lingkungan, organisasi memandang manajemen risiko sebagai landasan strategis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola potensi risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan dan kinerja. Proses implementasi ini bukan sekadar formalitas, tetapi sebuah perjalanan yang melibatkan partisipasi aktif dari seluruh jajaran, dengan tujuan menciptakan budaya organisasi yang responsif dan tangguh terhadap tantangan.

Langkah pertama dalam implementasi manajemen risiko adalah identifikasi risiko potensial yang berkaitan dengan berbagai aspek operasional BPSDM. Tim risiko bekerja secara kolaboratif untuk mengidentifikasi dan mengukur dampak serta probabilitas terjadinya risiko-risiko tersebut. Proses ini melibatkan pemetaan risiko internal dan eksternal, mulai dari perubahan regulasi hingga faktor-faktor operasional sehari-hari.

Setelah identifikasi, langkah berikutnya adalah mengevaluasi risiko-risiko tersebut dan mengembangkan strategi mitigasi yang efektif. BPSDM merancang rencana aksi yang tidak hanya bertujuan untuk mengurangi risiko, tetapi juga meningkatkan kapabilitas organisasi dalam merespon dan beradaptasi dengan perubahan. Implementasi manajemen risiko pada tahun 2023 di BPSDM Provinsi DKI Jakarta mencerminkan komitmen serius dalam membangun fondasi organisasi yang kuat dan mampu mengatasi tantangan dengan kecerdasan dan ketangguhan.

BERITA ACARA REALISASI SASARAN KHUSUS PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO
Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berita ini kami sampaikan progres penyelesaian Implementasi Manajemen Risiko s.d. Triwulan IV Tahun 2023

NO	PENILAIAN PERKIN URAIAN	TW II		TW III		TW IV		TINDAK LANJUT SKPD	HASIL VERIFIKASI OLEH INSPEKTORIAT		
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada		Setuju	Tidak	Catatan
1	Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR)	v									
2	Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Kepatuhan Internal	v									
3	Dokumen Formulasir Penetapan Koridor Manajemen Risiko			v							
4	Dokumen Formulasir Profil dan Peta Risiko					v					
5	Dokumen Formulasir Penanganan Risiko						v				
5	Target (jumlah pencapaian yang direncanakan secara nyata dan terukur setiap triwulan dalam satu tahun)	Presentase	40%	40%	40%	30%					
5	Realisasi (Hasil) yang diperoleh setiap triwulan	Presentase	40%	40%	40%	30%					
7	Capaian (jumlah kumulatif realisasi setiap triwulan)	Presentase	40%	80%	80%	100%					

Keterangan :
 - Target Dokumen setiap Triwulan bersifat kumulatif dan berkelanjutan
 - Pemenuhan target dokumen TW III s.d. TW IV merupakan hasil download dari sistem SI-Perai

Petugas Verifikator

Maria Reseta
 NIP 196808111993032005

Bedi Gurrian
 NIP 198708042019031004

Mengetahui,
 Inspektur Perbantuan I
 selaku Verifikator

Ardi Wibowo
 NIP 197704021988111001



Jakarta, Desember 2023
 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi DKI Jakarta,
 MOCHSAHADI M. TAHIRULLOH T
 NIP. 196812131997111001

Gambar 5.
Berita Acara Implementasi Manajemen Risiko

g. Implementasi Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (dua puluh) Jam Pelajaran tahun 2023

Pengembangan Kompetensi ASN sesuai dengan UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN dalam Pasal 21 Setiap ASN memiliki hak dan kesempatan untuk memperoleh pengembangan kompetensi berdasarkan PP No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS (sebagaimana diubah oleh PP No.17 Tahun 2020) Ps. 203 Pengembangan Kompetensi bagi PNS dilakukan paling sedikit 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Sedangkan Indeks Profesionalisme ASN berdasarkan PermenPANRB No.38 Tahun 2018 tentang Pengukuran IP ASN Instansi melakukan pengukuran IP ASN setiap tahun dan Peraturan BKN No.8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran IP ASN.

Indeks Profesionalisme ASN merupakan ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Terdapat 4 dimensi IP ASN antara lain: Kualifikasi (25%), Kinerja (30%), Disiplin (5%), Kompetensi (40%).

Tabel 24.
Perhitungan IP ASN untuk Dimensi Kompetensi

IP ASN	Diklat Kepemimpinan	Diklat Fungsional	Diklat Teknis 20 JP (tahun berjalan)	Seminar/Workshop /Lainnya (tahun berjalan)	JUMLAH
Struktural	15	-	15	10	40
Fungsional	-	15	15	10	40
Pelaksana	-	-	22,5	17,5	40

Sumber: Pusdatin BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal Sebanyak 40 Jam Pelajaran Per Tahun Untuk Seluruh PNS Provinsi DKI Jakarta, untuk Tahun 2023 target yang dilakukan sebesar 20 jam Pelajaran per tahun. Untuk itu, BPSDM Provinsi DKI Jakarta meluncurkan program ambisius pengembangan kompetensi dengan memberikan perhatian khusus pada pelatihan selama 20 (dua puluh) jam pelajaran. Inisiatif ini bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kualifikasi serta keterampilan para ASN DKI Jakarta, agar dapat beradaptasi dengan perubahan dinamis dalam tuntutan lingkungan kerja. Program pengembangan kompetensi ini bukan hanya sekadar tanggung jawab rutin, tetapi juga manifestasi dari tekad ASN Provinsi DKI Jakarta untuk terus berkembang dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Langkah awal implementasi program ini melibatkan identifikasi kebutuhan kompetensi melalui kajian menyeluruh terhadap tuntutan pekerjaan dan perkembangan sektor publik. Dengan pendekatan ini, ASN Provinsi DKI Jakarta dapat menyusun kurikulum yang tepat sasaran dan relevan dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing ASN. Dalam setiap 20 jam pelajaran, para ASN tidak hanya mendapatkan pengetahuan baru, tetapi juga mendapat kesempatan untuk mengasah keterampilan yang menjadi landasan utama dalam pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan fokus pada pemberdayaan ASN, program ini membuka ruang bagi pertumbuhan profesional dan peningkatan kapasitas individual. Evaluasi berkala dilakukan untuk memastikan efektivitas program dan menyesuaikan kurikulum agar tetap responsif terhadap perkembangan terkini. Implementasi pengembangan kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2023 mencerminkan komitmen organisasi untuk menghadirkan ASN Provinsi DKI Jakarta yang tidak hanya memiliki keahlian teknis yang unggul, tetapi juga berdaya saing dan siap berkontribusi dalam mencapai visi dan misi Provinsi DKI Jakarta.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Dari : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
 Nomor : e-0001/DL.01
 Sifat : Penting
 Lampiran : 1 (satu) lampiran
 Hal : Laporan Capaian Target Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Sasaran Khusus Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (Dua Puluh) Jam Pelajaran Tahun 2023

Menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai Minimal Sebayak 40 (Empat Puluh) Jam Pelajaran per Tahun dan Target Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Sasaran Khusus Terimplementasinya Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (Dua Puluh) Jam Pelajaran per Tahun, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Data capaian realisasi Jam Pelajaran dan IP ASN Dimensi Kompetensi dari setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang diperoleh dari Portal Informasi Kompetensi Aparatur (PIntAr) BPSDM Provinsi DKI Jakarta per tanggal 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir.
2. Data realisasi tersebut ditarik langsung dari Portal Informasi Kompetensi Aparatur (PIntAr) BPSDM ke <https://etop.jakarta.go.id> BKD Provinsi DKI Jakarta

Demikian kami sampaikan, mohon arahan Bapak lebih lanjut.

Jakarta, 4 Januari 2024
 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi DKI Jakarta,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
 NIP. 197812131997111001

- Tembusan :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Nomor : e-0001/DL.01
 Tanggal : 4 Januari 2024

**DAFTAR CAPAIAN JAM PELAJARAN (JP) DAN IP ASN DIMENSI KOMPETENSI
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

Nama Perangkat Daerah	Total Pegawai	Sudah Mengikuti Bangkom		Sudah Memenuhi 20 JP		Sudah Memenuhi 40 JP		IP ASN Dimensi Kompetensi
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Inspektorat	278	278	100,00%	278	100,00%	183	65,83%	30,16
Badan Kepegawaian Daerah	239	239	100,00%	239	100,00%	173	72,38%	31,68
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	115	115	100,00%	115	100,00%	107	93,04%	30,11
Badan Pelayanan Pengaduan Barang Jasa	161	161	100,00%	161	100,00%	140	86,96%	32,66
Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	45	45	100,00%	45	100,00%	45	100,00%	34,39
Badan Penanggulangan Bencana Daerah	58	58	100,00%	58	100,00%	45	77,59%	32,31
Badan Pendapatan Daerah	782	782	100,00%	773	98,85%	754	96,42%	35,48
Badan Pengelola Aset Daerah	266	266	100,00%	263	98,87%	179	67,29%	29,05
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	244	244	100,00%	244	100,00%	244	100,00%	39,45
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	107	107	100,00%	107	100,00%	107	100,00%	39,30
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	205	205	100,00%	205	100,00%	188	91,71%	38,14
Dinas Bina Marga	448	446	99,55%	434	96,88%	400	89,29%	36,61
Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	480	480	100,00%	480	100,00%	448	93,33%	31,92
Dinas Kebudayaan	245	245	100,00%	245	100,00%	193	78,78%	31,49
Dinas Kesehatan dan Pencarian Sipil	370	370	100,00%	370	100,00%	370	100,00%	34,04
Dinas Kesehatan	5523	5523	100,00%	5515	99,86%	3884	70,32%	30,33
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian	316	316	100,00%	316	100,00%	316	100,00%	31,96

Nama Perangkat Daerah	Total Pegawai	Sudah Mengikuti Bangkom		Sudah Memenuhi 20 JP		Sudah Memenuhi 40 JP		IP ASN Dimensi Kompetensi
		Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%	
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	247	246	99,50%	246	99,50%	218	88,26%	28,39
Dinas Lingkungan Hidup	573	560	97,73%	532	92,84%	371	64,75%	22,81
Dinas Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	214	212	99,07%	202	94,39%	190	88,79%	32,30
Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	344	343	99,71%	343	99,71%	290	84,30%	33,86
Dinas Pemuda dan Olah Raga	230	230	100,00%	230	100,00%	148	64,35%	31,37
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1190	1187	99,75%	1183	99,41%	1177	98,91%	33,95
Dinas Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan	2297	2295	99,91%	2295	99,91%	814	35,44%	29,58
Dinas Pendidikan	25690	24439	95,13%	23574	91,76%	11953	46,57%	28,52
Dinas Perhubungan	1339	1335	99,70%	1314	98,36%	1139	85,06%	38,89
Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	288	288	100,00%	275	95,49%	212	73,61%	33,32
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	226	226	100,00%	204	90,27%	133	58,85%	27,61
Dinas Pertanahan dan Hutan Kota	504	494	98,02%	453	89,88%	369	73,21%	30,80
Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	283	279	98,59%	261	92,23%	237	83,75%	33,88
Dinas Sosial	638	638	100,00%	638	100,00%	549	86,05%	33,80
Dinas Sumber Daya Air	427	427	100,00%	427	100,00%	361	84,54%	34,40
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Energi	436	436	100,00%	436	100,00%	431	98,85%	38,18
Satuan Polisi Pamong Praja	2791	2784	99,75%	2783	99,71%	2486	89,07%	36,25
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	107	107	100,00%	107	100,00%	88	82,24%	36,73
Kota Administrasi Jakarta Barat	592	592	100,00%	592	100,00%	473	79,90%	29,86
Kota Administrasi Jakarta Pusat	494	494	100,00%	494	100,00%	378	76,52%	24,92
Kota Administrasi Jakarta Selatan	837	837	100,00%	837	100,00%	813	97,13%	33,18
Kota Administrasi Jakarta Timur	860	860	100,00%	859	99,88%	689	80,12%	30,55

Gambar 6.
Laporan Pengembangan Kompetensi ASN Provinsi DKI Jakarta 20 (dua puluh) Jam Pelajaran

h. Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2023

Pada tahun 2023, proses inventarisasi barang milik daerah di Provinsi DKI Jakarta menjadi momen krusial dalam manajemen aset pemerintah. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk merinci dan mengelola secara efektif seluruh barang milik daerah, termasuk kendaraan, peralatan kantor, dan fasilitas umum lainnya. Inventarisasi barang milik daerah menjadi fondasi utama dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset, serta sebagai landasan untuk perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan yang optimal.

Tim inventarisasi bekerja dengan teliti, mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya untuk memastikan ketepatan dan kelengkapan informasi mengenai setiap barang milik daerah. Proses ini melibatkan pemeriksaan fisik, pencocokan dokumen, dan pembaruan data inventaris untuk menciptakan database yang akurat dan terkini. Melalui pendekatan yang komprehensif, BPAD Provinsi DKI Jakarta berusaha membangun sistem manajemen aset yang efisien dan terintegrasi.

Selain memastikan keberadaan dan kondisi barang, inventarisasi tahun 2023 juga bertujuan untuk mengidentifikasi potensi peningkatan efisiensi dalam penggunaan dan pemeliharaan aset. Tim inventarisasi bekerja sama dengan setiap SKPD untuk mengumpulkan masukan dan melibatkan stakeholder terkait guna mengoptimalkan pemanfaatan setiap barang milik daerah. Sehingga, hasil inventarisasi bukan hanya menciptakan data yang akurat, tetapi juga memberikan wawasan strategis untuk peningkatan manajemen aset di masa mendatang.



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
Dari : Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0091/TG.02
Lampiran : -
Hal : Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah Triwulan IV tahun 2023

Sehubungan dengan pemenuhan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 dan terwujudnya tata kelola Barang Milik Daerah yang baik, telah dilaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pemutakhiran Data dan Informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta nomor e-0082 Tahun 2023, tanggal 19 Juni 2023. Tim juga sudah melaksanakan proses pemutakhiran data dan informasi Barang Milik Daerah Berupa Tanah.
2. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki BMD berupa Gedung dan Bangunan pada tahun anggaran 2022 Audited, sehingga pada tahapan ini tidak melakukan Inventaris BMD Gedung dan Bangunan.
3. Gedung dan Bangunan tercatat di KIB Rusak Berat dan menunggu proses penghapusan untuk pembangunan gedung baru BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Demikian disampaikan, atas perkenan dan perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Jakarta, 08 Desember 2023

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,



MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP.198712131997111001

Tembusan :
Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta;

Gambar 7.
Laporan Inventarisasi Barang Milik Daerah

i. Manajemen Pengetahuan Tahun 2023

Di Provinsi DKI Jakarta, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi Koordinator dalam manajemen pengetahuan yang dilakukan oleh semua SKPD. Bahwa manajemen pengetahuan bukan sekadar konsep, tetapi menjadi fondasi kritis dalam mengelola dan meningkatkan kapabilitas SDM. Melalui sistem manajemen pengetahuan yang canggih, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah melakukan berbagai sumber daya pengetahuan untuk mendukung pengambilan keputusan dan inovasi dalam pelatihan dan pengembangan SDM.

BPSDM Provinsi DKI Jakarta memandang pengetahuan sebagai aset yang dinamis dan terus berkembang. Tim manajemen pengetahuan bekerja secara aktif untuk mengidentifikasi, mengelola, dan mendistribusikan pengetahuan terkini melalui platform yang terintegrasi. Selain itu, pro-

mosi budaya berbagi pengetahuan menjadi kunci dalam membangun kolaborasi di antara ASN, sehingga setiap individu dapat mengakses pengetahuan yang diperlukan dan berpartisipasi dalam pertukaran ide.

Implementasi manajemen pengetahuan di Provinsi DKI Jakarta tidak hanya membantu menciptakan SDM yang terdidik dan terampil, tetapi juga meningkatkan responsivitas terhadap perubahan. Dengan kesadaran akan pentingnya pengetahuan dalam mencapai tujuan strategis, Provinsi DKI Jakarta memastikan bahwa investasi dalam manajemen pengetahuan menjadi landasan utama untuk memberikan pelayanan terbaik dan memajukan pemerintahan di tingkat provinsi.

Dibawah ini rincian dari aset pengetahuan yang diberikan oleh masing-masing SKPD dengan jumlah total 273 aset sebagaimana terlampir:


**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
Dari : Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Nomor : e-0087/DL.01.00
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lampiran
Hal : Laporan Capaian target sasaran khusus Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan

Dalam rangka implementasi Peraturan Gubernur Nomor 164 Tahun 2017 tentang Manajemen Pengetahuan dan menindaklanjuti Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 71 tahun 2023 tentang Pelaksanaan Penghimpunan Aset Pengetahuan, dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penghimpunan aset pengetahuan dalam bentuk artikel tulisan dan/atau video.
2. Para Kepala Perangkat Daerah telah mengirimkan minimal 4 (empat) artikel dan/atau video aset pengetahuan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta pada link <https://bit.ly/AsetPengetahuan-2023> dengan data terlampir.
3. Para Kepala Perangkat Daerah telah memenuhi target sasaran khusus Perjanjian Kinerja TW III dan TW IV Tahun 2023 dengan sasaran Meningkatnya Manajemen Pengetahuan.

Demikian kami sampaikan, mohon arahan lebih lanjut.

Jakarta, 15 Desember 2023
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,


MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP-197812131997111001

Tembusan :
1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Surat Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Nomor e-0087/DL.01.00
 Tanggal 15 Desember 2023

**DAFTAR CAPAIAN TARGET SASARAN KHUSUS PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
 DENGAN SASARAN MENINGKATNYA MANAJEMEN PENGETAHUAN**

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
1	INSPEKTORAT	5	Video	Video Bus Anti Korupsi
			Video	SIMANTAB
			Video	E-Klinik
			Video	Audit Management System
			Video	Audit Konstruksi
2	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	4	Video	Kode Etik ASN Di Lingkungan Pemprov DKI Jakarta
			Video	video role model pimpinan
			Video	Sistem RegASN
3	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	4	Dokumen	Video Uji Kompetensi Pegawai
			Dokumen	Jurnal Demokrasi - Peningkatan Partisipasi Pemilih pada Pemilu 2024 - Agustus 2023
			Dokumen	Jurnal Demokrasi - Budaya Politik dalam Pemilu Serentak 2024 Desember 2023
			Dokumen	Jurnal Demokrasi - Elitika Politik Pada Pemilu Serentak 2024 - April 2023
			Dokumen	Jurnal Demokrasi - Ancaman Media Sosial di Pemilu Serentak 2024 - Oktober 2023

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
4	BADAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG JASA	5	Video	Tutorial Transaksi e-Order
			Video	E-katalog Penambahan Produk
			Dokumen	Pelatihan Kompetensi PPK Tipe C Model MOOC
			Dokumen	Pemenuhan JF PPBJ untuk kebutuhan Pejabat Pengadaan
			Video	Pendaftaran P.JLP dan Pengisian SIKAP
5	BADAN PEMBINAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH	5	Dokumen	Tata Cara Seleksi Calon Direksi BUMD
			Video	Pelayanan Ramah Disabilitas LRTJ
			Video	Rice process, from the field to your home
			Video	KEJAR (Satu Rekening Satu Pelajar) bertujuan untuk memperkenalkan budaya menabung sejak dini kepada pelajar
			Video	Hati-Hati Modus Penipuan Baru Berkedok Link Undangan Pernikahan
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	10	Dokumen	Edukasi BPBD DKI Jakarta - Waspada Dampak Cuaca Ekstrem
			Dokumen	Edukasi BPBD DKI Jakarta - Waspada Angin Kencang
			Dokumen	Edukasi BPBD DKI Jakarta - Serba - Serbi Gerakan Tanah atau Tanah Longsor
			Dokumen	Edukasi BPBD DKI Jakarta - Adaptasi dan Perubahan Iklim
			Dokumen	Dokumen KRB 2022-2025
			Video	Simulasi Gempa

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	8	Video	Pameran Jakarta Tangguh 2023
			Video	Layanan Dukungan Palkosostal (LDP)
			Video	HRB
			Video	Berita Kobencanaan
			Video	Video Alur Kerja Unit SA
			Video	Lapor Jual Kendaraan Bermotor Melalui Website https://pajakonline.jakarta.go.id
			Video	Perbedaan Laporan Jual Dengan Blokir Kendaraan
			Video	BPHTB DKI Jakarta 0% Nomor 23 Tahun 2023
8	BADAN PENGELOLAAN ASET DAERAH	4	Video	BBNKB Gratis Untuk Seluruh Warga Jakarta
			Video	Cari Tau Besar Pajak Hiburan Biar Ga Kelipu
			Video	Tutorial Pemecahan NOP PBE-P2
			Video	Cara Mengelola Aset Gak Sembarangin Loh, Begini Pedomannya!
			Video	BMD Rusak? Ajukan Pemeliharaan Awal
			Video	BMD boleh dipinjam_ Masa sht?
			Video	ASET DKI JAKARTA BISA DIHAPUS_ YUK SIMAK

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
9	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5	Video	tutorial penginputan pada e-harga
			Video	kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah
			Video	JAKI Pedo Dengan TTE
			Video	Proses Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
			Video	Inovasi Transformasi Layanan Perbendaharaan Daerah
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5	Video	Pembelajaran Tradisional Versus Digital
			Video	Pergeseran Peran Guru
			Video	Guru yang Melek Teknologi
			Video	Pentingnya Pembelajaran Digital
			Video	Tantangan dan Langkah Implementasi
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5	Video	Urban Health White Paper_ Pedoman Ampuh Menuju Kesehatan Publik Kota Jakarta Yang Tangguh
			Video	Podcast SENJA_ Kemiskinan Ekstrem. Apa itu dan apa saja upaya yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta
			Video	Partisipasi Anak Muda Pada Perencanaan Pembangunan
			Video	Mengapa Dokumen RPD itu penting
			Video	Cerita Perencana Bappeda DKI Jakarta_ Podcast SENJA

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
12	DINAS BINA MARGA	4	Video	Cara Mengproteksi Aduan Kebencanaan Hammor Test Peningkatan Aplikasi MCR Video Pengalihan Wadad Tracking Tutorial Pengalihan Pele Smart RDTR 2022
13	DINAS SIPA, MASYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN	5	Video	Peningkatan Intensitas Zone Pemukiman (Zona R) Peningkatan Bangunan Gedung Hiju Pengembangan Jakarta Satu Harian Layak - RDTR 2022 Video Integrasi Sejauh (BUPIK) Rumah Si Putih Musium Tekad Kebijakan Taman Depan
14	DINAS KEBUDAYAAN	4	Video	Kategori Penduduk yang akan di Nolekiskan Pencatatan Spil Aida Peckawinan di Kecamatan Pembaharuan Nomor Pada Alpakat
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	4	Video	Alur Registrasi Alpakat Bolewa

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
16	DINAS KESEHATAN	9	Video	Nutrisi penting yang perlu dipenuhi ibu hamil Seberapa tahu kah kalian tentang ISPA Strategi Gaya Hidup Pencegahan Kanker Stunting Tempelan Om-1s Pentingnya Imunisasi Hepatitis B pada Bayi Tipe Menjaga Kesehatan Jantung Tipe Berhenti Merokok Tipe Aktifitas Fisik untuk Anak & Remaja Usia 5-17 tahun Cara Sema Baik Sayuran Hidroponik & Konvensional Cara Pemeliharaan Ikan Lele Budidaya Ikan Cupang_Dinas KPKP Budidaya Belimbing Budidaya Maggot Budidaya Maggot RPUH Rawa Keping Puyenteswannah Tipe Aman Menggunakan Wf publik Cara deal clear screen fasal
17	DINAS KETAHANAN PANGAN, KELAUTAN DAN PERTANAHAN	6	Video	
18	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	4	Video	

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
19	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	11	Video	Kontribusi Sama Cipta Respon Masyarakat Sistem Pengalihan Kemat Aduan Warga Jakarta Tutorial Menginput Dilasat Pada Portal Satu Data Jakarta Uji Email SPPU-Kualitas Udara SPKU Pulauku Nol Sampah PISA INCLUB Sampah Pisah Sampahok Maggot - Insti Pihama Kolaborasi Kelola Sampah Jakarta Sedar Sampah Budidaya Maggot: efektif kurangi sampah organik Bank Sampah Video Promosi Destinasi Jakarta Video Kegiatan Kolaborasi dengan Abnon Jakarta Video Tata Cara Berwisata
20	DINAS PARAWISATA DAN EKONOMI KREATIF	6	Video	

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
21	DINAS PERBERSEKUTUAN, PERINDUSTRIAN, PERKAWANAN ANAK DAN PENGLIHAN PENDUDUK	4	Video	Tatacara pengurusan perijinan hotel dan liburan Profil Anggapan dan UPK PBB Pengalihan dan Pengalihan Pembinaan Stunting 1000 HPK Pembinaan KB Materi Pembelajaran 10 Dimensi Kesiapan Berkeluarga
22	DINAS PEMUDA DAN OLARAGA	4	Video	Pengalihan Cidara (DISFORA) SKJ Pelajar (DWP DISFORA) Profil DISFORA Sesam Pengalihan Tutorial JaleCo Panduan Live Chat MPP Virtual MPP Virtual update terbaru-1 Layanan Jakarta On TV Eps. 89
23	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	6	Dokumen	Buku Panduan Pelayanan Gera Memulai Usaha Buku Panduan Pelayanan Gera Memulai Usaha

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
24	DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	8	Video	Sosialisasi Pencegahan Kebakaran Pelatihan dan Simulasi Penanganan Kebakaran Materi Horizontal - Petugas Rescue Materi Horizontal - Lintang Bangunan Gedung dari Bencana Kebakaran Materi Horizontal - Kedis Kebakaran Medical First Responder Fire Fighter Challenge Petunjuk Pelaporan Damkar PPP Penyusunan Modul FS Perubahan Bales dan Merat Peserta Dak Perencanaan dan Pengembangan Peserta Dak Modul 6 Pemahaman Modul 1 Lintas dan Numerasi Membela Belajar Dinamika Perubahan Kurikulum RK (1) AKM Numerasi Penyusunan Modul Soal AKM
25	DINAS PENDIDIKAN	13	Dokumen	

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
26	DINAS PERHUBUNGAN	4	Video	Pengalihan Numerasi dalam Pembelajaran Matematika Analisis Soal dan CP Mata Pelajaran Platform Merdeka Mengajar Kejayaan AN dan Merdeka Belajar UP PBB Penguatung - Prosedur Pengalihan Mobil Listrik UP Angkutan Sekolah UPP Dibuat DKI Jakarta - E-Ticketing TV IV Jalur Sepeda Video Aset Pembelajaran TV IV Rabu Belajar Episode 06-Peran Metrologi dalam Perancangan Internasional Ute Pengalihan Metrologi - Dinas FPKUM Provinsi DKI Jakarta Ute Penanaman air Uter, Taker, Trubing, dan pelaksanaanannya Jalur - Unit Pengalihan Metrologi, Dinas FPKUM Provinsi DKI Jakarta Proses Pengalihan Sifat Pengalihan Pemas Baku Baku Bergabungnya Utara dengan Proses Aducat Tantangan Esca Jakarta Festival Literasi Jakarta IGA Jalditara
27	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	4	Video	
28	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN	6	Video	

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
			Video	Penilaian Kawasan Kelurahan Kebangsaan Selatan
			Video	Aplikasi Sabot Lurah Kelurahan Sumanan
			Video	Pengoptimalan Data Bata Di Proyandi Melalui Aplikasi Whatsapp
			Video	Pengoptimalan Laporan Melalui Aplikasi JAKI
36	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	9	Video	Melakukan Sajian Masjid Jam'i Angke
			Video	Gerbang Tertutup di Kecamatan Tamanari
			Video	Mengenal Wakor Farm Jakarta Barat
			Video	Pasar Bangor Rawa Sobong Mempunyai Pasar Bangor Terbesar di Asia Tenggara
			Video	Ruang Konsultasi Publik Kelurahan Grogol
			Video	Video Paparan Smarting 2023 revisi
			Video	Proyandu Bata Campaka 7 Petri Selatan Gambar
37	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	4	Video	Fitur Baru Sumpah Kereta Jati Kereta Canggih
			Video	Fitur Pengiri Kayu Es him di Kelurahan Cibi (Feature)
			Video	Pala Adipura Jakarta Selatan
			Video	Buku Panduan Digital Layanan Administrasi Kepegawaian Selko Kota Adm. Jakarta Selatan
38	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	4	Video	PATAL TRANSNIEL (Pengoptimalan Data Digital Terintegrasi Antar Sekt) Kel. Rawa Barat Kota Adm. Jakarta Selatan
			Video	SINCO DATIN

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
			Video	Aplikasi SINARJU - Bangir Rob
			Video	Pembangunan JSS Zona 1 Paket 5 dan 6
			Video	Membuat Etik Double Exposure di Photoshop
			Video	Menghargai background foto menggunakan quick selection tool
33	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, DAN ENERGI	5	Video	Productivity Talk: Mengenal Alat, Teknik dan Metode Pengembangan Produktivitas
			Video	Productivity Talk: Kualitas, Salah Satu Unsur Penting Untuk Meningkatkan Produktivitas Utama Anda
			Video	Melanisme Penyelesaian Permasalahan Hubungan Industrial Kaah Jatin Adu Dong IIII Marfaat Trobar yang Terb
			Video	Mari Jaga kebersihan Sungai Kita
			Video	Video Kawasan Dilingk Merak
			Video	Video Kembalikan Fungai Trobar
			Video	Ayo Rawat Bersama JPO Milk Kota
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	5	Video	Video Kawasan Dilingk Merak
			Video	Video Kembalikan Fungai Trobar
			Video	Ayo Rawat Bersama JPO Milk Kota
			Video	Aset Pengitahuan - Penyusunan Laporan di DPRD
			Video	Aset Pengitahuan - DPRD
			Video	Aset Pengitahuan - ADO Komisi
			Video	Aset Pengitahuan - Komisi ASCODE DPRD
35	SEKRETARIAT DAERAH PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	4	Video	Penilaian Kegiatan dan Pemantauan Tingkat Lanjut Surat Untuk Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
			Dokumen	Guide Book Pengitahuan dan Pemantauan Kegiatan (Edisi 2023)
			Video	Keputusan Informasi Publik Biro Kepala Daerah Sda Provinsi DKI Jakarta
			Video	Pelaksanaan Optimalisasi Penyusunan Materi dan Sambutan Pimpinan 10-11 Juni 2022
			Video	Pelaksanaan Tela Naskah Dinas dan Pengoptimalan Atap 2 November 2023
			Dokumen	Langkah-Langkah Layanan Pengitahuan dan Penaklukan
			Dokumen	Guide Book Pengitahuan dan Pemantauan Kegiatan (Edisi 2023)
			Video	Video Kerja Sama
			Video	Video Promo KTT ASEAN 2023
			Video	Pameran Foto ASEAN
			Video	Marathon
			Video	Jakarta Half Marathon
			Video	ASEAN Goes To School
			Video	Video Tim Percepatan Penurunan Suring
			Video	Video Salpa Percepatan Penurunan Suring
			Video	Penyusunan dan evaluasi pelayanan ambulans

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
			Video	ENKAPSULASI ARSIP
			Video	Anip Foto Masjid
			Video	Final Video Anip Tenda Bencana
			Video	Pembayaran Tanaman Kebun Bata Strengeang
			Video	Berdifitansi
			Video	Tutoriel Membuat Kokedina
			Video	Pengoptimalan Kondisi Kesehatan Pohon di Jakarta_100ip
			Video	Bipori (Video Pembelajaran DPRD)
30	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERUMAHAN	4	Video	Hutan Tangkai Mik (Video Pembelajaran DPRD)
			Video	Pengoptimalan Aset dan Pengadaan Tanah
			Video	Pengoptimalan Fasilitas dan Layanan Rumah Susun
			Video	Peningkatan FPKS di DKI Jakarta Dilakukan Secara Penuasif
			Video	Syarat Pengajuan ASB (Abit Baru Fik)
31	DINAS SOSIAL	4	Video	Mengenal Ragam Pant Sosial di Provinsi DKI Jakarta
			Video	Cari Tahu Yuk, Tata Cara Pengangkutan Auk!
			Video	Ruang Lingsih Sangat Video
			Video	Zona Bebas At Tanah_REV

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
			Video	Paparan video pak bupati
			Video	Delapan Pemukiman Kampung Belas Asap Rokok Kayu
			Video	Teknologi Kerja Managemen Penabahan SPBE
46	BIRO ORGANISASI DAN REFORMASI BIROKRASI	4	Video	Optimalisasi Pengoptimalan Kemastanangan Organisasi Pemerintah Daerah Pro DKI Jakarta
			Video	Verifikasi Arsitektur SPBE
			Video	Analisis Beban Kerja
			Video	Pelatihan Pemenuhan Kewajiban
			Video	Penjelasan Umum Pemaksimalan Perumahan
47	BIRO PEMBANGUNAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	4	Video	Penanganan Pemaksimalan Perumahan
			Video	Presentation of Public Space & Housing Zulkli
			Dokumen	Tata Cara Melapor
			Dokumen	Peraturan Kawasan
			Dokumen	Logi Kota
			Dokumen	Konk
			Video	Video Aset Pengitahuan Biro Dimeras
			Video	Rekamten Pelagra Hg Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 1444 H
48	BIRO PEMERINTAHAN	4	Video	Video Pengitahuan Temang Moner KPK
			Video	Video Penyusunan Kebijakan Kelompok Pendidikan

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
			Video	Penilaian Kegiatan dan Pemantauan Tingkat Lanjut Surat Untuk Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta
			Dokumen	Guide Book Pengitahuan dan Pemantauan Kegiatan (Edisi 2023)
			Video	Keputusan Informasi Publik Biro Kepala Daerah Sda Provinsi DKI Jakarta
43	BIRO KEPALA DAERAH	7	Video	Pelaksanaan Optimalisasi Penyusunan Materi dan Sambutan Pimpinan 10-11 Juni 2022
			Video	Pelaksanaan Tela Naskah Dinas dan Pengoptimalan Atap 2 November 2023
			Dokumen	Langkah-Langkah Layanan Pengitahuan dan Penaklukan
			Dokumen	Guide Book Pengitahuan dan Pemantauan Kegiatan (Edisi 2023)
			Video	Video Kerja Sama
			Video	Video Promo KTT ASEAN 2023
			Video	Pameran Foto ASEAN
			Video	Marathon
			Video	Jakarta Half Marathon
			Video	ASEAN Goes To School
			Video	Video Tim Percepatan Penurunan Suring
			Video	Video Salpa Percepatan Penurunan Suring
			Video	Penyusunan dan evaluasi pelayanan ambulans
44	BIRO KERJA SAMA DAERAH	6	Video	ASEAN Goes To School
			Video	Video Tim Percepatan Penurunan Suring
			Video	Video Salpa Percepatan Penurunan Suring
			Video	Penyusunan dan evaluasi pelayanan ambulans
45	BIRO KESEJAHTERAAN SOSIAL	5	Video	Penyusunan dan evaluasi pelayanan ambulans

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
			Video	Presiden Jokowi Resmikan Soudan Kali Cawang ke KBT
			Video	Pengalaman Wajan Baru Tempat Wisata TMI
39	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	5	Video	Penataan Kawasan di Berbagai Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur
			Video	Penyusunan Somer Respon Ormasan Lapangan Warga Jakarta Timur
			Video	3 Jenis Tanaman Indoor Terbaik
			Video	Batik Mandala
			Video	Kunjungan Mangrove Muara Angke
40	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	4	Video	Prodiin Suster Jaya
			Video	Profil Penghargaan Dua
			Video	Pembuatan SIK Cumi Kepulauan Seribu
			Video	Kabupaten Kepulauan Seribu Promosikan Pantai Samudra
41	SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU	4	Video	Penghargaan Anugrah Desa Wisata Pulau Kelapa
			Video	Selanjut Sngkat Kepulauan Seribu
			Dokumen	Tatap pembentukan kopukusan gubernur (kegabat)
			Dokumen	ALLUR FKS - on progress
42	BIRO HUKUM	4	Video	Video Pembelajaran Biro Hukum, Tindakan Pembentukan Kriggab
			Dokumen	Pembentukan Kelurahan Sader Hukum

No.	SKPD/OPD	JUMLAH ASET	FORMAT ASET	KONTEN
50	BIRO PEREKONOMIAN DAN KEUANGAN	9	Dokumen	Laporan TPID Triwulan IV-2021
			Dokumen	Laporan TPID Triwulan III-2022
			Dokumen	Laporan TPID Triwulan I-2022
			Dokumen	Laporan TPID Triwulan I Tahun 2023
			Dokumen	Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan I 2021 Final
			Dokumen	Buku Laporan TPID TW IV 2022
			Dokumen	2022-08-01 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan II 2022
			Dokumen	2021-09-30 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan III 2021
			Dokumen	2021-06-30 - Laporan TPID Prov DKI Jakarta - Triwulan II 2021
51	BIRO UMUM DAN ADMINISTRASI SEKRETARIAT DAERAH	4	Video	Aset Pengetahuan Konten Pembelajaran Cara Memakai Kloset
			Video	Aset Pengetahuan Bank Sampah Balaikota
			Video	Pendingin Ruangan Yang Sejukkan Balaikota DKI Jakarta
			Video	Pemanfaatan Air Limbah di Balaikota DKI Jakarta

Jakarta, 15 Desember 2023
 Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 Provinsi DKI Jakarta,

 MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
 NIP 197812131997111001

Gambar 8.
 Laporan Manajemen Pengetahuan

- j. Penyusunan modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah Tahun 2023
 Tersedianya 1 (satu) modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah, dalam KSD ini memiliki 2 (dua) rencana aksi yaitu:
- Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi penyandang disabilitas dengan kriteria keberhasilannya adalah tersedianya modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah yang dilaksanakan pada B03.
 - Penyediaan Lingkungan Tanpa Hambatan Bagi Penyandang Disabilitas dengan kriteria keberhasilannya adalah Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas sensitivitas disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan pada B09.

Tabel 25.
 Dokumen Modul/Kurikulum Pelatihan Disabilitas Bagi ASN
 Provinsi DKI Jakarta

No	Periode	Target Capaian	Target	Realisasi	Keterangan
1.	B03	Tersedianya 1 (satu) modul/ kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah	100%	100%	Tersedianya modul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah
2.	B09	120 (seratus dua puluh) Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki kapasitas sensitivitas disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik	100%	100%	Tersusunnya Laporan 153 Aparatur Sipil Negara yang telah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik

Capaian BPSDM Provinsi DKI Jakarta pada indikator KSD ini mencapai 100%, hal ini dikarenakan BPSDM berhasil dalam:

- Menyediakan 1 (satu) dokumen modul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah;
- 120 (seratus dua puluh) Aparatur Sipil Negara telah mengikuti pelatihan sensitivitas disabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

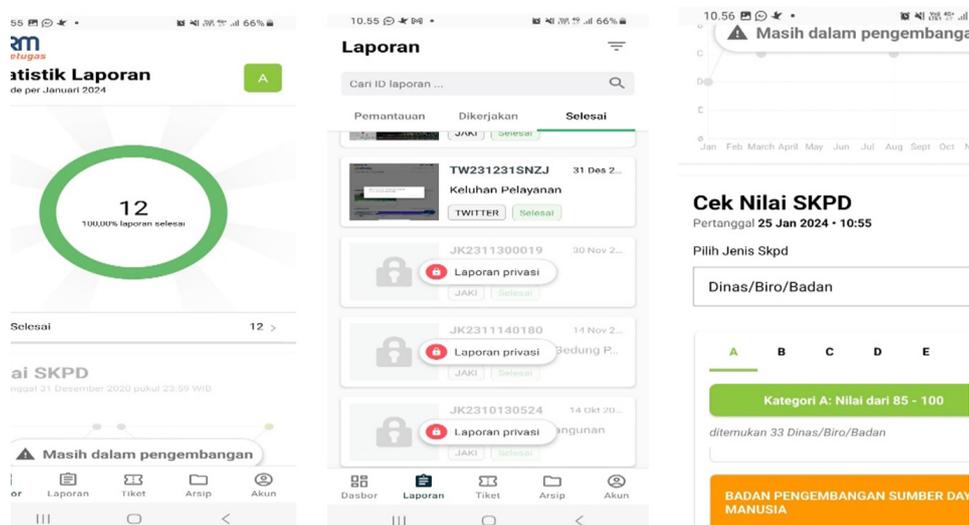
c) Capaian Sasaran Operasional

a. Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur (target 100%, realisasi 100%) Persentase ini menilai Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, eoffice, arahan melalui media elektronik, dan arahan lain) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%. Nilai realisasi BPSDM adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah di tindak lanjuti sebanyak 1 (satu) arahan Gubernur baik yang bersifat Informasi maupun yang membutuhkan tindak lanjut dan (100%).

Tabel 26.
Realisasi TL Arahan Gubernur

ID Arahan	Tanggal	Isi Arahan	Target Selesai	Status TL	Status Validasi
5431	27 September 2023	Perangkat Daerah Yang Memiliki Lahan Yang tidak terpakai dapat menawarkan kepada perangkat daerah lain untuk dimanfaatkan	17 November 2023	Selesai	Valid

b. Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat (Target 100%, Ralisasi 100%) Perhitungan kinerja dalam indikator ini dengan menghitung Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%, sampai dengan saat ini seluruh aduan masyarakat telah ditindak lanjuti, sehingga dapat dikatakan apabila capaian kinerja sebesar 100%. Aduan masyarakat berasal dari berbagai macam chanel yang dimiliki BPSDM antara lain Email, Facebook, JAKI dan Twitter yang selesai ditindaklanjuti TL Aduan Masyarakat pada Tahun 2023 dan telah diselesaikan dari jumlah total Aduan sebanyak 19 Laporan, akan tetapi hanya terdapat 3 laporan kesesuaian dengan BPSDM dan tidak sesuai sebanyak 16 Laporan dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 27.
Realisasi TL Aduan Masyarakat

Email	JAKI	Twitter	Jumlah Masuk	Ketidaksesuaian Laporan	Realisasi Kesesuaian Laporan	Status
1	17	1	19	16 Laporan	3 laporan	Selsesai

c. Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)

Merupakan pelaksanaan Sasaran Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK), dengan penghitungan kinerja 90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkat Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektorat) Nilai realisasi BPSDM adalah 100%. Capaian operasional pada indikator ini telah mencapai 100%, adapun TL yang telah di tindak lanjut sebanyak 2 (dua) LHP yang telah ditindaklanjuti sesuai dengan Berita Acara Rencana Kinerja Kepala Perangkat Daerah Penyelesaian TLHP BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

3. Capaian Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

Indikator yang pertama yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM pada sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi Masyarakat.

Indikator yang kedua yaitu Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas ASN pada sasaran strategis tahun 2023 merupakan Tujuan dari BPSDM Provinsi DKI yaitu pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan knowledge management dengan Sasaran Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi Masyarakat.

Berikut Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran Sasaran Strategis tahun 2023 dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 28.
Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Kinerja	Kondisi Kinerja Awal RPD	Capaian Kinerja Program					
			Kinerja 2022			Kinerja 2023		
			Target	Capaian Target	Tingkat Capaian	Target	Capaian Target	Tingkat Capaian
1.	Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	31	30,97	335,5	Melebihi Target	31	38	Melebihi Target
2.	Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas ASN	38,7	36	38,13	Melebihi Target	38,7	Data Belum Rilis (DBR)	

Tabel 29.
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2023 Dengan Tahun Sebelumnya

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan					
				Anggaran 2022			Anggaran 2023		
				APBD	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian	APBD	Realisasi Anggaran	Tingkat Capaian
1	Pengembangan kompetensi melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan <i>knowledge management</i>	Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat	Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM	-	-	-	50.454.725.730	41.726.714.990	82,70
			Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas ASN	-	-	-	37.090.976.684	32.635.700.385	87,99

4. Capaian Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Berikut capaian Indeks Sistem Merit beberapa Pemerintah Daerah tahun 2022 hasil penilaian Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang diumumkan dalam laporan tahunan KASN yang dipublikasikan melalui website KASN :

Tabel 30
Laporan Tahunan KASN

No	Pemerintah Daerah	Predikat
1	Pemerintah Provinsi Jawa Barat	396.5
2	Pemerintah Provinsi Bali	386.5
3	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	353
4	Pemerintah Provinsi DIY	349
5	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	340.5
6	Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan	337.5
7	Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	335.5
8	Pemerintah Provinsi Sumatera Utara	335.5
9	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	332
10	Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur	331

Sumber : Laporan Tahunan KASN, website KASN

5. Analisis Penyebab Keberhasilan Serta Alternatif Solusi

Keberhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, antara lain:

- Desain program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan ASN dan berbasis pada perkembangan terkini dapat meningkatkan daya tarik peserta dan keterlibatan aktif mereka;
- Keberhasilan juga terletak pada penggunaan metode pengajaran yang inovatif dan teknologi informasi untuk memperkaya pengalaman belajar;
- Kualitas pengajar dan fasilitator menjadi faktor kunci. Mereka harus memiliki kompetensi yang tinggi, pengalaman yang relevan, serta kemampuan berkomunikasi yang efektif untuk memberikan dampak positif pada peserta.
- Dukungan dan pemantauan yang cermat terhadap kinerja pengajar juga dapat meningkatkan kualitas pengajaran dan meningkatkan keberhasilan program pelatihan.
- Gedung BPSDM yang belum dikelola secara mandiri dalam rangka integrasi dan percepatan konektivitas antar penyelenggara diklat dan narasumber, pengajar dan pihak ketiga lainnya.
- Merencanakan kegiatan pengembangan JakCorpU untuk dapat diimplementasikan secara penuh dan berdampak dalam peningkatan kinerja pegawai pemerintah provinsi DKI Jakarta yang selaras dengan

tujuan strategis pimpinan tertinggi.

- g. Pendekatan dan pencarian data pendukung ke OPD secara terus menerus yang menaungi JFT tertentu serta membuka koordinasi dengan instansi pembina JFT untuk mendapatkan arahan terkait metode uji kompetensi dan penjadwalan kegiatan.

Namun, seiring dengan keberhasilan tersebut, beberapa tantangan dapat muncul. Dalam konteks ini, alternatif solusi antara lain:

- a. Implementasi evaluasi program yang menyeluruh dan terjadwal;
- b. Mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan memastikan kesesuaian program dengan kebutuhan actual;
- c. Peningkatan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan industri juga dapat menjadi solusi efektif untuk mengakomodasi tren dan kebutuhan kompetensi yang terus berubah di lingkungan kerja;
- d. Pendekatan partisipatif dengan melibatkan para peserta dalam perencanaan dan penilaian program diklat dapat meningkatkan rasa memiliki dan motivasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Hasil yang telah disampaikan pada realisasi Sasaran Strategis diatas, dapat disimpulkan bahwa BPSDM Provinsi DKI Jakarta dikatakan berhasil dalam mencapai target yang telah ditentukan dalam pencapaian Tujuan dan Sasaran Organisasi, terdapat beberapa faktor yang menunjang keberhasilan antara lain:

1. Tersampainya Tujuan dan Sasaran Organisasi, hal ini dibuktikan dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja sampai dengan tingkat pelaksana;
2. Disediaknya Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan, dibuktikan dengan adanya Anggaran yang mencukupi untuk pelaksanaan pelatihan tersebut;
3. Program dan kegiatan penunjang layanan terealisasi dengan baik. Program dan kegiatan serta pagu yang mendukung sasaran Indikator Kinerja Kunci BPSDM yaitu Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM dan yang kedua Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada indeks profesionalitas ASN yang realisasinya jauh diatas target yang ditetapkan;
4. Kegiatan Strategis Daerah (KSD) sangat membantu BPSDM dalam mencapai berapa target indikator Tujuan dan Sasaran, antara lain:
 - a. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu Laporan Hasil Kajian Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meliputi perencanaan 4 tahun dan implementasi pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - b. KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional dengan target yaitu 1 dokumen modul/kurikulum pelatihan sensitivitas disabilitas dalam program pendidikan dan pelatihan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah pada Sub Kegiatan Strategis Daerah Transformasi Digital
5. Faktor pendukung keberhasilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, salah satunya adalah inovasi yang telah mendapatkan penghargaan atas inovasi yang diberikan antara lain:

- a. Pada Kamis, 21 Desember 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 sebagai Badan Publik "Informatif" dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Balaikota, DKI Jakarta. Piagam ini di diberikan langsung oleh Bapak Harry Ara Hutabarat, S.H., M.H, selaku Ketua Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan diterima oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan adanya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat terus meningkatkan kepatuhan terkait implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No 14 tahun 2008.





b. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah memperoleh Akreditasi dengan predikat A sebagai Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Terakreditasi di Bidang Teknis Penanggulangan Bencana dalam Menyelenggarakan Program Pendidikan dan Pelatihan Dasar Manajemen Bencana. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan oleh Bapak Dr. Rustian, S.Si., Apt., M.Kes. selaku Sekretaris Utama BNPB kepada BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang diwakili oleh Bapak Achmad Zaki Syafii selaku Kepala Bidang Penjaminan Mutu, Tugas Belajar dan Sertifikasi Kompetensi di DoubleTree by Hilton Hotel pada tanggal 17 November 2023. Semoga dengan adanya penghargaan ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.



c. Pada Senin, 27 November 2023 BPSDM Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sebagai salah satu Lembaga Pendidikan yang bekerja sama dalam penyelenggaraan Kegiatan Akselerasi Pelatihan Struktural Kepemimpinan Pegawai (PKA/PKP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, pada 23 Lembaga Pendidikan K/L/Prov di Seluruh Indonesia Tahun 2023, dengan Nomor Penghargaan: M.HH-14.KP.05.03 Tahun 2023. Piagam ini di diberikan langsung oleh Bapak Prof. Yasonna H. Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D., Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dan diterima oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Semoga dengan adanya penghargaan ini BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat terus meningkatkan kualitas sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan professional.



d. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta yang telah memperoleh penghargaan terbaik III sebagai Lembaga Pelatihan Pemerintah Berprestasi Tahun 2023 kategori Adaptive Learning Strategy dengan Tema Pengembangan Metode dan Bentuk Pengembangan Kompetensi Non Klasikal Kategori Pemerintah Daerah, pada kegiatan LAN Award Penghargaan Makarti Bhakti Nagari yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Penyerahan penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala Lembaga Administrasi Negara Bapak Dr. Adi Suryanto, M.Si. kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc di Ruang Aula Prof. Agus Dwiyanto, Gedung A, Lt. 2, Kantor Lembaga Administrasi Negara pada tanggal 8 Agustus 2023. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang telah terlibat, semoga adanya penghargaan ini dapat membangkitkan semangat untuk terus berinovasi dalam memajukan kompetensi ASN dan masyarakat di Indonesia.



- e. Selamat dan sukses untuk BPSDM Provinsi DKI Jakarta atas penerimaan sertifikat ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan SMAP. BPSDM Provinsi DKI Jakarta terus memperkuat tata kelola organisasi dengan memastikan penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuaan (SMAP) berjalan dengan baik pada seluruh operasional Organisasi. Langkah ini merupakan upaya perusahaan untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance dan pencegahan tindak pidana korupsi di organisasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Dengan diterimanya sertifikat ISO 37001:2016 SMAP, BPSDM Provinsi DKI Jakarta telah menunjukkan komitmennya untuk menjadi organisasi yang bersih dari korupsi. Semoga keberhasilan ini dapat menjadi motivasi bagi organisasi lain untuk menerapkan SMAP dan turut serta dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (SDM) Dan (Anggaran)

Dalam penggunaan sumber daya baik manusia (SDM) dengan kontingen 106 PNS dan anggaran di BPSDM Provinsi DKI Jakarta, menggambarkan strategi manajemen SDM yang cermat dan responsif terhadap kebutuhan organisasi. Dalam realitas dinamika lingkungan pemerintahan dan pelatihan, jumlah PNS yang seimbang dengan tugas dan tanggung jawab BPSDM memberikan gambaran akan pemilihan SDM yang tepat. Proporsionalitas ini menandakan pendekatan manajemen SDM yang cerdas, memungkinkan BPSDM untuk menjalankan fungsi-fungsinya yang telah diberikan walaupun masih terdapat kekurangan pegawai tetapi dapat memaksimalkan potensi yang ada dengan menciptakan efisiensi tanpa mengorbankan kualitas dengan memanfaatkan semaksimal mungkin terhadap anggaran yang tersedia.

Diversitas keterampilan dan kompetensi para PNS yang menjadi tulang punggung BPSDM bukan hanya memberikan efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga menjadi nilai tambah dalam efisiensi anggaran. Pendekatan cerdas dalam penyebaran tugas sesuai dengan keahlian masing-masing individu menciptakan sinergi yang menghasilkan kinerja optimal dalam pelatihan dan pengembangan SDM, sambil tetap meminimalkan biaya operasional.

Program pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023, selain memberikan dampak positif terhadap efisiensi waktu, juga mengindikasikan penggunaan anggaran yang bijak. Dengan memberikan ruang bagi setiap PNS untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan mereka, BPSDM tidak hanya mencapai efisiensi dalam pengelolaan SDM, tetapi juga memastikan bahwa setiap investasi anggaran memiliki dampak nyata dalam peningkatan kualitas SDM.

Dengan mengintegrasikan efisiensi pengelolaan SDM, diversifikasi keterampilan, program pengembangan kompetensi yang bijak, dan manajemen anggaran yang cerdas, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menciptakan pola yang sinergis dan komprehensif dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ini bukan hanya mencerminkan keberhasilan operasional yang optimal, tetapi juga berdampak positif dalam pencapaian tujuan strategis BPSDM sebagai lembaga pelatihan dan pengembangan SDM.

7. Analisis Program dan Kegiatan serta Sub Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program dan kegiatan, termasuk sub kegiatan, di BPSDM Provinsi DKI Jakarta menjadi penentu utama keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian pernyataan kinerja. Pertama, program pengembangan kompetensi selama 20 jam pelajaran pada tahun 2023 menjadi poin kunci. Keberhasilan program ini dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas SDM di Provinsi DKI Jakarta. Namun, evaluasi dan pengawasan yang kurang ketat dalam pelaksanaannya dapat menjadi faktor

kegagalan, menghambat potensi pencapaian yang optimal.

Pentingnya manajemen pengetahuan juga terlihat dalam program dan kegiatan BPSDM. Keterse-diaan pengetahuan yang terdokumentasi dan mudah diakses dapat memberikan dorongan signifikan terhadap keberhasilan pelatihan dan pengembangan. Sebaliknya, kegagalan dalam menciptakan bu-daya berbagi pengetahuan atau implementasi sistem manajemen pengetahuan yang kurang responsif dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran.

Efisiensi penggunaan anggaran menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan program dan kegiatan. Program pengembangan kompetensi, inventarisasi barang, dan manajemen pengetahuan membutuhkan alokasi anggaran yang proporsional. Keberhasilan program-program tersebut terkait erat dengan pengelolaan anggaran yang bijak dan responsif terhadap kebutuhan aktual.

Terakhir, keberhasilan atau kegagalan dalam kolaborasi dengan SKPD lainnya dan keterlibatan BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) menjadi penentu signifikan. Kerjasama yang efektif dan terlibat dalam keberhasilan KSD yang menjadi tanggung jawab SKPD lainnya dapat mencip-takan sinergi yang mendukung pencapaian pernyataan kinerja. Sebaliknya, ketidakpartisipan atau ku-rangnya kolaborasi dapat menjadi hambatan signifikan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta.

Secara keseluruhan, keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja di BPSDM Provinsi DKI Jakarta sangat tergantung pada efektivitas program dan kegiatan yang dijalankan, serta kemam-puannya dalam mengatasi potensi hambatan dan tantangan yang muncul. Evaluasi menyeluruh terha-dap aspek-aspek tersebut menjadi kunci untuk mengoptimalkan kontribusi BPSDM dalam mendukung pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

8. Rencana Kedepan Guna Meningkatkan Capaian

Untuk meningkatkan capaian kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta ke depan, diperlukan rencana aksi yang komprehensif dan terstruktur, Guna mengoptimalkan capaian Indeks Sistem Merit Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke depan mempunyai beberapa rencana aksi yang terdiri dari :

Tabel 31.
Rencana Aksi Tahun 2024

No	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi 2024	Target
1	Indeks sistem merit pada aspek dan sub aspek lingkup BPSDM	RA1. Penyusunan Grand Design Kelembagaan serta Dukungan Kepegawaian dan Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global	T/O1. Dokumen Perencanaan Pengembangan Kompetensi ASN berbasis Corporate University Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Menuju Kota Global
		RA2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	T/O2.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai

No	Kegiatan Strategis Daerah	Rencana Aksi 2024	Target
		RA2. Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	T/O2.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai
2	Peningkatan Profesionalitas dan Kinerja Aparatur Sipil Negara	Pelaksanaan Evaluasi Implementasi SAKIP Seluruh Perangkat Daerah	Laporan hasil monitoring penyelesaian rekomendasi hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023
3	Peningkatan Profesionalitas SDMPemprov DKI Jakarta	RA1. Penyediaan lingkungan tanpa hambatan bagi Penyandang Disabilitas	T/O1.1. Surat Edaran akses materi e-learning terkait sensitivitas penyandang disabilitas kepada Perangkat Daerah T/O1.2. Tersedianya 40% pegawai pemprov DKI Jakarta yang mengakses materi e- learning terkait sensitivitas penyandang Disabilitas
		RA2.1. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi	T/O2.1. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi untuk mencapai IP ASN dengan Pengelola Kepegawaian
		RA2.2. Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi	T/O2.2. Tersedianya Laporan Pelaksanaan Rapat koordinasi Pengembangan Kompetensi untuk mencapai IP ASN dengan Pengelola Kepegawaian

Adapun rencana aksi pengembangan kompetensi yang perlu dipertimbangkan kedepan antara lain: Pertama, dalam hal pengembangan kompetensi, BPSDM Provinsi DKI Jakarta akan mempertimbangkan perluasan dan diversifikasi program pelatihan. Menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan terkini dan menjangkau berbagai lapisan ASN dapat meningkatkan dampak positif pada pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

Kedua, peningkatan teknologi informasi. Penggunaan sistem yang terotomatisasi dapat mempermudah pelaksanaan, pelaporan, pemantauan secara efisien. Selain itu, penerapan teknologi dapat meningkatkan akurasi data dan meminimalkan risiko kesalahan serta mempercepat layanan yang diberikan.

Pada sisi manajemen pengetahuan, memperkuat budaya berbagi pengetahuan dan meningkatkan aksesibilitas informasi dapat diwujudkan melalui platform digital. Pembentukan forum diskusi, basis data pengetahuan, dan pelibatan aktif OPD dan ASN dalam pengembangan inovasi dapat menjadi langkah-langkah strategis. Peningkatan sumber daya dan infrastruktur teknologi informasi akan menjadi investasi yang krusial untuk mencapai tujuan ini.

Efisiensi anggaran dapat ditingkatkan dengan menyusun kebijakan pengelolaan keuangan yang lebih terinci dan responsif. Evaluasi rutin terhadap alokasi anggaran, pemantauan terhadap penggunaan dana, dan penyesuaian strategis sesuai kebutuhan aktual dapat membantu mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia.

Terakhir, kolaborasi dengan SKPD lainnya dan partisipasi dalam Kegiatan Strategis Daerah (KSD) dapat ditingkatkan melalui pembentukan tim lintas-sektor. Membuat perjanjian kerjasama yang jelas dan mengidentifikasi tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan strategis akan memperkuat sinergi dan dampak positif terhadap kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Peningkatan komunikasi dan koordinasi antarlembaga juga dapat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai tujuan bersama.

Rencana aksi ini haruslah disusun secara berkelanjutan, melibatkan *stakeholder* internal dan eksternal, serta mempertimbangkan evaluasi berkala untuk memastikan implementasi yang efektif. Dengan mengadopsi langkah-langkah ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memastikan peningkatan berkelanjutan dalam mendukung pengembangan SDM di Provinsi DKI Jakarta.

BPSDM juga telah menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP dan PMPRB Tahun 2022 dengan diterbitkannya Berita Acara hasil Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP dan PMPRB pada tahun 2023 sebagaimana terlampir:

**BERITA ACARA PENYELESAIAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP DAN PMPRB TAHUN 2022
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA**

Bersama ini kami sampaikan progres penyelesaian TLHE SAKIP dan PMPRB Tahun 2022

Tindak Lanjut PMPRB

No	Rekomendasi Evaluasi PMPRB	Tindak lanjut Hasil evaluasi	Telah Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Menyusun dokumen Rencana Kerja Tim Reformasi Birokrasi sekaligus mensosialisasikan kepada seluruh jajarannya;	- SK Tim Reformasi Birokrasi - Rencana Kerja RB	v		
2	Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja tim reformasi birokrasi serta tindaklanjutnya secara berkala dan melaporkannya kepada Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;	Monev Kegiatan Triwulan	v		
3	Melakukan pembentukan agent of change/role model yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;	SK Kepala Badan tentang Agent of Change	v		
4	Melakukan harmonisasi kebijakan yang ada terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;	- Pergub Perencanaan terintegrasi - Kpgub JakCorpu - Insekda Sijule	v		
5	Membuat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi, Implementasi SPBE, menyusun Proses Bisnis serta membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian pelayanan sehingga dapat mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, dan terintegrasi;	Laporan SPBE	v		
6	Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi SDM;	Peta Bangkom 2022	v		
7	Menerapkan pelaksanaan penanganan gratifikasi serta melakukan tindak lanjut serta evaluasi penanganan gratifikasi;	Saluran WBS dalam Website	v		
8	Menyusun Peta Proses Bisnis;	Proses Bisnis BPSDM	v		
9	Membuat SOP pelayanan dan kebijakan pemberian penghargaan serta sanksi atas pemberian pelayanan;	- Penghargaan Pegawai - SK SOP pemberian penghargaan	v		
10	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan mempublikasikan Hasil survei kepuasan masyarakat;	Laporan Evaluasi Kepuasan Peserta	v		
11	Menerapkan SPIP secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dengan:				

No	Rekomendasi Evaluasi PMPRB	Tindak lanjut Hasil evaluasi	Telah Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
a	menyusun SK TIM SPIP dan menginformasikan serta dikomunikasikan pada semua unit sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 153 Tahun 2021;	SK SPIP	v		
b	melakukan identifikasi risiko pada seluruh lingkungan pengendalian,	Identifikasi risiko	v		
12	Melakukan evaluasi terkait penanganan Benturan Kepentingan dan melakukan tindak lanjut atas hasil evaluasi tersebut	Laporan Evaluasi	v		

Tindak Lanjut SAKIP

No	Rekomendasi Evaluasi SAKIP	Tindak lanjut Hasil evaluasi	Telah Sesuai	Tidak Sesuai	Keterangan
1	Menindaklanjuti rekomendasi dan saran yang ada di LKIP setiap tahunnya untuk evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja, penyesuaian kinerja yang akan dihadapi berikutnya, dan dapat mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi	LAKIP 2022	v		
2	Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Internal secara berjenjang pada tahun 2023 dengan membuat SK Tim/Surat Tugas dalam kaitan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal BPSDM	SK Tim Evaluasi SAKIP	v		

Petugas Verifikator
Pemantauan Tindak Lanjut



Fadhlansyah Sukmana
NIP. 199012172020121010

Jakarta, 10 Juli 2023,
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta



Mochamad Miftahulloh Tamary
NIP. 197812131997111001



Budi Raharjo
NIP. 19811028201001131

Pengendali Teknis



Maria Roseta
NIP. 196808111993032005



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang** :
- bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, perlu adanya penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah;
 - bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah provinsi DKI Jakarta perlu dilakukan evaluasi;
 - bahwa dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat dalam Evaluasi pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c perlu menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA TENTANG PENETAPAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
- KESATU** : Menetapkan Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- KEDUA** : Struktur dan Tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :
- Ketua, memiliki tugas memimpin dan memastikan pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilaksanakan sesuai prosedur dan penuh tanggung jawab;
 - Sekretaris, memiliki tugas mengkoordinir Tim dalam pengumpulan data dan informasi, proses penelaahan dan evaluasi kinerja, pemberian rekomendasi hasil evaluasi internal dan hasil evaluasi APJP, penyusunan dan penyampaian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal kepada APJP;
 - Anggota; memiliki tugas melakukan perencanaan kerja dan anggaran, monitoring capaian kinerja dan serapan anggaran, pengendalian hambatan kerja, dan melaporkan kinerja secara berkala pada masing-masing bidang dan unit pelaksana tugas dengan penuh tanggung jawab;
 - Anggota Sekretariat; memiliki tugas mengumpulkan data dan informasi, menelaah dan mengevaluasi kinerja, memberikan usulan rekomendasi evaluasi internal, serta menyusun laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini agar dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan, serta berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2023

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,

MOCHAMAD MIFTAHULLOH T
NIP.19782131997111001

Lampiran : Keputusan Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 28 Tahun 2023
Tanggal 31 Maret 2023

**TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL
BPSDM PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	NIP	NRK	GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5	6	7
1	MUHAMAD ARIF AMIEN	197007051997031004	122943	IV/B	SEKRETARIS BADAN	KETUA
2	AQIB MAIMUN	198308052011011011	181575	III/D	KETUA SUBKELOMPOK PROGRAM DAN PELAPORAN	SEKRETARIS
3	INDANG MURNININGSIH	197101151997032005	121614	IV/B	KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI DASAR, MANAJERIAL, DAN FUNGSIONAL	ANGGOTA
4	ACHMAD ZAKI SYAFII	196807121991091001	115875	IV/A	KEPALA BIDANG PENJAMINAN MUTU, TUGAS BELAJAR DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI	ANGGOTA
5	HERDI MELANTO	197205031998031008	123786	IV/B	KEPALA BIDANG ANALISIS KEBUTUHAN, PERANCANGAN, PENGEMBANGAN DAN EVALUASI	ANGGOTA
6	ANTON DEWANTO	197109131998031002	123939	IV/B	KEPALA UPT PUSAT DATA DAN INFORMASI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	ANGGOTA
7	ACHMAD ZEN	197912222006041014	165651	III/D	KEPALA UPT PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN KEBIJAKAN PUBLIK	ANGGOTA

NO	NAMA	NIP	NRK	GOL.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4	5	6	7
8	YUDI WIBOWO	198202232010011016	179644	III/C	KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
9	ENGGARTIASTO TRI ATMOJO S	199405242017081001	202447	III/B	PENGOLAH DATA PROGRAM DAN PELAPORAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
10	JULIANTO FORESA	199107292022031006	202559	III/A	PENGOLAH DATA PROGRAM DAN PELAPORAN	ANGGOTA SEKRETARIAT
11	BENNY MATRIKSA	197811072010011006	198314	IV/C	WIDYAIKWARA AHLI MADYA	ANGGOTA SEKRETARIAT
12	HARIS IRIYANTO	197011301999031003	163487	III/D	WIDYAIKWARA AHLI MUDA	ANGGOTA SEKRETARIAT

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DKI JAKARTA,



MOCHAMAD MIPTAHULLOH T
NIP. 197812131997111001

C. Sumber Daya Manusia

Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2023 berjumlah 106 Orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut:

1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

Ditinjau berdasarkan kepangkatan, sebagian besar pegawai berada pada pangkat III/d dengan total 25 orang (23,58%) dan sebanyak 10 orang (9,4%) dari jabatan Fungsional Widyaiswara dari total pegawai sebanyak 106 orang (100%). Urutan kedua terbesar adalah pangkat III/b dengan total 17 orang (16,03%) dan sebanyak 16 orang (15,09%) dari jabatan pelaksana. Data ini menunjukkan pegawai yang berada pada pangkat III/d, III/c dan III/b hamper mendominasi sehingga memiliki kesempatan untuk mengembangkan karir. Hal ini merupakan potensi yang dimiliki BPSDM dan perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan karir pegawai agar potensi pegawai dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tabel 32.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Kepangkatan

LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN JENJANG KEPANGKATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN		IV/E	IV/D	IV/C	IV/B	IV/A	III/D	III/C	III/B	III/A	II/D	II/C	II/B	II/A	JUMLAH
CODE	STRUKTURAL														
ES2	- PIMPINAN TINGGI PRATAMA	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
ES3	- ADMINISTRATOR	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	6
ES4	- PENGAWAS	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	4
	JUMLAH JABATAN STRUKTURAL	-	-	1	4	1	3	2	-	-	-	-	-	-	11
	SUBKELOMPOK														
SUBKELP	- KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3
SUBKELF	- KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	5
	JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-	-	-	8
	FUNGSIONAL														
WIUT	- WIDYAIKWARA AHLI UTAMA	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
WIMA	- WIDYAIKWARA AHLI MADYA	-	-	6	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	15
WIMU	- WIDYAIKWARA AHLI MUDA	-	-	-	-	3	10	-	-	-	-	-	-	-	13
WIPE	- WIDYAIKWARA AHLI PERTAMA	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	5	4	6	5	7	10	2	1	-	-	-	-	-	40
	PELAKSANA														
SATPEL	- KETUA SATUAN PELAKSANA	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	6
TTA	- TEKNIS TINGKAT AHLI	-	-	-	-	-	4	7	4	2	-	1	-	-	18
TTT	- TEKNIS TINGKAT TERAMPIL	-	-	-	-	-	2	3	3	-	1	-	-	-	9
ATA	- ADMINISTRASI TINGKAT AHLI	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
ATT	- ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL	-	-	-	-	-	-	-	6	-	3	-	2	2	13
CPNS	- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH JABATAN PELAKSANA	-	-	-	-	1	7	11	16	3	4	1	2	2	47
	JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN	5	4	7	9	12	25	15	17	3	4	1	2	2	106

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Gedung Teknis Abdul Muis Lantai 8
Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat 10160

2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jabatan

Ditinjau berdasarkan jabatan, sebagian besar pegawai berada pada jabatan Pelaksana dengan total 47 orang atau 44,33% dan sebanyak 40 orang atau 37,73% dari jabatan Fungsional Widyaiswara dari total pegawai sebanyak 106 orang (100%). Data ini menunjukkan pegawai yang berada pada jabatan struktural sebanyak 11 orang atau 10,37% dan sebanyak 8 orang atau 7,54% yaitu jabatan sub kelompok. Hal ini merupakan modal SDM yang dimiliki dan perlu dikembangkan melalui pembinaan pengembangan kompetensi pegawai agar potensi pegawai dapat diberdayakan secara penuh.

Tabel 33.
Pegawai Berdasarkan Jenjang Jabatan

LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN JABATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN		JUMLAH
CODE	STRUKTURAL	
ES2	- PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1
ES3	- ADMINISTRATOR	6
ES4	- PENGAWAS	4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL		11
	SUBKELOMPOK	
SUBKELP	- KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA	3
SUBKELF	- KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL	5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK		8
	FUNGSIONAL	
WIUT	- WIDYAISWARA AHLI UTAMA	9
WIMA	- WIDYAISWARA AHLI MADYA	15
WIMU	- WIDYAISWARA AHLI MUDA	13
WIPE	- WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL		40
	PELAKSANA	
SATPEL	- KETUA SATUAN PELAKSANA	6
TTA	- TENNIS TINGKAT AHLI	18
TTT	- TENNIS TINGKAT TERAMPIL	9
ATA	- ADMINISTRASI TINGKAT AHLI	1
ATT	- ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL	13
CPNS	- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	0
JUMLAH JABATAN PELAKSANA		47
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN		106

3. Distribusi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Distribusi pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta berdasarkan pendidikan menunjukkan sebagian besar pegawai adalah aparatur yang memiliki tingkat pendidikan S2 ke atas dengan proporsi: S2 sebanyak 48 orang (45,28%), sedangkan S1 sebanyak 26 orang atau sebesar 24,52%. Dengan kata lain, 69,81% pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta atau sebanyak 74 orang adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, sehingga memiliki kompetensi untuk mengidentifikasi permasalahan, menganalisisnya dan menemukan solusi untuk menyelesaikan masalah dengan metode ilmiah. Kompetensi ini sangat dibutuhkan dalam merumuskan kebijakan dalam hal pelayanan kepada ASN di Provinsi DKI Jakarta, terutama dalam menggunakan data dan informasi, menemukenali permasalahan, dan membuat kebijakan yang relevan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Sementara, sebanyak 9 orang (8,49%) adalah mereka yang telah menyelesaikan pendidikan Strata 3, dan terdapat di jabatan Fungsional Widyaiswara. Sedangkan selebihnya berpendidikan D4 dan D3 dimana kebanyakan dari mereka adalah PNS yang diangkat antara tahun 2005-2010 yang berarti masih ada kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Sedangkan sebanyak 13 orang (12,26%) pegawai berpendidikan SMA. Jumlah pegawai BPSDM pada saat ini mengalami kekurangan terutama pada tingkat pelaksana, sehingga belum dapat dikatakan bahwa pegawai sudah sesuai dengan kebutuhan.

Tabel 34.
Pegawai Berdasarkan Pendidikan

LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN PENDIDIKAN							
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA							
PER 31 DESEMBER 2023							
JABATAN PEGAWAI ASN	STRATA 3	STRATA 2	STRATA 1	DIPLOMA 4	DIPLOMA 3	SLTA	JUMLAH
CODE	STRUKTURAL						
ES2	- PIMPINAN TINGGI PRATAMA	-	1	-	-	-	1
ES3	- ADMINISTRATOR	-	4	2	-	-	6
ES4	- PENGAWAS	-	2	2	-	-	4
	JUMLAH JABATAN STRUKTURAL	-	7	4	-	-	11
	SUBKELOMPOK						
SUBKELP	- KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA	-	2	1	-	-	3
SUBKELF	- KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL	-	3	2	-	-	5
	JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK	-	5	3	-	-	8
	FUNGSIONAL						
WIUT	- WIDYAISWARA AHLI UTAMA	6	3	-	-	-	9
WIMA	- WIDYAISWARA AHLI MADYA	3	12	-	-	-	15
WIMU	- WIDYAISWARA AHLI MUDA	-	13	-	-	-	13
WIPE	- WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	-	3	-	-	-	3
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	9	31	-	-	-	40
	PELAKSANA						
SATPEL	- KETUA SATUAN PELAKSANA	-	1	4	1	-	6
TTA	- TEKNIS TINGKAT AHLI	-	3	12	2	1	18
TTT	- TEKNIS TINGKAT TERAMPIL	-	1	2	2	4	9
ATA	- ADMINISTRASI TINGKAT AHLI	-	-	1	-	-	1
ATT	- ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL	-	-	-	-	13	13
CPNS	- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH JABATAN PELAKSANA	-	5	19	5	5	13
	JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN	9	48	26	5	5	106

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Gedung Teknis Abdul Muis Lantai 5
Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat 10160

4. Distribusi Pegawai Berdasarkan Usia

Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di kelompok umur lebih dari 51-60 tahun, yaitu 38,67% atau 41 orang. Kelompok umur yang paling sedikit adalah kelompok umur di atas 60 tahun, yaitu hanya sebesar yaitu 4,71% atau 5 orang. Tabel di bawah menunjukkan bahwa dalam 2 tahun (2023-2025) yang akan datang terdapat orang atau% pegawai yang akan pensiun. Hal ini harus segera diantisipasi dengan menambah jumlah pegawai sesuai dengan analisis beban kerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta periode Tahun 2023-2026.

Tabel 35.
Pegawai Berdasarkan Usia

LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN KELOMPOK USIA
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN		DIBAWAH 25	25 - 30	31 - 40	41 - 50	51 - 60	DIATAS 60	JUMLAH
CODE	STRUKTURAL							
ES2	- PIMPINAN TINGGI PRATAMA	-	-	-	1	-	-	1
ES3	- ADMINISTRATOR	-	-	-	1	5	-	6
ES4	- PENGAWAS	-	-	2	1	1	-	4
	JUMLAH JABATAN STRUKTURAL	-	-	2	3	6	-	11
	SUBKELOMPOK							
SUBKELP	- KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA	-	-	2	1	-	-	3
SUBKELF	- KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL	-	-	2	1	2	-	5
	JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK	-	-	4	2	2	-	8
	FUNGSIONAL							
WIUT	- WIDYAISWARA AHLI UTAMA	-	-	-	-	4	5	9
WIMA	- WIDYAISWARA AHLI MADYA	-	-	1	4	10	-	15
WIMU	- WIDYAISWARA AHLI MUDA	-	-	2	3	8	-	13
WIPE	- WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	-	-	-	2	1	-	3
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	-	-	3	9	23	5	40
	PELAKSANA							
SATPEL	- KETUA SATUAN PELAKSANA	-	1	4	-	1	-	6
TTA	- TEKNIS TINGKAT AHLI	-	3	13	2	-	-	18
TTT	- TEKNIS TINGKAT TERAMPIL	-	2	3	1	3	-	9
ATA	- ADMINISTRASI TINGKAT AHLI	-	-	1	-	-	-	1
ATT	- ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL	-	-	3	4	6	-	13
CPNS	- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH JABATAN PELAKSANA	-	6	24	7	10	-	47
	JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN	-	6	33	21	41	5	106

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Gedung Teknis Abdul Muis Lantai 8
Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat 10160

5. Distribusi Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan

Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak berada di agama Islam sebanyak 96 orang, yaitu 90,56%. Yang kedua agama Kristen yaitu sebesar 5,66% atau 6 orang. Diikuti dengan Katolik sebanyak 3 orang dan Hindu sebanyak 1 orang.

Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 36.
Pegawai Berdasarkan Agama Kepercayaan

LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN AGAMA KEPERCAYAAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN		ISLAM	KATHOLIK	KRISTEN	BUDDHA	HINDU	KONGHUCU	JUMLAH
CODE	STRUKTURAL							
ES2	- PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	-	-	-	-	-	1
ES3	- ADMINISTRATOR	6	-	-	-	-	-	6
ES4	- PENGAWAS	3	1	-	-	-	-	4
	JUMLAH JABATAN STRUKTURAL	10	1	-	-	-	-	11
	SUBKELOMPOK							
SUBKELP	- KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA	3	-	-	-	-	-	3
SUBKELF	- KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL	5	-	-	-	-	-	5
	JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK	8	-	-	-	-	-	8
	FUNGSIONAL							
WIUT	- WIDYAISWARA AHLI UTAMA	7	-	2	-	-	-	9
WIMA	- WIDYAISWARA AHLI MADYA	12	-	2	-	1	-	15
WIMU	- WIDYAISWARA AHLI MUDA	12	-	1	-	-	-	13
WIPE	- WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	3	-	-	-	-	-	3
	JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL	34	-	5	-	1	-	40
	PELAKSANA							
SATPEL	- KETUA SATUAN PELAKSANA	6	-	-	-	-	-	6
TTA	- TEKNIS TINGKAT AHLI	16	2	-	-	-	-	18
TTT	- TEKNIS TINGKAT TERAMPIL	9	-	-	-	-	-	9
ATA	- ADMINISTRASI TINGKAT AHLI	1	-	-	-	-	-	1
ATT	- ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL	12	-	1	-	-	-	13
CPNS	- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH JABATAN PELAKSANA	44	2	1	-	-	-	47
	JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN	96	3	6	-	1	-	106

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
Gedung Teknis Abdul Muis Lantai 8
Jalan Abdul Muis No. 66, Jakarta Pusat 10160

6. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Pegawai BPSDM Provinsi DKI Jakarta paling banyak jenis kelamin laki-laki sebanyak 62 orang (58,49%) dan Perempuan sebanyak 44 orang atau (41,50%).

Tabel di bawah menunjukkan data per 31 Desember 2023, sebagai berikut:

Tabel 37.
Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

LAPORAN DATA PEGAWAI - BERDASARKAN JENIS KELAMIN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI DKI JAKARTA
PER 31 DESEMBER 2023

JABATAN PEGAWAI ASN		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
CODE	STRUKTURAL			
ES2	- PIMPINAN TINGGI PRATAMA	1	-	1
ES3	- ADMINISTRATOR	5	1	6
ES4	- PENGEMAS	4	-	4
JUMLAH JABATAN STRUKTURAL		10	1	11
	SUBKELOMPOK			
SUBKELP	- KETUA SUBKELOMPOK - PELAKSANA	1	2	3
SUBKELP	- KETUA SUBKELOMPOK - FUNGSIONAL	1	4	5
JUMLAH JABATAN SUBKELOMPOK		2	6	8
	FUNGSIONAL			
NIUT	- WIDYAISWARA AHLI UTAMA	8	1	9
WIMA	- WIDYAISWARA AHLI MADYA	11	4	15
WIMU	- WIDYAISWARA AHLI MUDA	5	8	13
WIPE	- WIDYAISWARA AHLI PERTAMA	-	3	3
JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL		24	16	40
	PELAKSANA			
SATPEL	- KETUA SATUAN PELAKSANA	3	3	6
TTA	- TEKNIS TINGKAT AHLI	9	9	18
TTT	- TEKNIS TINGKAT TERAMPIL	4	5	9
ATA	- ADMINISTRASI TINGKAT AHLI	1	-	1
ATT	- ADMINISTRASI TINGKAT TERAMPIL	9	4	13
CPNS	- CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL	-	-	-
JUMLAH JABATAN PELAKSANA		26	21	47
JUMLAH SELURUH PEGAWAI ASN		62	44	106

D. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mencapai kinerja, BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak dapat dilepaskan dari segi anggaran di Tahun Anggaran 2023, maka ada beberapa yang telah didapatkan efisiensi maupun kualitas pelaksanaan anggaran seperti yang tertera pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, adapun realisasi anggaran pada BPSDM adalah sebagai berikut:

1. Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada BPSDM

Tabel 38.
Realisasi Program Kepegawaian Daerah

No	Program Kepegawaian Daerah				
	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1.	17.660.314.630	13.413.245.541	75,95%	4.247.069.089	31,66

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Tabel 39.
Realisasi Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia				
	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1.	40.623.302.320	36.348.935.244	89,48%	4.274.367.076	11,76

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

Tabel 40.
Realisasi Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

No	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Pagu	Realisasi	%	Efisiensi	%
1.	64.973.174.135	62.066.326162	95,53%	2.906.847.973	4,68

Sumber: DPA Perubahan BPSDM Provinsi DKI Jakarta

2. Realisasi per Program Terdapat 2 Program Utama dan 1 Program Penunjang yang terdapat pada BPSDM
 - a. Realisasi pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 41.
Realisasi Kegiatan dan Sub kegiatan pada BPSDM Provinsi DKI Jakarta

No	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
1.	Program Kepegawaian Daerah	Pengembangan Kompetensi ASN	Nilai Kepuasan atas fasilitas pelaksanaan tugas belajar	17.660.314.630	13.413.245.541	75,95	4.247.069.089	31,66
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade	14.477.618.574	14.081.907.846	97,27	395.710.728	2,81
			Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis	14.477.618.574	14.081.907.846	97,27	395.710.728	2,81
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase Peserta Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis yang Lulus Passing Grade	26.145.683.746	22.267.027.398	85,17	3.878.656.348	17,42
			Nilai Kepuasan Penyelenggaraan Diklat Pengembangan Kompetensi Teknis	26.145.683.746	22.267.027.398	85,17	3.878.656.348	17,42
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Layanan Administrasi Keuangan	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53	2.906.847.973	4,68

No	Program	Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Kepegawaian	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53	2.906.847.973	4,68
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53	2.906.847.973	4,68
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Penganggaran yang Efisien	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53	2.906.847.973	4,68
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Terhadap Kinerja Layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53	2.906.847.973	4,68
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks Kepuasan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53	2.906.847.973	4,68
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Indeks Kepuasan Layanan BLUD	64.973.174.135	62.066.326.162	95,53	2.906.847.973	4,68

Sumber: DPA BPSDM Provinsi DKI Jakarta

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Ket
1.	Program Kepegawaian Daerah	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	17.660.314.630	13.413.245.541	75,95	4.247.069.089	31,66	
2.	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	670.577.000	670.477.000	100	100.000	0,01	
		Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan	768.257.000	767.857.000	99,95	400.000	0,05	

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Ket
		Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun						
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4.396.845.123	4.241.050.123	96,46	155.795.000	3,67	

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Ket
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	286.325.000	286.325.000	100	-	-	
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi,	100.600.000	71.020.000	70,60	29.580.000	42%	

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Ket
		Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional							
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	234.953.033	231.036.033	98,33	3.917.000	1,70	
		Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	1.372.111.996	1.286.143.910	93,73	85.968.086	6,68	
		Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	316.839.107	300.490.916	94,84	16.348.191	5,44	
	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi		Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan	24.121.179.610	20.378.336.539	84,48	3.742.843.071	18,37	

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Ket
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50.026.250.234	47.811.390.808	95,57	2.214.859.426	4,63	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	120.089.680	260.931.030	100	-		
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	357.119.502	271.308.500	75,97	85.811.002	31,63	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3.665.508.944	3.632.293.644	99,09	33.215.300	0,91	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	127.531.940	106.701.300	83,67	20.830.640	19,52	

No	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Ket
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	355.644.000	322.344.000	90,64	33.300.000	10,33	
		Pengadaan Barang Pakai Habis Penunjang Pendidikan dan Pelatihan		610.500.000	554.000.000	90,75	56.500.000	10,20	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	182.381.295	158.424.808	86,66	23.956.487	15,12	
				16.816.000	11.999.500	71,36	4.816.500	40,14	
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	260.931.030	260.931.030	100	-	-	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor		200.328.516	200.195.226	99,93	133.290	0,07	
		Pengadaan Modal Penunjang Pendidikan dan Pelatihan		784.751.319	777.882.840	99,12	85.811.002	31,63	



No	Program	Sub Kegiatan	Indikator	Anggaran	Realisasi	%	Efisiensi	%	Ket
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.023.561.168	4.901.019.240	97,56	122.541.928	2,50	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	161.866.328	86.238.120	53,28	75.628.208	87,70	
		Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	162.475.420	160.917.000	99,04	1.558.420	0,97	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	918.271.078	893.742.222	97,33	24.528.856	2,74	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	529.479.182	252.568.774	47,70	276.910.408	110	

Sumber: DPA BPSDM Provinsi DKI Jakarta



Jakarta
Public Policy
Center



BAB IV PENUTUP

BAB IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Pencapaian Kinerja BPSDM Provinsi DKI Jakarta dalam mencapai target kinerja tahun 2023 membuktikan dedikasi dan sinergi yang luar biasa. Dalam setiap langkahnya, BPSDM merancang dan melaksanakan strategi secara terencana, dimulai dari penyusunan Renstra hingga Rencana Kerja beserta alokasi anggaran tahunan. Sinergi yang mengalir dari pejabat Eselon 3 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran hingga pelaksana yang terlibat dalam tugas melibatkan seluruh jajaran dalam pencapaian kinerja tahun 2023.

Selanjutnya, berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2023 yang ditandatangani Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Pertama dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Pihak Kedua telah ditetapkan 1 sasaran strategis BPSDM Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2023 yaitu: Peningkatan kompetensi ASN dalam rangka menciptakan agen perubahan dan penggerak partisipasi masyarakat dengan 2 indikator yaitu:

- Indeks Sistem Merit pada aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDM;
- Nilai Dimensi pengembangan kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

BPSDM Provinsi DKI Jakarta, sebagai garda terdepan pengembangan kompetensi ASN di Provinsi DKI Jakarta, berupaya maksimal memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Segala langkah dan keberhasilan ini tak lepas dari peran aktif semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dengan penuh tanggung jawab menjalankan tugas dan fungsinya. BPSDM Provinsi DKI Jakarta bukan hanya memenuhi target kinerja, tetapi juga menjadi motor penggerak bagi perubahan positif dalam lingkup ASN.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini menjadi bukti nyata keberhasilan BPSDM Provinsi DKI Jakarta, di tengah tantangan dan dinamika, BPSDM tetap berhasil mencapai target sasaran dan indikator kinerja dengan penuh dedikasi. Sebagai sumber informasi kunci, laporan ini tidak hanya memenuhi kewajiban monitoring dan evaluasi dari Gubernur, tetapi juga menjadi pilar dalam pengambilan keputusan untuk terus meningkatkan kinerja dan prestasi BPSDM Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

B. SARAN DAN REKOMENDASI

Berdasarkan pencapaian yang membanggakan dari BPSDM Provinsi DKI Jakarta, tantangan untuk tetap komitmen dalam meningkatkan pelayanan kepada ASN di Provinsi DKI Jakarta maupun di Kementerian/Lembaga/Daerah se-Indonesia menjadi sebuah panggilan. Dalam rangka menjawab panggilan tersebut, terdapat beberapa saran dan rekomendasi strategis yang dapat diterapkan:

1. Menggalakkan Revolusi Teknologi dalam Pendidikan (EdTech):

Melangkah lebih jauh dalam memaksimalkan teknologi dan media sosial, BPSDM dapat memimpin perubahan melalui pengembangan platform pelatihan daring yang inovatif. Merangkul teknologi seperti aplikasi pelatihan daring dan model pelatihan blended (online dan offline) akan memungkinkan partisipasi ASN yang terbatas secara geografis. Ini tidak hanya meningkatkan aksesibilitas pelatihan, tetapi juga membantu memasukkan elemen interaktif dan pengalaman belajar yang lebih mendalam.

2. Implementasi Sistem Penghargaan dan Sanksi yang Adil:

Reward dan punishment yang diterapkan harus bersifat adil dan proporsional. BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat merancang sistem penghargaan yang tidak hanya mencakup pujian formal, tetapi juga insentif-insetif positif seperti kesempatan pengembangan karir atau partisipasi dalam proyek strategis. Di samping itu, sanksi juga perlu bersifat mendidik dan bersifat korektif untuk memastikan keadilan dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas.

3. Evaluasi Pelayanan Secara Holistik:

Evaluasi pelayanan pelatihan tidak hanya sebatas pada aspek teknis, melainkan juga mempertimbangkan aspek kepuasan peserta, dampak langsung pada pekerjaan, dan keterlibatan yang diperoleh. Melakukan survei kepuasan secara berkala, mengadakan forum diskusi, dan melibatkan para peserta dalam penilaian program akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas pelatihan dan membuka peluang untuk perbaikan berkelanjutan.

Dengan menerapkan saran dan rekomendasi ini, BPSDM Provinsi DKI Jakarta tidak hanya berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan kepada ASN, tetapi juga menjadi pelopor dalam inovasi pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Dengan tetap membumikan setiap langkah strategis, BPSDM Provinsi DKI Jakarta dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi ASN Provinsi DKI Jakarta dan lebih jauh lagi, menginspirasi perkembangan sektor publik di Indonesia.



Jakarta
Public Policy
Center



LAMPIRAN

1. Perkin Eselon 2



PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

Nama : Mochamad Miflahulloh Tamary
 NIP : 197812131987111001
 Jabatan : Kepala Badan
 Unit Kerja : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	Sasaran	NO	Indikator Kinerja	Sumber Data	Pengukuran Kinerja					Keterangan
					I	II	III	IV	Tahunan	
1	Peningkatan Kompetensi Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Serta Peningkatan Knowledge Management	1	Indeks Sistem Merit pada Aspek dan Sub Aspek Lingkup BPSDKM	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	31	31	Indeks
<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN; 2. Peraturan Kepala Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintahan.</p> <p>DEFINISI : Indeks sistem merit pada Aspek dan Sub Aspek lingkup BPSDKM adalah ukuran yang digunakan sebagai standar penilaian penerapan sistem merit Pemprov DKI Jakarta pada aspek Pengadaan (Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS) dan Aspek Pengembangan Keir (Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dan Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai)</p> <p>METODE PENGUKURAN : (Metode Konsolidasi Lokasi) Penilaian mandiri sistem merit terdapat 8 Aspek dengan total 37 Sub Aspek, BPSDKM mengampu 2 Aspek dan didalamnya terdapat 4 Sub Aspek dengan pembobotan sebagai berikut : 1. Pengadaan (Bobot 8), yang merupakan 1 Sub Aspek dari 5 sub aspek, yaitu Sub Aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS; 2. Pengembangan keir (Bobot 30), yang merupakan 3 Sub Aspek dari 10 Sub Aspek, yaitu : Sub Aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, Sub Aspek Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan, dan Sub Aspek Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai. Kategori I, nilai 30,87 - 38, sebutan Sangat Baik (2) Kategori II, nilai 23,75 - 30,86, sebutan Baik (3) Kategori III, nilai 16,62 - 23,74, sebutan Kurang (4) Kategori I, nilai 9,5 - 16,61, sebutan Buruk</p> <p>SUMBER DATA : Hasil Evaluasi Mandiri</p>										
2	Peningkatan Kompetensi ASN Dalam Rangka Menciptakan Agen Perubahan dan Penguat Partisipasi Masyarakat	1	Nilai Dimensi Pengembangan Kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN	e-SAKIP	N/A	N/A	N/A	38,7	38,7	Nilai
<p>DASAR HUKUM : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara; 2. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.</p> <p>DEFINISI : Indeks Profesionalitas adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Kriteria yang digunakan untuk mengukur tingkat profesionalitas ASN Dimensi kompetensi (40%).</p> <p>METODE PENGUKURAN : Jumlah total hasil perkalian dari bobot dimensi/indikator dikalikan skor/nilai masing-masing jawaban dimensi/indikator yang dilakukan secara mandiri (memperoleh Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN)</p> <p>SUMBER DATA : SIMPEG dan SAPK</p>										

3	Berkembangnya Kapasitas, Profesionalitas, dan Ilmu Kerja Aparatur	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Peningkatan Profesionalitas SDM Pemprov DKI Jakarta	N/A	100	100	100	100	100	100	Person
4	Bekurangnya Kelimpangan Serta Terjeminnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan Perlindungan Sosial	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Penuhan Hak Penyandang Disabilitas	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Penanggulangan Kemiskinan Sub KSD Penghormatan, Pelindungan, Dan Penuhan Hak Penyandang Disabilitas	100	N/A	100	100	N/A	100	100	Person
5	Terakselerasinya Transformasi Digital dan Pengembangan Ekosistem Kota Cerdas	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Transformasi Digital	N/A	100	100	100	N/A	100	100	Person
6	Tercapainya Perbaikan Manajemen dan Arsitektur Kinerja Pemerintah	1	Persentase penyelesaian rencana aksi KSD Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	e-Monev KSD	Realisasi penyelesaian dibandingkan target penyelesaian rencana aksi Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional Sub KSD Perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	100	100	100	100	100	100	100	Person
Sasaran Khusus													
7	Tewujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang taklis dan adaptif	1	Opini laporan Keuangan	e-Kinerja	Pernyataan profesional badan pemeriksa keuangan RI mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah Pemprov DKI Jakarta sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, keadaan sistem pengendalian internal, kepatuhan terhadap perundangan dan kecukupan pergajean (konversi nilai opini pemeriksaan LK, WTP=3(100%), WDP=2(75%), TW=1(50%), TNP=0(25%))	N/A	(3) WTP	N/A	N/A	(3) WTP	N/A	(3) WTP	Predikat
8	Meningkatnya Pemanfaatan E-Purchasing dalam Pengadaan Barang dan Jasa	1	Persentase Pemanfaatan E-Order	e-Kinerja	Formula Pengukuran : Jumlah transaksi di e-Order dibandingkan dengan realisasi anggaran kegiatan makan minum rapat, jamuan dan lapangan (dikecualikan untuk galon, kopi, teh, gula, dst.) Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Person

9	Terwujudnya tata kelola strategis komunikasi publik untuk program-program umum dan unggulan Perangkat Daerah	1	Persentase implementasi rencana strategi komunikasi publik, program unggulan atau program umum serta respon perangkat Daerah pada saat krisis komunikasi program.	e-Kinerja	<p>a) Persentase teresunnya strategi komunikasi program unggulan atau program umum Perangkat Daerah.</p> <p>b) Persentase teresunnya editorial plan sesuai strategi komunikasi.</p> <p>c) Persentase teresunnya materi mitigasi krisis dan bahan komunikasi pada saat krisis dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Persentase terpublikasinya materi komunikasi melalui media internal OPD atau media massa atau aktivasi luar ruang.</p> <p>Penghitungan:</p> <p>a) Bobot 20%; PD menyusun materi strategi komunikasi program unggulan atau program umum per triwulan.</p> <p>b) Bobot 20%; PD menyusun materi editorial plan sesuai strategi komunikasi per triwulan.</p> <p>c) Bobot 30%; PD menyusun materi mitigasi krisis per triwulan, dan bahan komunikasi pada saat krisis (draft press release dan data pendukung) dalam kurun waktu <6 jam.</p> <p>d) Bobot 30%; PD mempublikasikan materi komunikasi (realisasi editorial plan, min. 15 materi per triwulan) melalui media internal atau media massa atau media sosial atau aktivasi luar ruang per triwulan.</p>	100%	100%	100%	100%	100%	Persan	
10	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel	1	Predikat SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023	e-Kinerja	Nilai/Predikat diperoleh dan hasil evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah oleh Inspektoret (nilai: 82)	N/A	N/A	N/A	N/A	A (82)	A (82)	Predikat
11	Meningkatnya Pengelolaan Asip pada Perangkat Daerah	1	Persentase Asip Aktif dalam Daftar Asip Aktif	e-Kinerja	<p>Definisi : Terselenggaranya Pembinaan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas pada semua Unit Pengolah (UP) dan diserahkan ke Unit Kearsipan (UK). Pengelolaan Asip Dinamis Perangkat Daerah masuk dalam Sasaran Khusus Perangkat Daerah Eselon II.</p> <p>Realisasi: Target berupa Laporan Daftar Berkas dan Daftar Isi berkas dari Seluruh Eselon II/Selektora</p> <p>Unit Pengolah adalah satuan kerja pada pencipta asip yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengolah semua asip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan asip di lingkungannya.</p> <p>Unit Pengolah : Biro/Bagian/Gidang/Inspektur Pembantu/Suku Badan/Suku Dinas (Kecuali Seluruh LPT)</p> <p>Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta asip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.</p> <p>Unit Kearsipan (UK) Tingkat II sebagai berikut: Inspektur/ Badan, Dinas, Saluran Polisi Pamong Praja, Walikota/Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat, Biro Umum</p> <p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permangan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. 2. Peraturan Kepala ANRI Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan 3. Peraturan Gubernur Nomor 79 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Asip Dinamis <p>Pengukuran:</p> <p>Jumlah Unit Pengolah (UP) yang menyerahkan laporan kepada Unit Kearsipan (UK) II di bagi jumlah unit Pengelola (UP) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di kali 100%</p> <p>- Laporan PD (UK) dilaporkan ke masing-masing Asisten sesuai dengan urusanya dan diembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Laporan untuk tingkat Biro-Biro selaku UP menyerahkan ke Biro Umum selaku UK, selanjutnya Biro Umum selaku UK melaporkan ke Asisten Pemerintahan ditembuskan ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>- Biro-Biro selaku UP melaporkan ke Asisten masing-masing sesuai urusan.</p> <p>Waktu Penilaian:</p> <p>TW I : N/A</p> <p>TW II : Pembinaan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Januari s.d. Juni.</p> <p>TW III : Pembinaan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2021 periode Juli s.d. Desember.</p> <p>TW IV : Pembinaan Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas Tahun 2022 Periode Januari s.d. Desember.</p>	N/A	100%	100%	100%	Persentase		

12	Terwujudkannya tata kelola SDI yang baik melalui penerintahan daerah data daerah	1	Persentase progress pengumpulan data sesuai daftar data dan batas waktu pengumpulan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur	e-Kinerja	<p>Definisi: Hasil pengumpulan data sesuai daftar data dan jadwal rilis yang telah ditetapkan dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Data ditumpulkan oleh Produsen data kepada Wisadita sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Daftar data dan jadwal rilis berdasarkan Keputusan Gubernur tentang Daftar Data Daerah</p> <p>Dasar Hukum: Keputusan Gubernur Nomor 185 Tahun 2023 Tentang Daftar Data Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023</p> <p>Formula Pengukuran: $\left[\frac{\text{Jumlah data terkumpul ke wadidata}}{\text{Jumlah data yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada TW tersebut}} \right] \times 100\%$</p> <p>Batas waktu pengumpulan adalah tanggal 5 bulan berikutnya dari jadwal rilis</p> <p>Sumber Data : Daftar Data Daerah (Portal Data)</p>	100%	100%	100%	100%	100%	F
13	Terkeadanya Keuangan Daerah yang Sehat, Transparan, dan Akuntabel	1	Persentase Inventarisasi BMD berupa Gedung dan Bangunan pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang Tahun 2023 di masing-masing PDUKKPD	e-Kinerja	<p>Definisi: Capaian Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada PDUKKPD yang mempunyai BMD berupa Gedung dan Bangunan. Kepala Perangkat Daerah melaporkan Hasil Inventarisasi BMD pada PD dan UKPD yang berada dalam Organisasi Perangkat Daerah masing-masing kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala BPAD selaku Sekretaris Tim Pengendali BMD yang selanjutnya diinventarisasi adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BMD tidak ada berupa non fisik. 2. BMD tidak ada berupa fisik. 3. BMD ada, bagian dari aset induk. 4. BMD ada, sudah melengkapi data dan informasi, menempelkan label dan scan QR Code. <p>Penghitungan: 1. Persentase 10% a. Bobot 5%: PDUKKPD menyusun SK Tim/Surat Tugas Tim Inventarisasi b. Bobot 5%: PDUKKPD menyusun Jadwal Inventarisasi 2. Pelaksanaan 75% a. Bobot 75%: PDUKKPD menyelesaikan Pelaksanaan Inventarisasi 3. Pelaporan 15% a. Bobot 5%: PDUKKPD menyusun Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) b. Bobot 5%: PDUKKPD membuat Berita Acara Hasil Inventarisasi (BAHI) c. Bobot 5%: PDUKKPD membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM)</p>	N/A	40%	75%	100%	100%	F
14	Peningkatan penggunaan produk dalam negeri	1	Persentase realisasi belanja barang/jasa bersertifikat TKDN, produk dalam negeri, dan/atau produk usaha mikro kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri	e-Kinerja	<p>Definisi: 1. Produk Dalam Negeri adalah barang dan jasa termasuk rencana bangun dan penyelesaian yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan berproduksi di Indonesia ditunjukkan dengan penyediaan penyedia telah menggunakan produk dalam negeri (self declare) 2. Sertifikat TKDN adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian yang menjelaskan kandungan dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.</p> <p>Formula Pengukuran: $\frac{\text{Jumlah realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah) bersertifikat TKDN dan/atau produk dalam negeri, diutamakan produk dari usaha mikro kecil dan koperasi dibandingkan dengan realisasi belanja (SPJ) barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah)}}{\text{Total realisasi belanja barang/jasa dan belanja modal (kecuali tanah)}}$</p> <p>Sumber Data : 1. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) P3DN Kementerian Dalam Negeri 2. Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) DKI Jakarta - BPKD</p> <p>Dasar Hukum: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Pemberdayaan Industri 2. Inpres Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Pengunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah</p>	N/A	N/A	N/A	80%	90%	F

17	Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	1	Persentase Implementasi Penerapan Manajemen Risiko	e-Kinerja	Dasar Hukum:	N/A	40%	80%	100%	100%	Persentase
					<p>1. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2020 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>2. Keputusan Gubernur Nomor 153 Tahun 2021 tentang Struktur Manajemen Risiko di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta</p> <p>Definisi Operasional:</p> <p>Penerapan Manajemen Risiko diwujudkan melalui pembentukan struktur Manajemen Risiko, Unit Keputuhan Internal dan penyelenggaraan Proses Manajemen Risiko melalui Sistem Informasi Pengelolaan Risiko dan Penanganan (SI-Penris).</p> <p>1. Struktur Manajemen Risiko tingkat Perangkat Daerah dibentuk dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Unit Pemilik Risiko (UPR) yang terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Pemilik Risiko; b) Koordinator Risiko; dan c) Manajer Risiko. <p>2. Unit Keputuhan Internal dilaksanakan oleh salah satu unit kerja di bawah Pemilik Risiko/Kepala Perangkat Daerah (Level Eselon 3/Koordinator) yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Perangkat Daerah</p> <p>3. Proses Manajemen Risiko dilakukan terhadap sasaran strategis yang terdapat dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang dilakukan melalui 5 (lima) tahapan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Komunikasi dan konsultasi; b) Penetapan konteks; c) Penilaian Risiko (identifikasi Risiko, Analisis Risiko dan Evaluasi Risiko); d) Penanganan Risiko; dan e) Pemantauan. <p>Masing-masing Tahapan dituangkan dalam bentuk Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko, Formulir profil dan peta Risiko, dan Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Formula Pengukuran : ((Jumlah dokumen yang terverifikasi oleh Inspektoral) / (Seluruh dokumen yang wajib terkumpul sesuai batas waktu pengumpulan pada Triwulan 4)) x 100%</p> <p>Output Sasaran : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Keputuhan Internal; 3. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 4. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko; 5. Dokumen Formulir penanganan Risiko.</p> <p>Metode Pengukuran : Tersajinya dokumen-dokumen Implementasi Penerapan Manajemen Risiko yang telah diverifikasi oleh Inspektoral : Triwulan II : 1. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Pembentukan Unit Pemilik Risiko (UPR); 2. Dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah terkait Penetapan Unit Keputuhan Internal Triwulan III : 1. Dokumen Formulir Penetapan konteks Manajemen Risiko; 2. Dokumen Formulir profil dan peta Risiko Triwulan IV : 1. Dokumen Formulir penanganan Risiko Sumber Data: Hasil Verifikasi Inspektoral</p>						

Sasaran Operasional	1	e-Kinerja	Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur (rapim, e-office, arahan melalui media elektronik, dan bentuk arahan lainnya) dibagi Jumlah TL Arahan Gubernur dikali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
19 Terealisasinya Tindak Lanjut Arahan Gubernur	Persentase capaian penyelesaian Tindak Lanjut Arahan Gubernur		Jumlah Realisasi TL Arahan Gubernur dibagi Jumlah TL Arahan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
20 Meningkatnya penyelesaian pengaduan masyarakat	Persentase capaian penyelesaian pengaduan masyarakat	CRM	Jumlah Realisasi TL Aduan Masyarakat dibagi Jumlah TL Aduan Masyarakat di kali 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Persen
21 Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil eksternal (BPK)	Persentase progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan eksternal (BPK)	e-Kinerja	90% dari jumlah rekomendasi LHP BPK RI Tahun 2005 dan seterusnya yang telah diselesaikan oleh Perangkar Daerah dan UKPD dibawah koordinasinya / jumlah sisa rekomendasi yang belum ditindaklanjuti dari LHP BPK RI tahun 2005 dan seterusnya) x 100% (Verifikasi oleh Inspektoral)	25%	25%	25%	25%	25%	100%	Persen

Jakarta, 2023
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Provinsi DKI Jakarta,

Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota
Jakarta,

Heru Budi Hartono


Mochamad Miftahul Tamasy
NIP. 19740213199711001

2. Penghargaan dan Inovasi



bsi.



Certificate of Registration

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM - ISO 9001:2015

This is to certify that:

BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8,
Jalan Abdul Muis Nomor 66
Jakarta Pusat
DKI Jakarta
Indonesia 10160

Holds Certificate No:

FS 800953

and operates a Quality Management System which complies with the requirements of ISO 9001:2015 for the following scope:

The Provision of Development Competencies of Education, Employee Training and Competency Certification

(Pelaksana Pengembangan Kompetensi Pendidikan Pelatihan Pegawai serta Sertifikasi Kompetensi)

For and on behalf of BSI:

Emmanuel Herve, Managing Director, ASEAN

Original Registration Date: 2023-12-26

Effective Date: 2023-12-26

Latest Revision Date: 2023-12-26

Expiry Date: 2026-12-25

Page: 1 of 1



...making excellence a habit.™

This certificate was issued electronically and remains the property of BSI and is bound by the conditions of contract.

An electronic certificate can be authenticated [online](#).

Printed copies can be validated at www.bsi-global.com/ClientDirectory or telephone +62 21 806 49 600 or +62 21 227 678 09.

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of ISO 9001:2015 requirements may be obtained by consulting the organization.

This certificate is valid only if provided original copies are in complete set.

Indonesia Headquarters: Talavera Office Suite 20th Floor, Suite #01-06 J. TB Simatupang Kav. 22 - 26, Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430, Indonesia. Tel: +62 21 2276 7809 ; +62 21 8064 9600 Fax: +62 21 2276 8271
A Member of the BSI Group of Companies.



This Certificate has been awarded to

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8, Jalan
Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat

In recognition of the organization's Management System
which complies with

**ISO 37001:2016
(Anti-bribery Management System)**

The scope of activities covered by this certificate is defined below

**Provision of Development Competencies of Education, Employee
Training and Competency Certification**

SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM CERTIFICATIONS

Certificate Number: **SIS140124A016**
Date of Issue of Original Certificate: **03.01.2024**
Date of Issue of latest certificate: **03.01.2024**
Expiry Date: **02.01.2025**
Re-Certification Due on: **03.12.2026**


Managing Director



Note: This is an accredited certificate issued by SIS Certifications Pvt. Ltd.



Certified Organization is responsible for maintaining the compliance of the relevant standard rules. Any significant changes in the scope of the certification or standard referred above render this certificate invalid

Corporate office- **SIS Certifications Pvt. Ltd.**
Unit No. 514, 5th Floor, Vipul Business Park, Sector-48, Sohna Road, Gurgaon-122018, Haryana, India.
International Key Locations: **Qatar, Egypt, Italy, KSA, Nigeria & Malaysia.**
Email us:- support@siscertifications.com, Call /Whatsapp: +91-9643073391
The status of this certificate can be verified on <https://siscertifications.com>
Web:- www.siscertifications.com



Issue No: 01



Certificate of Recognition



Awarded to

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Gedung Dinas Teknis Abdul Muis Lantai 8, Jalan
Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat

By

SIS Certifications Pvt. Ltd.

in recognition of

SYNDICATE OF INTERNATIONAL SYSTEM CERTIFICATIONS

ISO 37001:2016

On 3rd January, 2024


Managing Director



This recognition letter is valid only if produced along with the valid ISO 37001:2016 Certificate bearing the Certificate number:- SIS140124A016. The Validity of the ISO Certificate can be verified by visiting <http://www.siscertifications.co.in/verify/>. The Certificate can be verified by using the above mentioned Certificate Number.

SIS Certifications Pvt. Ltd., Unit No. 514, 5th Floor, Vipul Business Park, Sohna Road, Sector-48, Gurgaon-122018, Haryana, India.

[Http://www.siscertifications.co.in](http://www.siscertifications.co.in)



3. Kegiatan

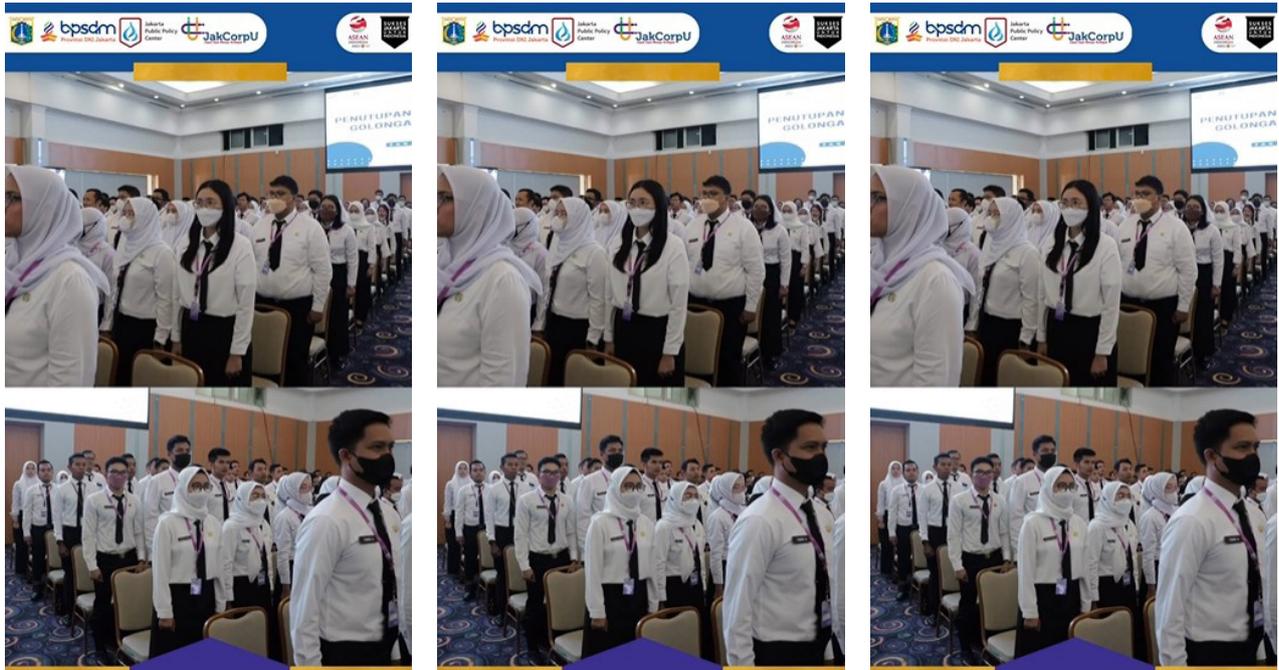
a. Pada 30 November s.d 1 Desember 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan Kegiatan Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan (Family Development Program) bagi DWP dan TP PKK Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang berlokasi di Hotel Millennium Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan Penyampaian Sambutan oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Serta dihadiri oleh Ibu Mirdiyanti selaku Ketua TP PKK Provinsi DKI Jakarta, Ibu Endang Lestari selaku Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta dan Ibu Suniyati selaku Wakil Ketua DWP Provinsi DKI Jakarta. Dalam kegiatan ini, para peserta mendapatkan materi yang sangat bermanfaat dari narasumber yang hebat, yaitu:

- 1) Peningkatan potensi perempuan dan etika berorganisasi dari Ibu Wien Ritola Tasmaya;
- 2) Table manner dan Personal Branding dari Bapak Sandra Erawanto;
- 3) Manajemen stress dari Bapak Edward Andriyanto;
- 4) Kelas make up dari Ibu Rahmah Sholika dan Ibu Faben Feby Ramdiani.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan zaman yang semakin cepat. Dengan meningkatkan kompetensi, para peserta dapat lebih siap dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang muncul di era globalisasi



b. Pada hari Selasa, 30 Mei 2023 Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc. selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta mewakili Sekda Provinsi DKI Jakarta menutup Pelatihan Dasar CPNS Golongan III Angkatan 156-162 dan Golongan II Angkatan 36-40 di Lingkungan Provinsi DKI Jakarta yang berjumlah 423 peserta. Selamat kepada para CPNS, Semoga pelatihan yang telah dijalani dapat menghasilkan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, berkarakter, berintegritas dan berlandaskan pada core values ASN dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, serta perekat dan pemersatu bangsa



c. Pada Selasa 17 Oktober 2023, BPSDM Provinsi DKI Jakarta menyelenggarakan kegiatan Peningkatan Kompetensi Kepemimpinan Aparatur Sipil Negara (ASN) bagi peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Tahun 2023, yang berlokasi di bertempat di Gedung Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan laporan penyelenggaraan oleh Ibu Indang Murningsih, S.Pd., M.M., selaku Kepala Bidang Pengembangan Dasar Manajerial dan Fungsional BPSDM Provinsi DKI Jakarta, dilanjutkan dengan sambutan oleh Bapak Mochamad Miftahulloh Tamary, S.STP., M.T., M.Sc., selaku Kepala BPSDM Provinsi DKI Jakarta, kemudian pemberian arahan dan pembukaan secara resmi oleh Bapak Drs. Heru Budi Hartono, M.M., selaku Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 450 peserta yang terdiri dari 94 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) dan 356 orang peserta Pelatihan Kepemimpinan Pegawai (PKP) Tahun 2023. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Peran Kepemimpinan TNI dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari Bapak Mayor Jenderal TNI Mohamad Hasan, S.H.
- 2) Peran Kepemimpinan Kepolisian Republik Indonesia dalam menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat dari Bapak Kombes Pol. Nurcholis, S.I.K., M.Si.
- 3) Aparatur Sipil Negara Bersih Narkoba dari Bapak Joko Purnomo, S.E., M.M., M.Si.

Dengan adanya acara ini, diharapkan rekan-rekan ASN dapat memberikan pelayanan yang berkualitas dan akuntabel kepada masyarakat, serta memperkuat implementasi core values ASN BerAKHLAK dalam rangka mewujudkan ASN yang profesional.

d. Pengarahan Para Pejabat Eselon 3 Di Taman Ismail Marzuki



e. Talkshow Transisi Jakarta Menjadi Kota Bisnis



f. Paparan dan Presentasi Rencana Aksi Peserta DUTEP dan Seleksi Pegawai Tugas Belajar
g. Podcast Rabu Belajar



h. Kesamaptaan Para Peserta Pelatihan Dasar ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



i. Rakornas Kepala BPSDM seluruh Indonesia



j. Sinergitas Antara NSW dan Sektor Pendidikan Indonesia



**Pameran Pendidikan Sydney dan
New South Wales, Australia**
Sinergitas antara NSW dan sektor pendidikan Indonesia



k. Sosialisasi Jakarta Corporate University di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta



l. Uji Kompetensi Pengadaan Barang dan Jasa





bpsdm
Provinsi DKI Jakarta



Jakarta
Public Policy
Center



JakCompu
Cepat Tepat Merajut Tatanan!

**SUKSES
JAKARTA
UNTUK
INDONESIA**

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
TAHUN 2023**

JL. ABDUL MUIS NO. 66, GAMBIR, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

